



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena hanya dengan berbagai limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros Tahun 2022 ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa beberapa kewajiban Kepala Daerah antara lain adalah memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepada DPRD serta menginformasikan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada Masyarakat.

Selain itu, laporan ini disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun sistematika laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

- a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros
- b. Data Geografis Kabupaten Maros
- c. Jumlah Penduduk
- d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
- e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah
- f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah



- a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah
- b. Visi dan Misi
- c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2021-2026
- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2022

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

- a. Indeks Pembangunan Manusia
- b. Angka Kemiskinan
- c. Angka Pengangguran
- d. Pertumbuhan Ekonomi
- e. Pendapatan Per Kapita
- f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

- a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Tahun 2022
- d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah
- e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan



Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

- f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros
- 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- 4.1. Urusan Pendidikan
- 4.2. Urusan Kesehatan
- 4.3. Urusan Pekerjaan Umum
- 4.4. Urusan Perumahan Rakyat
- 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- 4.6. Urusan Sosial

BAB V PENUTUP

Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Oleh karena itu, sangat beralasan jika Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi bahan evaluasi, informasi, dan referensi bagi pemerintah pusat serta sebagai acuan dalam memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi pengembangan daerah dimasa yang akan datang. Di sisi lain, penyusunan LPPD ini merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kabupaten Maros untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Maros tahun 2022 ini disampaikan, semoga dapat memberi manfaat dalam terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik di Kabupaten Maros. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat dan berbagai pihak yang telah mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Maros.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Maros, 31 Maret 2023



**DAFTAR ISI**

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	2
a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros.....	4
b. Data Geografis Pembentukan Kabupaten Maros.....	6
c. Jumlah Penduduk.....	7
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	11
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	22
f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020	28
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	53
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah.....	56
b. Visi dan Misi	56
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2016-2021	58
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Tahun 2020	73
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	79
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	84
2.1. Capaian Kinerja Makro	84
a. Indeks Pembangunan Manusia	85
b. Angka Kemiskinan	85
c. Angka Pengangguran	86
d. Pertumbuhan Ekonomi.....	86
e. Pendapatan Per Kapita	87
f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	88



2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	88
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	90
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	163
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	197
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	200
a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021	200
b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021	202
c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Tahun 2020	231
d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	234
e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai.....	236
f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	241
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	258
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros	258
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros	259
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	260
4.1. Urusan Pendidikan	261
4.2. Urusan Kesehatan	280
4.3. Urusan Pekerjaan Umum	289
4.4. Urusan Perumahan Rakyat	293
4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	297
4.6. Urusan Sosial	310
BAB V PENUTUP.....	316



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah antara lain dapat dinilai dari tertibnya administrasi laporan penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah, dan sebagaimana tercantum pada Pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanahkan kewajiban Kepala Daerah menyampaikan LPPD sebagai upaya pertanggungjawaban publik untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan Otonomi Daerah yang sejalan dengan cita-cita menciptakan pemerintahan yang bersih (*clean government*), bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata Pemerintahan yang baik (*good governance*). Kewajiban yang dimaksud disampaikan kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat.

Respon dan kepekaan Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanah Undang-Undang tersebut sangat dibutuhkan. Kabupaten Maros sebagai salah satu Kabupaten Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



1.1.1 Penjelasan Umum

Kabupaten Maros dengan ibukota kabupaten adalah Kota Maros yang berperan sebagai pusat pemerintahan dengan segala aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan politik terletak di Kecamatan Turikale. Jika dilihat dari geografis wilayah yang lebih mikro, Kota Maros terbagi atas 3 (tiga) segmen kawasan yang merupakan bagian dari pusat-pusat pemerintahan Kabupaten Maros dan dihubungkan oleh jaringan jalan arteri. Sedangkan ditinjau dari perkembangan wilayah, juga terjadi pada arah jaringan jalan arteri sekunder yang menghubungkan dengan wilayah Kabupaten Bone, yang meliputi wilayah Kecamatan Bantimurung, Simbang, Cenrana, Camba dan Mallawa.

Secara umum, wilayah Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat besar terhadap pembangunan regional dan nasional melalui peranannya dalam berbagai aspek, yakni :

1. Pusat pelayanan transportasi udara internasional, yakni Bandar Udara Sultan Hasanuddin. Bandar udara ini terletak di Kecamatan Mandai yang merupakan wilayah perbatasan dengan Kota Makassar. Pertumbuhan pelayanan bandar udara Hasanuddin yang begitu pesatnya, sehingga dilakukan pengembangan bandar udara baru dengan luas lahan pengembangan 554,6 Ha. Bandar udara Hasanuddin merupakan wilayah pintu gerbang Sulawesi Selatan dan KTI yang mengindikasikan bahwa Kabupaten Maros adalah gerbang utama pembangunan regional dan nasional.
2. Pusat Penelitian Pertanian, yakni dengan adanya pengembangan Balai Penelitian Tanaman Sereal dan Tanaman Pangan yang berlokasi di Kecamatan Turikale. Balai penelitian ini melakukan serangkaian penelitian untuk menghasilkan inovasi teknologi pertanian sekaligus mendiseminasikan secara terarah guna mendukung upaya peningkatan produksi pertanian sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Pusat Penelitian Kelautan dan Perikanan, yakni dengan adanya kawasan riset tentang potensi kelautan dan perikanan. Hal ini sangat mendasar karena wilayah Kabupaten Maros sebagai daerah pesisir dengan kontribusi pada sektor perikanan di Sulawesi Selatan cukup besar, terutama dalam memenuhi kebutuhan wilayah Kota Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan.



Disamping itu, kegiatan perikanan yang diusahakan dan dikembangkan oleh masyarakat Kabupaten Maros adalah perikanan budidaya air payau yang mencapai luas tambak 9.581,50 Ha.

4. Militer, yaitu wilayah Kabupaten Maros merupakan wilayah yang dijadikan sebagai Pusat Pelatihan dan Pendidikan TNI-AD, yaitu dengan adanya kawasan pelatihan dan pendidikan Kostrad TNI-AD. Lokasi kegiatan ini berlokasi pada dua kecamatan, yakni Sambueja Kecamatan Bantimurung dan Kariango Kecamatan Tanralili. Disamping itu, Kecamatan Mandai juga di jadikan sebagai pangkalan udara TNI Angkatan Udara yang berlokasi di Bandar Udara Sultan Hasanuddin.
5. Pusat Kegiatan Keagamaan, yakni suatu kegiatan yang dilakukan oleh jamaah Halwatiah Sammang. Pada setiap hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, jamaah Halwatiah Sammang bersatu melakukan sikir akbar yang berlokasi di Patte'ne Kecamatan Marusu. Asal jamaah Halwatiah Sammang tersebut telah tersebar diseluruh nusantara, bahkan ada yang berasal dari Malaysia.
6. Bagian Wilayah Pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata, yaitu suatu kebijakan pengembangan wilayah yang pertama di KTI, dimana sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan tersebut. Wilayah Kecamatan yang masuk dalam pengembangan ini adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa. Dari luas wilayah pengembangan Kawasan Mamminasata sebesar 2.462 Km², wilayah Kabupaten Maros yang menjadi bagian kawasan pengembangan tersebut adalah 1.039 Km² atau 42,20%. Hal ini tentunya sangat memberi manfaat bagi wilayah Kabupaten Maros ditinjau dari segi penyediaan dan pembangunan infrastruktur, penyediaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, PAD dan lain sebagainya.



a. Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Maros

Wilayah Kabupaten Maros pada mulanya adalah suatu wilayah kerajaan yang dikenal sebagai Kerajaan Marusu yang kemudian bernama Kabupaten Maros sampai saat ini. Selain nama Maros, masih terdapat nama lain daerah ini, yakni Marusu dan/atau Buttasalewangan. Ketiga nama tersebut oleh sebagian masyarakat Kabupaten Maros sangat melekat dan menjadikan sebagai lambang kebanggaan tersendiri dalam mengisi pembangunan daerah.

Berdasarkan data-data yang diperoleh, yang memuat sejarah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros pada awalnya adalah sebuah wilayah kerajaan yang dipengaruhi oleh dua kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Bone dan Kerajaan Gowa, yang mana pada waktu itu, Maros memiliki nilai strategis yang sangat potensial. Kabupaten Maros dari dulu hingga saat ini dihuni oleh dua suku, yakni Suku Bugis dan Suku Makassar.

Pada masa kemerdekaan, yakni tujuh tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 oleh pemerintah Republik Indonesia dikeluarkan peraturan No. 34 1952 juncto PP. No. 2/1952 tentang pembentukan Afdelling Makassar yang di dalamnya tercakup Maros sebagai sebuah Onderafdeling dengan 16 buah distrik, masing-masing :

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Distrik Turikale | Dipimpin oleh Karaeng |
| 2. Distrik Marusu | Dipimpin oleh Karaeng |
| 3. Distrik Simbang | Dipimpin oleh Karaeng |
| 4. Distrik Bontoa | Dipimpin oleh Karaeng |
| 5. Distrik Lau' | Dipimpin oleh Karaeng |
| 6. Distrik Tanralili | Dipimpin oleh Karaeng |
| 7. Distrik Sudiang | Dipimpin oleh Gelarang |
| 8. Distrik Moncongloe | Dipimpin oleh Gelarang |



- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 9. Distrik Bira | Dipimpin oleh Gelarang |
| 10. Distrik Biringkanaya | Dipimpin oleh Gelarang |
| 11. Distrik Mallawa | Dipimpin oleh Arung |
| 12. Distrik Camba | Dipimpin oleh Arung |
| 13. Distrik Cendrana | Dipimpin oleh Arung |
| 14. Distrik Laiya | Dipimpin oleh Arung |
| 15. Distrik Wanua Waru | Dipimpin oleh Arung |
| 16. Distrik Gantarang
Matinggi | Dipimpin oleh Arung |

Keenam belas distrik di atas merupakan pusat-pusat pemerintahan di Kabupaten Maros pada masa lampau yang kemudian berkembang seiring dengan kemajuan pembangunan secara lokal maupun regional, maka sebagian wilayah Kabupaten Maros terintegrasi ke wilayah administrasi Kotamadya Ujung pandang (Ujung pandang berubah nama menjadi Kota Makassar). Adapun wilayah distrik Kabupaten Maros tersebut yang terintegrasi di wilayah administrasi Kota Makassar tersebut adalah Distrik Bira, Suding dan Biringkanaya. Pelepasan wilayah Bira, Sudiang dan Biringkanaya tersebut dari wilayah Kabupaten Maros terjadi pada tahun 70-an.

Wilayah Kabupaten Maros dalam sejarahnya telah mengalami pemekaran wilayah. Pada tahun 1963, Kabupaten Maros terbagi atas 4 (empat) kecamatan, yakni Kecamatan Maros Baru, Bantimurung, Mandai, dan Camba. Memasuki tahun 1989, diadakan pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 (tiga) kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Perwakilan Tanralili, Maros Utara, dan Mallawa, yang hingga saat ini saat ini terdapat 14 wilayah kecamatan. Masing-masing wilayah kecamatan tersebut memiliki potensi tersendiri dalam menunjang pembangunan wilayah. Disamping itu, Kabupaten Maros memiliki peranan yang sangat berarti dalam pembangunan Kota Makassar sebagai ibukota provinsi dan sekaligus sebagai pusat pengembangan wilayah Kawasan



Timur Indonesia (KTI). Peluang inilah membawa pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Maros, terutama wilayah-wilayah yang berbatasan dengan Kota Makassar. Sedangkan rencana pembangunan wilayah secara eksternal, sebagian wilayah Kabupaten Maros masuk dalam pengembangan Kawasan Mamminasata sebagai kawasan kota metropolitan.

Setelah menjalani titian sejarah selama lima abad dimulai dengan berdirinya Kerajaan Marusu pada awal abad XV yang selanjutnya terjadi kehidupan yang berdinamika bagi setiap kerajaan mulai dari sistem Monarki menjadi daerah Regentschap kemudian menjadi daerah Adat Gemeenschap sampai dekade terakhir menjadi distrik, maka dalam sebuah masa peralihan antara fase pemerintahan klasik/tradisional dengan pemerintahan konstitusional lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1959 (14 tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945). Maros kemudian berdiri sendiri menjadi Daerah Tingkat II Maros berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).

b. Data Geografis Kabupaten Maros

1. Batas Administratif

Secara geografis, kabupaten Maros terletak antara $40^{\circ} 45'$ - $50^{\circ} 07'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 205'$ - $129^{\circ} 12'$ Bujur Timur yang berbatasan dengan:

Di sebelah Utara : Dengan Kabupaten Pangkep;
Di sebelah Timur : Dengan Kabupaten Bone;
Di sebelah Tenggara : Dengan Kabupaten Gowa;
Di sebelah Selatan : Dengan Kota Makassar;
Di sebelah Barat : Dengan Selat Makassar.

Jika dilihat dari posisinya terhadap Kota Makassar sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki posisi yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Karena posisinya tersebut, Kabupaten Maros termasuk dalam bagian wilayah



pengembangan konsep kota terpadu Metropolitan Mamminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar). Wilayah kecamatan yang termasuk dalam pengembangan ini adalah kecamatan Mandai, Moncongloe, Tompobulu, Bantimurung, Marusu, Turikale, Tanralili, Lau, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Bontoa.

2. Topografi

Topografi Kabupaten Maros sangat bervariasi, mulai dari wilayah datar sampai wilayah pegunungan. Luas daerah kondisi datar sekitar 70.882 Ha atau 43,80% dari luas Kabupaten Maros. Sedangkan, daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40% atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 Ha atau sebesar 30,80% dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Ketinggian wilayah Kabupaten Maros berkisar antara 0 sampai 881 meter di atas permukaan laut. Daerah tertinggi di atas 700 meter terdapat pada kecamatan Camba dan Mallawa, sedangkan daerah terendah terdapat pada kecamatan Maros Baru, Marusu, Turikale, dan Bontoa.

Jenis air permukaan berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai, yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Boringkaluku, Batu Pute, Matturunge, Marana, Campaya, Pattumanagasae, Bontotenga dan Tanralili.

Iklim Kabupaten Maros termasuk iklim tropis basah, dengan curah hujan rata-rata sekitar 395 mm setiap bulannya dengan jumlah hari hujan berkisar 148 hari Interval suhu udara antara 23,4⁰C sampai 33,3⁰C, dengan kelembaban rata-rata 75,55%. Adapun kecepatan angin antara 2 knot sampai dengan 10 knot.

c. Jumlah Penduduk

Hingga akhir tahun 2022, jumlah penduduk Kabupaten Maros tercatat sebanyak 391.489 jiwa yang terdiri dari laki-laki 195.360 jiwa, perempuan 196.129 jiwa dan tersebar di 14 Kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 50.540 jiwa yang terdapat pada Kecamatan Mandai. Adapun kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Mallawa dengan jumlah penduduk 12.688 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Maros pada tahun 2022 telah



mencapai **2,42** jiwa per km². Kecamatan Turikale adalah Kecamatan terpadat dengan tingkat kepadatan yang sudah mencapai 1.611 jiwa per km², sedangkan Kecamatan yang tingkat kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Mallawa yaitu 54 jiwa per km².

Adapun Jumlah Penduduk berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Maros untuk Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Maros
Tahun 2022**

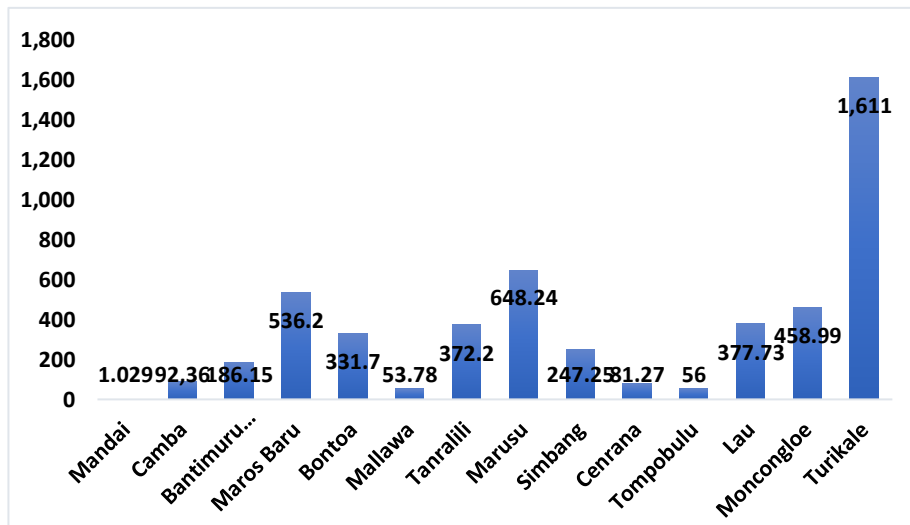
No.	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)			Luas Wilayah (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (Jiwa/Km ²)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7
1	Mandai	25.262	25,278	50,540	49.11	1,029.12
2	Camba	6,532	6,894	13,426	145.36	92.36
3	Bantimurung	15,968	16,366	32,334	173.70	186.15
4	Maros Baru	14,548	14,278	28,826	53.76	536.20
5	Bontoa	15,380	15,641	31,021	93.52	331.70
6	Mallawa	6,282	6,406	12,688	235.92	53.78
7	Tanralili	16,803	16,546	33,349	89.45	372.82
8	Marusu	17,386	17,444	34,830	53.73	648.24
9	Simbang	13,049	12,989	26,038	105.31	247.25
10	Cenrana	7,254	7,454	14,708	180.97	81.27
11	Tompobulu	8,195	7,915	16,110	287.66	56.00
12	Lau	13,866	14,022	27,888	73.83	377.73
13	Moncongloe	10,853	10,660	21,513	46.87	458.99
14	Turikale	23,982	24,236	48,218	29.93	1,611.03
JUMLAH		195.360	196.129	391.489	1.619,12	6.082,66

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Untuk melihat perbandingan tingkat kepadatan penduduk pada tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Maros dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Tingkat Kepadatan Penduduk Tiap Kecamatan Di Kabupaten Maros Tahun 2022



Jumlah Kepala Keluarga Menurut Kecamatan Tahun 2022

No.	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	KETERANGAN
1	Mandai	14.564	
2	Camba	4.7819	
3	Bantimurung	9.825	
4	Maros Baru	8.322	
5	Bontoa	9.000	
6	Mallawa	4.232	
7	Tanralili	9.849	
8	Marusu	10.016	
9	Simbang	7.896	
10	Cenrana	4.662	
11	Tompobulu	4.746	
12	Lau	8.061	
13	Moncongloe	5.920	
14	Turikale	13.642	
TOTAL		115.554	

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

**Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Maros Tahun 2018 – 2022**

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021	2022
0 – 4	35.196	34.057	27.791	31.961	32.907
5 – 9	33.114	37.249	37.589	37.532	37.961
10 – 14	32.056	36.225	36.955	35.693	36.854
15 – 19	32.665	37.175	29.233	34.697	31.227
20 – 24	31.990	32.965	34.291	34.239	34.135
25 – 29	27.980	31.780	32.473	32.598	32.351
30 – 34	25.573	30.520	30.953	30.757	30.974
35 – 39	25.163	28.028	28.418	28.631	28.684
40 – 44	24.056	25.829	26.372	26.295	26.371
45 – 49	21.408	25.378	24.835	24.850	24.424
50 – 54	17.678	20.621	22.337	22.244	23.264
55 – 59	14.056	15.650	16.049	15.971	17.022
60 – 64	10.006	10.827	12.854	12.467	13.095
65 – 69	7.531	7.544	8.205	8.095	8.723
70 – 74	5.439	4.960	5.761	5.446	5.794
75+	5.911	5.875	6.319	7.262	7.703
Jumlah	349.822	384.682	388.330	388.738	391.489

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2022

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk tahun 2022 dengan kelompok umur, jumlah tertinggi pada kelompok umur 5-9 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 37.961 orang atau 9,69 % dari total jumlah penduduk, posisi kedua pada kelompok umur 10-14 tahun dengan persentase penduduk sebesar 9,41 % atau 36.854 orang, kemudian diikuti oleh kelompok umur 20-24 tahun dengan jumlah penduduk 34.135 orang atau 8,81 % dari total jumlah penduduk.

Jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) di Kabupaten Maros tahun 2022 sebanyak 283.767 orang. Dari seluruh penduduk usia kerja tersebut, jumlah penduduk usia 15-64 tahun mencapai 261.547 orang atau 66,80% dari total jumlah penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga kerja produktif di Kabupaten Maros cukup memadai.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Maros terdiri dari 14 kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 1.619,12 km². Berdasarkan



data yang ada, diketahui kecamatan terluas adalah kecamatan Tompobulu dengan luas 287,66 km² atau 17,77 % dari luas Kabupaten Maros. Adapun Kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Turikale dengan luas 29,93 km² atau hanya 1,85 % dari luas wilayah Kabupaten Maros.

Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH		LUAS (Km ²)
		DESA	KELURAHAN	
1	Mandai	4	2	49,11
2	Moncongloe	5	0	46,87
3	Maros Baru	4	3	53,76
4	Lau	2	4	53,73
5	Turikale	0	7	29,93
6	Marusu	7	0	73,83
7	Bontoa	8	1	93,52
8	Bantimurung	6	2	173,70
9	Simbang	6	0	105,30
10	Tanralili	7	1	89,45
11	Tompobulu	8	0	287,66
12	Camba	6	2	145,36
13	Cenrana	7	0	180,97
14	Mallawa	10	1	235,92
Total		80	23	1.619.12

Sumber data: Kabupaten Maros Dalam Angka Tahun 2022

Adapun untuk mengetahui jumlah bangunan rumah (tempat tinggal) di Kabupaten Maros menurut kecamatan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Jumlah Bangunan Rumah Layak dan Tidak Layak Huni
Menurut Kecamatan Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH (UNIT)		TOTAL RUMAH (UNIT)
		LAYAK HUNI	TIDAK LAYAK HUNI	
1	Turikale	11.748	1.810	13.558
2	Maros Baru	3.812	2.706	6.518
3	Mandai	4.950	1.919	6.884
4	Moncongloe	3.808	1.122	6.869
5	Camba	1.318	1.426	2.744
6	Cenrana	1.535	2.096	3.631
7	Bantimurung	2.518	2.435	4.953
8	Simbang	2.490	2.767	5.257
9	Marusu	4.866	1.783	6.649
10	Lau	3.236	2.435	5.689
11	Bontoa	2.604	3.151	5.755
12	Tanralili	3.466	2.331	5.797
13	Tompobulu	2.000	2.435	4.465
14	Mallawa	1.573	1.595	3.168
JUMLAH		49.924	30.011	79.935

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2022

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah bangunan terbanyak terdapat pada Kecamatan Turikale dengan jumlah 13.558 unit rumah tempat tinggal, dimana 11.748 unit rumah diantaranya layak huni dan 1.810 unit rumah tergolong tidak layak huni. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di kecamatan Turikale adalah karena letaknya berada diibukota Kabupaten sehingga dipandang cukup strategis dan menguntungkan bila bermukim di Turikale karena kantor-kantor Pemerintahan di Kabupaten Maros sebagian besar berada di Kecamatan ini. Selain itu, umumnya kegiatan perekonomian berpusat di wilayah ini.

Adapun kecamatan lain dengan jumlah rumah tempat tinggal yang cukup besar adalah kecamatan Mandai dengan 6.884 unit rumah. Salah satu hal yang mempengaruhi banyaknya jumlah rumah tempat tinggal di Kecamatan Mandai



adalah karena letaknya yang merupakan kecamatan dekat dengan kota Makassar yang dilalui secara langsung oleh jalan provinsi sehingga banyak masyarakat yang bekerja di Makassar memilih bertempat tinggal di kecamatan ini.

Kabupaten Maros merupakan kabupaten yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah sehingga dengan curah hujan dan tingkat penyinaran sinar matahari yang cukup menjadikan wilayah Kabupaten Maros sangat potensial untuk kegiatan pada 13 sektor-sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

Produksi padi keseluruhan di kabupaten Maros tahun 2022 sebesar **237.535,84** ton yang dipanen dari areal seluas **42,389** Ha atau rata-rata **56,04** Kwintal/Ha. Selain padi, potensi unggulan lain di Kabupaten Maros adalah jagung dengan luas panen sekitar 10.531 Ha dan jumlah produksi sebesar 63.186 ton, kacang kedelai dengan produksi sebesar 277 ton dari luas panen 154 Ha, kacang tanah dengan produksi 1.834 ton dari luas panen 902 Ha, ubi kayu dengan produksi sebesar 15.642 ton dari luas panen 707 Ha, dan ubi jalar dengan luas panen 57 Ha yang mampu menghasilkan produksi sebesar 402 ton. Produksi bawang merah sebesar 2,5 ton cabe rawit dengan jumlah produksi 105 ton, cabe merah dengan produksi sebesar 464 ton. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya, populasi ternak terbesar di Kabupaten Maros adalah sapi potong dengan populasi mencapai 75.282 ekor. Selain sapi potong ternak lain yang memiliki populasi cukup besar adalah kambing dengan populasi 58.115 ekor, kuda dengan populasi 9.246 ekor dan kerbau dengan populasi 4.360 ekor. Selain itu produksi telur untuk ternak dengan jenis unggas adalah ayam buras dengan jumlah 1.438.419 Kg, ayam ras petelur dengan jumlah 12.122.344 Kg dan itik dengan jumlah 3.147.620 Kg.

Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Maros merupakan kontribusi dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Maros Baru, Marusu, Lau, dan Kecamatan Bontoa dengan produksi sebesar 20.233,6 ton dan perikanan budidaya dengan produksi sebesar 28.409,8 ton. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Maros berjumlah 1 TPI yaitu TPI Labuang berlokasi di Kelurahan Pettuadae Kecamatan Turikale. Selain itu Pemerintah Kabupaten



Maros juga memberikan Bantuan Hibah Barang kepada masyarakat berupa Bibit Unggul kepada kelompok Pembudidaya ikan yang tersebar di beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Maros yang terdiri dari 20 Kelompok Pembudidaya ikan dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan bibit ikan nila sebanyak 15.000 ekor. Dari APBD sebanyak 118.750 ekor bibit unggul ikan nila untuk 9 Kelompok Pembudidaya ikan.

Potensi sumberdaya alam (SDA) unggulan kabupaten Maros lainnya adalah potensi wisata alam Kabupaten Maros merupakan salah satu kabupaten yang menjadi tempat tujuan wisata di Sulawesi Selatan. Lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi oleh para wisatawan adalah air terjun Bantimurung, kolam renang Bantimurung, dan Taman Pra Sejarah Leang-Leang. Selain ketiga lokasi wisata tersebut, masih banyak lagi lokasi wisata lainnya, namun secara umum potensi-potensi wisata alam tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Adapun potensi wisata alam lain yang belum dimaksimalkan adalah taman wisata alam Pattunuang, cagar alam Karaenta, air terjun Bonto Somba, taman safari Pucak, sungai Pute, dan permandian air panas Reatoa.

Kawasan permandian alam Bantimurung. Terletak di lembah bukit kapur dengan jarak tempuh kurang lebih 12 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Lokasi ini mudah dicapai karena kendaraan umum dari dan ke lokasi selalu tersedia. Dengan kondisi alam tropis yang subur menjadikan daerah ini sebagai pemukiman ideal dari berbagai jenis kupu-kupu dimana saat ini tercatat sekitar 150 jenis yang di daerah lain sudah amat sulit ditemui. Goa mimpi merupakan goa terletak di dalam kawasan permandian alam Bantimurung. Di dalam goa ini terdapat stalaktit yang mempunyai kumpulan kristal yang indah.

Taman wisata alam Pattunuang (Biseang Labboro'). Di kawasan ini selain terdapat stalaktik yang indah juga terdapat beberapa jenis flora dan fauna yang dilindungi. Serta menawarkan panorama alam pegunungan yang menawan. Untuk menuju lokasi ini hanya ditempuh jarak kurang lebih 18 km dari Ibukota Kabupaten Maros.

Cagar alam Karaenta. Merupakan salah satu cagar alam nasional dan kawasan hutan yang dilindungi karena disamping dapat mempertahankan kelestarian cadangan air di bawah tanah juga merupakan habitat bagi berbagai



jenis flora dan fauna sebagai sumber daya hayati serta aset lingkungan hidup nasional. Dalam kawasan ini terdapat beberapa goa, salah satu diantaranya adalah Goa Salikang Kallang. Selain itu, terdapat sungai yang indah membelah gunung sampai ke Danau Toakala. Di kawasan ini terdapat pula kera jenis Maccala Maura yang sudah langka.

Air terjun Bonto Somba Terletak di desa Bonto Somba Kecamatan Tanralili. Untuk menuju ke lokasi tersebut ditempuh dengan jarak kurang lebih 25 km arah dari ibukota Kabupaten Maros atau sekitar 55 km dari Kota Makassar. Air Terjun Bonto Somba telah dipersiapkan sebagai kawasan objek wisata yang diharapkan akan setara dengan objek wisata alam Bantimurung sehingga dapat memberi nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Maros, khususnya masyarakat desa Bonto Somba.

Taman safari Pucak. Terletak di Desa Pucak Kecamatan Tanralili. Perjalanan menuju lokasi ini ditempuh dengan jarak kurang lebih 20 km dari Ibukota Kabupaten Maros dan sekitar 50 km dari Kota Makassar. Dengan luas areal 150 Ha yang dipersiapkan sebagai lokasi kebun binatang terbesar di Kawasan Timur Indonesia.

Sungai Pute (Batu Napara). Terletak di Desa Salenrang Kecamatan Maros Utara dengan jarak sekitar 5 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Dengan air yang jernih dan latar belakang jejeran pegunungan yang indah, ditambah pohon bakau dan nipa yang hijau sepanjang sungai menjadikan lokasi ini sangat potensial untuk menjadi tempat transit bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah-daerah, utamanya wisatawan mancanegara.

Permandian air panas Reatoa. Terletak di Dusun Rea Toa Kecamatan Mallawa dengan jarak tempuh menuju lokasi sekitar 60 km dari Ibukota Kabupaten Maros. Kawasan objek wisata ini memiliki potensi besar sehingga perlu untuk segera dikembangkan.

Taman prasejarah Leang-Leang. Terletak pada deretan bukit kapur yang curam di Kelurahan Kallabirang Kecamatan Bantimurung dengan jarak tempuh sekitar 17 km dari Ibukota Kabupaten Maros dengan luas kawasan 5.498 m². Para arkeolog berpendapat bahwa beberapa goa yang terdapat disana telah dihuni sekitar 8000-3000 tahun sebelum masehi. Selain itu di Kabupaten Maros



banyak juga terdapat situs, benda dan kawasan cagar budaya yang bisa dijadikan tujuan wisata.

Daftar Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

No	NAMA OBYEK	KATEGORI	LOKASI
1	Jarie	Situs	Kecamatan Simbang
2	Tampuang	Situs	Kecamatan Simbang
3	Saripa	Situs	Kecamatan Simbang
4	Karrasa	Situs	Kecamatan Simbang
5	Kado	Situs	Kecamatan Simbang
6	Burung 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
7	Burung 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
8	Pangie	Situs	Kecamatan Bantimurung
9	Sampeang	Situs	Kecamatan Bantimurung
10	Ulu Leang	Situs	Kecamatan Bantimurung
11	Ambe Paco	Situs	Kecamatan Bantimurung
12	Elle Pusae	Situs	Kecamatan Bantimurung
13	Bettue	Situs	Kecamatan Bantimurung
14	Uluwae	Situs	Kecamatan Bantimurung
15	Pajae	Situs	Kecamatan Bantimurung
16	Pettae	Situs	Kecamatan Bantimurung
17	Pettakere	Situs	Kecamatan Bantimurung
18	Tinggi Ada	Situs	Kecamatan Bantimurung
19	Baratedong 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
20	Baratedong 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
21	Alla Birang	Situs	Kecamatan Bantimurung
22	Pallenge	Situs	Kecamatan Bantimurung
23	Bara Jarang	Situs	Kecamatan Bantimurung
24	Pabbuno Juku	Situs	Kecamatan Bantimurung
25	Lompoa	Situs	Kecamatan Bantimurung
26	Bembe	Situs	Kecamatan Bantimurung
27	Timpuseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
28	Batu Karope	Situs	Kecamatan Bantimurung
29	Bulu Tungke'e	Situs	Kecamatan Bantimurung
30	Barugayya	Situs	Kecamatan Bantimurung
31	Pa'limukang	Situs	Kecamatan Bantimurung
32	Tanre	Situs	Kecamatan Bantimurung
33	Balang	Situs	Kecamatan Bantimurung
34	Jing	Situs	Kecamatan Bantimurung
35	Sengkae	Situs	Kecamatan Bantimurung
36	Bata-battae	Situs	Kecamatan Bantimurung
37	Pacce-pacce	Situs	Kecamatan Bantimurung
38	Bulu Buttue	Situs	Kecamatan Bantimurung
39	Boddong	Situs	Kecamatan Bantimurung
40	Canggoreng	Situs	Kecamatan Bantimurung
41	Samongkeng 1	Situs	Kecamatan Bantimurung



42	Samongkeng 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
43	Samongkeng 3	Situs	Kecamatan Bantimurung
44	Samongkeng 4	Situs	Kecamatan Bantimurung
45	Lambatorang	Situs	Kecamatan Bantimurung
46	Pucu	Situs	Kecamatan Bantimurung
47	Wanue	Situs	Kecamatan Bantimurung
48	Tenggae	Situs	Kecamatan Bantimurung
49	Bulu Kamase	Situs	Kecamatan Bantimurung
50	Panampu 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
51	Panampu 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
52	Bungaeja 1	Situs	Kecamatan Bantimurung
53	Bungaeja 2	Situs	Kecamatan Bantimurung
54	Maddauseng	Situs	Kecamatan Bantimurung
55	Botto	Situs	Kecamatan Bantimurung
56	Batu Tianang	Situs	Kecamatan Bontoa
57	Karama/Akkrasa	Situs	Kecamatan Bontoa
58	Pasaung		Kecamatan Bontoa
59	Sipong 1		Kecamatan Bontoa
60	Sipong 2		Kecamatan Bontoa
61	Sipong 3		Kecamatan Bontoa
62	Monroe		Kecamatan Bontoa
63	Cempae		Kecamatan Bontoa
64	Wajan Raksasa		Kecamatan Turikale
65	Beduk tertua		Kecamatan Turikale
66	Pedang V.O.C		Kecamatan Turikale
67	Kerangka Manusia Leang		Kecamatan Simbang
68	Bendungan Batu Bassi		Kecamatan Simbang
69	Gudang mesiu		Kecamatan Simbang
70	Prasasti Jepang		Kecamatan Simbang
71	Bunker Jepang		Kecamatan Mandai
72	Makam La Makkulau Arung		Kecamatan Bantimurung
73	Makam Arung Macege		Kecamatan Camba
74	Makam Karaeng Bontoa		Kecamatan Bontoa
75	Makam Kareang Lalang		Kecamatan Bontoa
76	Makam Nahkoda		Kecamatan Bontoa
77	Balla Lompoa		Kecamatan Turikale
78	Kantor Pengadilan Lama		Kecamatan Turikale
79	Kantor Kejaksaan Lama		Kecamatan Turikale
80	Rumah Sakit Lama		Kecamatan Turikale
81	Penjara Lama		Kecamatan Turikale
82	Rumah Kodok		Kecamatan Turikale
83	Kantor Pemerintah Belanda		Kecamatan Turikale

Sumber data :Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

Pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Maros telah berhasil menarik investor untuk berinvestasi dalam bidang pariwisata di Kabupaten Maros. Hal ini



ditandai dengan terbangunnya sebuah tempat wisata baru yang dikelola oleh swasta yaitu Maros Waterpark. Tempat wisata ini sangat mudah untuk dicapai karena jaraknya yang tidak jauh, hanya berjarak sekitar 1 km dari Taman Wisata Alam Bantimurung.

Perhelatan Akbar Tahunan sebagai Ajang Promosi Potensi dan Investasi unggulan bertajuk Apkasi Expo 2022 (AOE2022) yang sedianya akan digelar akhir tahun 2022 dibatalkan dengan alasan tidak adanya penganggaran terkait kegiatan tersebut .

Daftar Penyelenggaraan Expo

No	Nama Kegiatan	Jumlah	Ket.
1.	Pameran Apkasi Otonomi Expo 2022	-	Tidak dilaksanakan

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros bukan hanya wisatawan lokal melainkan dari Luar Negeri pun banyak yang berkunjung menikmati panorama alam Kabupaten Maros.

DAFTAR KUNJUNGAN WISATAWAN TAHUN 2018-2022

TAHUN	TARGET KUNJUNGAN	REALISASI KUNJUNGAN	PERSENTASE
2018	407.580	407.580	100%
2019	391.700	518.635	132%
2020	402.000	238.456	59,32%
2021	282.033	65.507	23,22%
2022	500.000	584.016	116,80%

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

JUMLAH PROMOSI EVENT DAERAH YANG TERLAKSANA DI DALAM NEGERI

No.	Nama Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pemilihan Duta Pemuda Demokrasi	1 (Satu) Kali	



2.	Pemilihan Duta Pelajar	1 (Satu) Kali	
3.	Zumba Dance Party	1 (Satu) Kali	
4.	Road Show UMKM Kreatif 14 Kecamatan	1 (Satu) Kali	
5.	Rammang-Rammang Tourism Exhibition Lomba Desain Landscape Spot Pariwisata	1 (Satu) Kali	
6.	Youth Demokrasi Festival	1 (Satu) Kali	
7.	Kejuaraan Enduro Competition Tingkat Provinsi Sulsel	1 (Satu) Kali	
8.	Maros Property Expo	1 (Satu) Kali	
9.	Festival Spirit Ramadhan II	1 (Satu) Kali	
10.	Job Fair Bursa Kerja	1 (Satu) Kali	
11.	Kotto Boko	1 (Satu) Kali	
12.	Bazar Musik	1 (Satu) Kali	
13.	Festival Beduk	1 (Satu) Kali	
14.	Festival Ramadhan	1 (Satu) Kali	
15.	Anugerah Desa Wisata	1 (Satu) Kali	
16.	Maros Youth Festival	1 (Satu) Kali	
17.	Bantimurung Keren	1 (Satu) Kali	
18.	Maros-Pangkep Orienteering Competition	1 (Satu) Kali	
19.	Ma'seli Geopark dan Celebes Explorer 2022	1 (Satu) Kali	
20.	Kejuaraan Futsal	1 (Satu) Kali	
21.	Pemilihan Duta Wisata Dara & Daeng	1 (Satu) Kali	
22.	Kejuaraan Bulutangkis	1 (Satu) Kali	
23.	Fun Bike Geopark	1 (Satu) Kali	
24.	Maros-Pangkep Geopark Run 2022	1 (Satu) Kali	
25.	Trail Wisata Adventure	1 (Satu) Kali	
26.	Adventure Wisata Off Road dan Speed Off Road Piala Bupati	1 (Satu) Kali	
27.	Tomtrack Hard Enduro	1 (Satu) Kali	



28.	Camara Jip Adventure OffRoad	1 (Satu) Kali	
29.	Kirab Budaya Mannapu Ase	1 (Satu) Kali	
30.	Lomba Mural	1 (Satu) Kali	
31.	Temu Literasi	1 (Satu) Kali	
32.	Kejuaraan Sepak Bola (Bupati Cup)	1 (Satu) Kali	
33.	Pesta Rakyat Geopark Maros-Pangkep	1 (Satu) Kali	
34.	Festival Seni Budaya	1 (Satu) Kali	
35.	Tudang Sipulung Kebudayaan	1 (Satu) Kali	
36.	Bulan Merdeka	1 (Satu) Kali	
37.	Appalili	1 (Satu) Kali	
38.	Maulid Adat	1 (Satu) Kali	
39.	Jambore Geopark Maros-Pangkep	1 (Satu) Kali	
40.	Lomba Apresiasi Alat Musik Tradisional Koleksi Museum	1 (Satu) Kali	
41.	Pameran Temporer	1 (Satu) Kali	
42.	Festival Film Koleksi Museum	1 (Satu) Kali	
43.	Kejuaraan Renang	1 (Satu) Kali	
44.	Tourism Explorer For Studen	1 (Satu) Kali	
45.	Rakornas Geopark Indonesia	1 (Satu) Kali	
46.	Gerakan Sulsel anti Mager	1 (Satu) Kali	
47.	Fun Run Hari Kesehatan Nasional	1 (Satu) Kali	
48.	Lomba Desain Kreasi Baju Adat 2022	1 (Satu) Kali	
49.	Turnamen Sepak Bola Waspada 2022	1 (Satu) Kali	
50.	Asosiasi Futsal Kab. Maros	1 (Satu) Kali	
51.	Liga Santri 2022	1 (Satu) Kali	
52.	Trail, Why, Trail Run 2022	1 (Satu) Kali	
53.	Forkopimda Trail Maros 2022	1 (Satu) Kali	
54.	Lomba Dayung	1 (Satu) Kali	



55.	Event Enduro Competition 2022	1 (Satu) Kali	
56.	Sepak Takraw Butta Salewangang Cup 2022	1 (Satu) Kali	
57.	Pacuan Kuda Tradisional Tukamasea	1 (Satu) Kali	
58.	Gaba Race 2022	1 (Satu) Kali	
59.	Pacuan Kuda Tradisional Tanadidi	1 (Satu) Kali	
60.	Drag Race Competition Kejurda	1 (Satu) Kali	
61.	Pemilihan Duta Genre 2022	1 (Satu) Kali	
62.	Pemilihan Duta Anti Narkoba 2022	1 (Satu) Kali	
63.	Pemilihan Dara Daeng Cilik	1 (Satu) Kali	
64.	Pelantikan Dewan Adat/Pengukuhan Srikandi	1 (Satu) Kali	
65.	Kejuaraan Berkuda Exebition	1 (Satu) Kali	
66.	Launchig Kalender Event	1 (Satu) Kali	
67.	Jumpa Bakti Gembira PMR 2022	1 (Satu) Kali	
68.	Turnamen Sepak Bola Alatengae Cup	1 (Satu) Kali	
69.	Turnamen Sepak Bola Mini Simbang Cup	1 (Satu) Kali	
70.	Turnamen Sepak Bola Labuaja	1 (Satu) Kali	

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022

JUMLAH LOKASI YANG MEMPEROLEH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBINAAN KEMITRAAN USAHA MASYARAKAT

No.	Uraian	Jumlah Yang Terlibat	Keterangan
1.	Kawasan Wisata Kuliner PTB	108	Pedagang
2.	Kawasan Wisata Alam Bantimurung	37	Pedagang
3.	Gedung Pusat Oleh-oleh Maros (Balla' Mabalanca)	26	UMKM
JUMLAH		171	

Sumber data : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, 2022



Berkat kreatifitas dan ide cemerlang dari Pemerintah Kabupaten Maros, pada tahun 2012 Kabupaten Maros memiliki sebuah ikon baru yaitu Pusat Kuliner Maros. Pusat kuliner ini terletak tepat di pusat kabupaten Maros dan merupakan hasil dari penataan pedagang kaki lima yang dilakukan secara kekeluargaan dan hingga saat ini Pusat kuliner Maros terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan karena adanya inovasi-inovasi kreatif dari Kepala Daerah untuk menghadirkan suatu kawasan yang bisa mendorong pertumbuhan perekonomian bagi MasyarakatSosiat Kabupaten Maros.

Potensi kehutanan di Kabupaten Maros dapat dilihat dari Jenis hasil hutan yang terproduksi tiap tahunnya, seperti kayu jati, kayu bakar dan bambu mengalami yang pertumbuhan tiap tahunnya. Ketiga jenis hasil hutan ini memiliki keterkaitan langsung dengan orientasi usaha yang berkembang di Kabupaten Maros maupun daerah sekitarnya, terutama Kota Makassar. Kayu Jati merupakan bahan baku bagi industri furniture, kayu bakar memenuhi kebutuhan kegiatan masak, baik oleh penduduk maupun usaha-usaha lainnya, dan untuk bambu dipergunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk kegiatan bangunan yang banyak dilaksanakan. Selain itu juga Kabupaten Maros memiliki potensi Tegakan Pinus yang terdapat di 4 kecamatan yakni, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa.

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.



Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2022, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan dari masing-masing urusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2022**

SKPD KABUPATEN	NAMA	JUMLAH PERSONIL (PNS)
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah Kabupaten Maros	183
Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD Kabupaten Maros	58
Inspektorat	Inspektorat Kabupaten Maros	77
Dinas Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.912
	Dinas Kesehatan	866
	Dinas Sosial	51
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	54
	Dinas Komunikasi dan Informatika	56
	Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perhubungan dan Pertanahan	162
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	99
	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan	62
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	205
	Dinas Perikanan	64
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	55
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian	74



SKPD KABUPATEN	NAMA	JUMLAH PERSONIL (PNS)
	Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan	84
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	51
Rumah Sakit Daerah	RSU La Palaloi	360
Kecamatan	Kecamatan Mallawa	26
	Kecamatan Cenrana	26
	Kecamatan Camba	22
	Kecamatan Simbang	29
	Kecamatan Bantimurung	24
	Kecamatan Turikale	22
	Kecamatan Maros Baru	26
	Kecamatan Lau	27
	Kecamatan Bontoa	25
	Kecamatan Mandai	29
	Kecamatan Marusu	29
	Kecamatan Moncongloe	27
	Kecamatan Tanralili	31
	Kecamatan Tompobulu	30
Lembaga Teknis Lainnya	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	52
	Badan Kesbang dan Politik	30
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59
	Badan Keuangan dan Asset Daerah	60
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	38
	Badan Pendapatan Daerah	58
	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	103
TOTAL		6.614

Sumber data : Data BKPSDM Kab. Maros dan Data Kepegawaian OPD terkait, 2022



Adapun pencapaian-pencapaian Pemerintah Kabupaten Maros yang diperoleh dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022 berupa prestasi / penghargaan yang telah diterima adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada RSUD Salewangan Kab. Maros, sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori baik dengan catatan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018;
2. Diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas peran Aktif dan kepeduliannya terhadap Perlindungan Pegawai Pemerintah bukan Aparatur Sipil Negara dalam program jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 15 Oktober 2018;
3. Kabupten/Kota layak anak Kategori PRATAMA, dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Surabaya 23 Juli 2018;
4. National Recurement Award, kategori (UKBJ) sebagai pusat Keunggulan (Centre Of Excellence) pengadaan barang dan jasa dari LKPP Bandung 30 oktober 2018;
5. ADHITYA KARYA MAHATVA YODHA 2017 sebagai Pembina Umum terbaik Karang Taruna Kabupaten dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Denpasar Januari 2018;
6. Apresiasi dan perhatian terhadap Pendidikan Tinggi, Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Pelestarian Lingkungan di Kabupaten Maros dari Universitas Muslim Maros, 15 September 2018;
7. Tokoh Penggerak Program TPKAD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, atas Kinerja pasilitasi Akses KUR terbanyak melalui Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) di Sulawesi Selatan , dari Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua di Makassar, 20 Oktober 2018;
8. Dukungan Pelaksanaan Program JKN-KIS Kab. Maros tahun 2018, dari Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar di Makassar, Januari 2018;
9. Kepala Daerah Inovatif dari koran Sindo;
10. Peran aktif dan dukungan dalam menyukseskan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 dari



- Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia pada Tahun 2017 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 5 Desember 2018;
 12. Kabupaten yang memiliki komitmen dalam upaya mewujudkan kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 13. Opini Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemkab. Maros Tahun 2018;
 14. Piala Adipura nilai tertinggi Nasional dengan Kategori Kota Kecil, diserahkan Wakil Presiden RI, Yusuf Kalla di damping Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Siti Nurbaya Bakar, Jakarta 2019;
 15. Juara Peserta Inspiratif dalam Pameran APKASI Otonomi EXPO 2018 di BSD (City Tangerang 6-8 Juli 2018), diserahkan oleh Wakil Ketua Penyelenggara APKASI Otonomi EXPO 2018, Waluyo;
 16. Sebagai Kabupaten / Kota yang memiliki 100% Puskesmas Terakreditasi, Jakarta 28 November 2018;
 17. Penghargaan Menteri Dalam Negeri RI kepada Pemerintah Kabupaten Maros atas keterlibatan dan partisipasi aktif Aparatur Pemadam Kebakaran dalam membantu Penanggulangan Bencana dan Evakuasi korban pada bencana di Provinsi Sulawesi Selatan;
 18. Juara kreasi APKASI OTONOMI EXPO;
 19. Piagam penghargaan sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pelaksanaan JKN – KIS atas tercapainya Cakupan Semesta Kabupaten Maros tahun 2019;
 20. Penghargaan Kabupaten Layak Anak Kategori PRATAMA;
 21. BKN Award, Kategori Penilaian Tingkat Kabupaten / Kota Tipe B;
 22. APDESI Award;
 23. TPAKD sebagai Percepatan Akses Pembiayaan KUR melalui Data SIKP, Sebagai Penggerak Percepatan Akses Keuangan;



24. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Lima kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2014 s/d 2018;
25. Penghargaan Swasti Saba Wistara (Pengembangan) Penghargaan tertinggi Kab/Kota Sehat dengan cakupan Wilayah sebanyak 14 Kecamatan 103 Desa/Kelurahan;
26. Piagam penghargaan sebagai Kategori Humas Kab/Kota dengan Publikasi Media Internal terbaik pada Event Humas Sul – Sel Expo 2019;
27. Pelayanan Publik Terbaik 2019;
28. Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia;
29. Penghargaan Atas Prestasi dan Kinerja Pengolahan Sistem Informasi dan Program (SIKP) selama Periode 2019 se- Sulawesi Selatan;
30. ADIWIYATA MANDIRI 2019;
31. BANTIMURUNG BULUSARAUNG NATIONAL PARK;
32. Kabupaten yang melaksanakan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga dan sebagai Desa Percontohan Percepatan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
33. Pemenang Lomba Kelembagaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu Berprestasi.
34. Penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
35. Piagam penghargaan atas pelaksanaan pembelajaran tatap muka berbasis digital dalam era pandemi covid-19
36. Piagam penghargaan sebagai kabupaten penerima anugerah parahita ekapraya tahun 2020 kategori utama.
37. Penghargaan atas partisipasi dalam kegiatan "literacy camp" pada tanggal 27-28 agustus 2021
38. Piagam penghargaan terbaik 1 dalam pengelolaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) Prov. Sulawesi Selatan tahun 2020 pada tahun 2021
39. Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 pada tahun 2021.
40. Piagam penghargaan sebagai kabupaten layak anak peringkat PRATAMA tahun 2021.
41. Piagam Penghargaan pemerintah kabupaten dengan implementasi Qris dalam Rangka mendukung ekosistem Transaksi digital.



42. Keterbukaan Informasi badan publik tahun 2021 kategori pemerintah kabupaten/kota sebagai badan publik CUKUP INFORMATIF dalam Implementasi UU no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
43. Piagam Penghargaan atas dukungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pegawai non ASN pemerintah kabupaten Maros.
44. Penghargaan Penyelesaian Program Masterplan Kota Cerdas (Smart City) Tahun 2022.
45. Sebagai Provinsi dengan desa Wisata Terbanyak Pada Anugerah desa Wisata Indonesia 2022.
46. KPID Award 2022, sebagai kepala daerah peduli Penyiaran
47. Penghargaan FKPTPI (Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Indonesia) dalam kiprahnya Mendukung Percepatan Pembangunan Pertanian Daerah.
48. LPM Award 2022, Sebagai Kepala daerah Kontributif terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
49. Penghargaan tertinggi Nugra jasa Dharma Pustaloka kategori Pejabat Publik, atas dedikasi dan peran aktif terhadap pengembangan perpustakaan.
50. Terbaik III Nasional Komunitas Peduli Sungai (Komunitas Anak Sungai Rammang2 Sulawesi selatan BBWS Pompengan Jeneberang).
51. SMART CITY
52. Satya Lancana Dharma Aditya karya Mahatva Yodha, Atas Karya bakti dan pengabdian sosial yang telah dilakukan bersama2 dan berkolaborasi dengan karang taruna.
53. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik , Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kabupaten Maros sebagai Badan Publik Cukup Informatif.
54. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022
55. GenPI (Gerakan Pesona Indonesia) Pada Kegiatan Leader Talks- Digital Trasform & digital Innovation Four Tourism dalam Rangka rakornas Gerakan Pesona Indonesia 2022
56. PKH AWARD Kategori penghargaan bagi pemerintah Daerah Kab/ kota atas dukungan Alikasi Dana Sharing APBD II Tertinggi IV Untuk Pelaksanaan PKH Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022



57. Anugerah Meritokrasi, Penghargaan atas Keberhasilan Menerapkan sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara dengan Predikat BAIK
58. Penghargaan Piala ADIPURA Kategori Kota Kecil Tahun 2022 oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

Pemerintah Kabupaten Maros telah melaksanakan program dan kegiatan di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros sebesar Rp. 1.517.257.948.614,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.486.324.304.898,16 atau sebesar 97,96%. Adapaun rincian target dan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut :

f.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

f.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari: Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; serta Lain-lain PAD yang Sah. Target peningkatan PAD harus diikuti dengan analisis yang tepat terutama dampaknya terhadap kegiatan-kegiatan perekonomian pada masyarakat secara menyeluruh. Meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan keseluruhan dalam APBD masih tergolong sangat kecil. namun PAD masih merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dari waktu ke waktu masih sangat potensial untuk bisa mengalami peningkatan.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022, PAD dianggarkan sebesar Rp. 300.275.072.614 terealisasi sebesar Rp. 266.637.121.347,16 atau mencapai



88,80 % dari target yang ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	300.275.072.614	266.637.121.347,16	88,80
1	Pajak Daerah	162.109.148.158	156.161.828.082,63	96,33
2	Retribusi Daerah	17.835.000.000	13.232.642.645,50	74,19
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54
4	Lain-lain PAD yang Sah	109.843.303.960	86.383.339.482,38	78,64

Sumber : BPKAD, 2022

Dari keempat komponen PAD pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah yang capaiannya 100 persen sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melihat belum nencapaiannya target 100 persen realisasi PAD Kabupaten Maros tahun anggaran 2022, maka perlu adanya optimalisasi pemenuhan target pendapatan yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, diantaranya dengan menggali obyek potensial yang baru.

a. Pajak Daerah

Jenis Pajak Daerah yang direncanakan menjadi bagian PAD Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2022 meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral bukan Logam; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).



Penerimaan dari Pajak Daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 162.609.148.158,00 dan terealisasi sebesar Rp. 156.161.828.082,63 atau 96,33%. Pencapaian Pajak Daerah yang mencapai target tidak terlepas dari kondisi perekonomian yang berangsur baik pasca Pandemi COVID-19. Hal ini memicu semua sektor perekonomian mengalami peningkatan karena tidak adanya lagi pembatasan kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan perekonomian. Kondisi tersebut diatas juga dipicu oleh kerja maksimal yang dilakukan oleh Aparat Pemerintahan yang secara maksimal memanfaatkan kondisi yang ada untuk melaksanakan tugas dalam pengelolaan pajak daerah. Rincian anggaran dan realisasi hasil pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pendapatan Pajak Daerah	162.609.148.158	156.161.828.082,63	96,33
1	Pajak Hotel	2.000.000.000	2.870.273.000	143,51
2	Pajak Restoran	15.000.000.000	17.472.393.503,63	116,48
3	Pajak Hiburan	800.000.000	876.423.043,00	109,55
4	Pajak Reklame	1.300.000.000	1.310.903.617,00	100,84
5	Pajak Penerangan Jalan	31.000.000.000	31.846.602.165,00	102,73
6	Pajak Parkir	14.000.000.000	11.870.669.700	84,79
7	Pajak Air Tanah	800.000.000	789.792.080,00	98,72
8	Pajak Sarang Burung Walet	30.000.000	11.620.000	38,73
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.179.148.158	13.316.358.606	50,87
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.000.000.000	21.505.775.885,00	76,81
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	43.000.000.000	54.291.016.483,00	126,26

Sumber: BPKAD, 2022



Sebagian besar jenis pajak daerah yang direncanakan dapat direalisasikan diatas target, kecuali pajak parkir (84,79%), Pajak Sarang Burung Walet sebesar 38,73 %; dan Pajak Mineral bukan Logam sebesar 50,87 %. Perolehan pajak Hotel memiliki persentase realisasi tertinggi yaitu 143,43 %, kemudian diikuti oleh Penerimaan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan persentase realisasi sebesar 128,13%. Penerimaan pajak Restoran menempati urutan ketiga dengan persentase realisasi penerimaan sebesar 118,76 %.

b. Retribusi Daerah

Jenis retribusi daerah yang menjadi bagian PAD Kabupaten Maros meliputi: Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Retribusi Pelayanan Pasar; Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Tempat Pelelangan; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa; Retribusi Rumah Potong Hewan; Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan Retribusi Izin Trayek.

Pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 17.835.000.000 dan terealisasi sebesar 13.232.642.645,50 atau 74,19 %. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
	Pendapatan Retribusi Daerah	17.835.000.000	13.232.642.645,50	74,19
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000	119.692.000	239,38
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.000.000	9.990.000	99,90
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	700.000.000	735.092.000	105,01



No	Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Persen (%)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.950.000.000	2.480.912.030	62,81
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	30.000.000	64.020.000	213,40
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	500.000.000	353.580.000	70,72
7	Retribusi Tempat Pelelangan	300.000.000	257.508.500	61,05
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	500.000.000	399.476.500	79,90
8	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	140.000.000	7.800.000,00	5,57
9	Retribusi Rumah Potong Hewan	305.000.000	259.995.000	85,24
10	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	8.350.000.000	4.932.549.000	59,07
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan / PBG	3.000.000.000	3.611.848.115,50	120,39

Sumber: BPKAD, 2022

Retribusi tempat parkir khusus yang hanya ditargetkan sebesar Rp. 500.000.000 terealisasi sebesar Rp. 399.476.500 atau sebesar 79,90 %. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000, dan terealisasi sebesar Rp. 3.611.848.115,50 atau 120,39 %. Demikian halnya dengan retribusi Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp 353.580.000 atau sebesar 70,72%. Sedangkan retribusi dengan realisasi tertinggi adalah retribusi Retribusi pelayanan Kesehatan sebesar Rp. 119.692.000 atau sebesar 239,38 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 50.000.000.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan laba yang diperoleh dari penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah (BUMD) yang penerimaannya menjadi bagian dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai 103,54%, dengan nilai penerimaan



sebesar Rp. 10.859.311.136,65 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 10.487.620.496,00.

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.487.620.496,00	10.859.311.136,65	103,54
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	10.487.620.496	10.859.311.136,65	103,54

Sumber: BPKAD, 2022

d. Lain-Lain PAD Yang Sah

Lain-Lain PAD Yang Sah terdiri dari: Penerimaan Jasa Giro; Pendapatan Bunga; Tuntutan Ganti Kerugian Daerah; Pendapatan dari Pengembalian; Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan; Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah; Pendapatan BLUD; Lain-lain PAD yang Sah Lainnya; dan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 109.843.303.960 dan terealisasi sebesar Rp. 86.383.339.482,38 atau sekitar 78,64 persen. Adapun rincian anggaran dan realisasi dari Lain-lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Lain-lain PAD Yang Sah	109.843.303.960	86.383.339.482,38	78,64



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Penerimaan Jasa Giro	5.000.000.000	3.448.567.504,63	68,97
2	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	500.000.000	13.656.000	2,73
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	970.000.000	848.700.000	87,49
4	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000	2.227.791.628,86	742,60
5	Pendapatan BLUD	90.573.303.960	78.902.249.865,00	87,11

Sumber : BPKAD, 2022

Rendahnya capaian realisasi tersebut dikarenakan sumber pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan tidak terealisasi. Hanya Pendapatan dari Pengembalian yang terealisasi sebesar 742,60 %, Pendapatan BLUD terealisasi sebesar 87,11%. Sedangkan pada tahun 2022 pendapatan dana kapitas JKN pada FKTP tidak relaisasi atau 0%.

f.1.2 Pengelolaan Dana Perimbangan

Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer ini terdiri dari: Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum (DAU); dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Dana perimbangan meliputi dana bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik. Rincian pendapatan dana perimbangan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.



Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Perimbangan	1.033.266.400.000	1.016.183.947.388,00	98,35
1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	27.021.597.000	36.111.371.304	133,64
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	659.108.296.000	658.690.796.000	99,94
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	150.458.557.000	137.357.898.503,00	91,29

Sumber : BPKAD, 2022

1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

a. Bagi Hasil Pajak

Penerimaan dari Bagi Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 27.021.597.000 dan terealisasi sebesar Rp. 36.111.371.304 atau sekitar 133,64 %. Penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari penerimaan Bagi hasil pajak bumi dan pembangunan sektor pertambangan yaitu sebesar Rp. 8.063.672.000 atau 163,35 % dari target yang direncanakan sebesar Rp. 13.171.990.430,00. Sedangkan Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Paal 29 Wajib Pajak terealisasi sebesar Rp. 10.159.679.000,00 atau sebesar 100%. Bagi Hasil cukai tembakau terealisasi sebesar Rp 200.472.187,00 atau sebesar 105,27 %. Rincian anggaran dan realisasi Bagi Hasil Pajak dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.7
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Pajak
Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Bagi Hasil Pajak	27.021.597.000	36.111.371.304	133,64
1	pajak bumi dan pembangunan	8.063.672.000	13.171.990.430	163,35



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	sektor pertambangan			
2	Bagi Hasil dari pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Paal 29 Wajib Pajak	10.159.679.000	10.159.679.000	100
3	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau	190.428.000	200.472.187	105,27

Sumber: BPKAD, 2022

b. Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi hasil bukan pajak terdiri atas lima komponen yaitu; Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan, Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan, Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi, Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi.

Penerimaan dari Bagi bukan Hasil Pajak Kabupaten Maros pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp **27.021.597.000** dan terealisasi sebesar Rp **36.111.371.304** atau sebesar 133,35 %. Persentase penerimaan terbesar diperoleh dari Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan, dengan realisasi Rp 40.042.000 atau sebesar 154,61%. Kemudian diikuti oleh Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp 729.644.000,00 atau 99,99% dari target yang ditetapkan. Rincian pendapatan dari bagi hasil bukan pajak adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.8
Anggaran dan Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak
Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	27.021.597.000	36.111.371.304	133,64
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	40.042.000	61.906.947	154,61



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
2	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	1.958.311.000	1.958.311.000	100
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	5.879.768.000	9.829.367.740	167,17
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	729.697.000	729.644.000	99,99

Sumber: BPKAD, 2022

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari DAU pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 659.108.296.000 dan terealisasi sebesar Rp. 658.690.796.000 atau 99,94 %. Rincian anggaran dan realisasi DAU Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.9
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Umum	659.108.296.000	658.690.796.000	99,94
1	Dana Alokasi Umum	659.108.296.000	658.690.796.000	99,94

Sumber: BPKAD, 2022



Dana Alokasi Khusus (DAK)

a. DAK Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kebijakan transfer ke daerah terutama melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan untuk pembangunan fisik berbagai sarana dan prasarana layanan publik di daerah.

Untuk Tahun 2022 DAK Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK fisik terdiri dari DAK Bidang Jalan, DAK Bidang Irigasi, DAK Bidang Air Minum, DAK Bidang Sanitasi, DAK Bidang Kesehatan (Kesehatan, Rumah Sakit dan Keluarga Berencana), DAK Bidang Pendidikan (PAUD, SD, SMP dan Perpustakaan), DAK Bidang Perhubungan, DAK Bidang Perumahan, DAK Bidang Pertanian, DAK Bidang Perikanan, DAK Bidang Industri Kecil dan menengah, DAK Bidang Lingkungan Hidup. Namun dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, maka pada tahun 2022, DAK Fisik bidang perhubungan dan Bidang Pendidikan sub bidang perpustakaan dihapus. Rincian anggaran dan realisasi DAK Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.10
Anggaran dan Realisasi DAK Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Khusus Fisik	150.458.557.000	137.357.898.503	91,29
1	Dana Alokasi Khusus Fisik	150.458.557.000	137.357.898.503	91,29

Sumber : BPKAD, 2022

b. DAK Non Fisik

Untuk Tahun 2022 DAK Non Fisik Kabupaten Maros terdiri dari DAK Bantuan operasional PAUD, DAK tunjangan profesi guru, DAK tambahan penghasilan guru, DAK Bantuan Operasional Kesehatan, DAK Bantuan



Operasional KB, DAK tunjangan khusus guru, DAK dana pelayanan Administrasi kependudukan, DAK Non fisik bidang pariwisata, DAK Non fisik bantuan operasional Pendidikan kesetaraan. Rincian anggaran dan realisasi DAK Non Fisik Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2.11
Anggaran dan Realisasi DAK Non Fisik
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	196.677.950.000	184.023.881.581	93,57
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	196.677.950.000	184.023.881.581	93,57

Sumber : BPKAD, 2022

f.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penerimaan Pemerintah Kabupaten Maros yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; dan Bantuan Keuangan.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. **11.896.406.000** dengan realisasi sebesar Rp **13.255.406.000** atau sebesar **111,42** %. Adapun rincian anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.12
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.896.406.000	13.255.406.000	111,42



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	Pendapatan Hibah	11.896.406.000	13.255.406.000	111,42
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	0
2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98.915.617.000	98.915.617.000	100
	Dana Insentif Daerah	18.413.677.000	18.413.677.000	100
	Dana Desa	80.501.940.000,00	80.501.940.000,00	100
3	Bantuan Keuangan	149.016.684.800	143.673.836.429,00	96,41

Sumber: BPKAD, 2022

Penerimaan dari bagi hasil pajak dari propinsi terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan tanah, bagi hasil dari pajak rokok, Rincian penerimaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel. 2.13
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	56.804.453.000	20.762.619.599,00	137,23
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	10.975.000.000	15.449.285.965,00	111,34
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.148.000.000	13.274.629.541,00	77,35
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	17.871.953.000	28.322.594.288,00	96,78
4	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tanah	95.000.000	142.142.270,00	137,93



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	15.714.500.000	20.762.619.599,00	119,53

Sumber: BPKAD, 2022

f.1.4 Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi akuitas dana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisienkan dan mengefektifkan penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Pengelolaan belanja mempunyai tiga tujuan pokok yang ingin dicapai yaitu menjamin dijalkannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja, menyesuaikan alokasi anggaran dengan arah kebijakan anggaran dan prioritas anggaran, serta menjamin efisiensi dan efektifitas alokasi anggaran. Pengelolaan belanja daerah akan menyesuaikan arah kebijakan anggaran terutama yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah daerah seperti *pro poor*, *pro job* dan *pro growth*. Pengelolaan belanja daerah harus mengacu kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif.

1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah disusun berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 berpedoman kepada azas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu



bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Belanja daerah selain digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan. juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut. penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk itu arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 adalah:

1. Upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas anggaran belanja secara proporsional akan dilakukan melalui memprioritaskan alokasi belanja daerah pada program dan kegiatan yang memiliki dampak kuat terhadap pencapaian prioritas pembangunan daerah dan berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
2. Belanja daerah dititik beratkan kepada prioritas pembangunan daerah.
3. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
4. Belanja langsung akan selalu disesuaikan dengan ketersediaan anggaran setiap tahun dan akan diupayakan secara merata pada semua sektor.

2. Target dan Realisasi Belanja

Secara deskriptif belanja daerah dapat diuraikan dan dijelaskan sebagai berikut: **1) Belanja Tidak Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, **2) Belanja Langsung** merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.



Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 162.109.148.158 dan realisasi sebesar Rp. 156.161.828.082,63 atau sebesar 96,33 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut ini.

3. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 773.429.692.640 dan terealisasi sebesar 94,51% atau senilai Rp. 731.015.145.655. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	773.429.692.640	731.015.145.655	94,51
1	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
2	Belanja Hibah	15.511.131.000	14.917.925.951	96,18
3	Belanja Transfer	149.016.684.800	143.673.836.429	96,41
4	Belanja Tidak Terduga	3.800.000.000	2.812.377.640	74,01

Sumber: BPKAD, 2022

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2022, belanja pegawai Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 605.101.876.840 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 569.611.005.635 atau 94,13%. Komposisi terbesar pada belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji dan tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros. Adapun rincian komposisi belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Pegawai (BTL)	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	425.669.191.610	408.536.761.726	95,98
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	44.967.199.782	40.255.211.223	89,52
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000	801.600.000	100
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	743.009.000	742.750.000	99,97
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	165.000.000	0	0

Sumber: BPKAD, 2022

b. Belanja Hibah

Pada tahun 2022 belanja hibah Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 15.511.131.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.917.925.951 atau 96,18 %. Komposisi belanja yang terealisasi terdapat pada belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar 95,96%, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar 99,90 %.

Tabel 2.16
Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Hibah	15.511.131.000	14.917.925.951	96,18
1	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	14.661.131.000	14.068.782.436	95,96
2	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	850.000.000	849.143.515	99,90

KABUPATEN MAROS TAHUN 2022



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Politik			

Sumber: BPKAD, 2022

c. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik

Pada tahun 2022, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintahan desa dan partai politik dianggarkan sebesar Rp. 15.511.131.000 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.917.925.951 atau sebesar 96,18%. Realisasi belanja tersebut, terdiri dari realisasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp. 143.673.836.429, atau sebesar 96,54%, dan realisasi belanja bantuan kepada partai politik sebesar 99,90 % atau sebesar Rp. 849.143.515. Rincian anggaran dan realisasi Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pemerintahan Desa dan Partai Politik	156.673.155.700	67.831.741.034	43,30
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	148.816.684.800	143.673.836.429	96,54
2	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	850.000.000	849.143.515	99,90

Sumber: BPKAD, 2022



d. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2022, belanja tidak terduga Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 3.800.000.000 dan hanya terealisasi sebesar 74,01 % atau sebesar Rp. 2.812.377.640.

4. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 954.219.23.262,23, dan terealisasi sebesar Rp. 806.271.843.050,50 atau 84,50 % dari total anggaran yang direncanakan. Rincian realisasi anggaran belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA LANGSUNG	954.219.23.262,23	806.271.843.050,50	84,50
1	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
2	Belanja Barang dan Jasa	408.369.582.566	377.130.399.027	92,35
3	Belanja Modal	376.239.383.080	327.524.592.440	87,05

Sumber: BPKAD, 2022

a. Belanja Pegawai

Pada tahun 2022, belanja pegawai pada belanja langsung Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 605.101.876.840 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 569.611.005.635 atau 94,13 %. Belanja honorarium PNS yang dianggarkan sebesar Rp. 8.286.110.000 dan terealisasi sebesar Rp. 7.580.652.364 atau 91,49 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai



Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Pegawai	605.101.876.840	569.611.005.635	94,13
1	Honorarium PNS	8.286.110.000	7.580.652.364	91,49
2	Uang lembur	0	0	0
3	Belanja Pegawai BLUD	4.990.000.000	4.383.105.000	87,84

Sumber: BPKAD, 2022

b. Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2022 belanja barang dan jasa Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 408.369.582.566 dan terealisasi sebesar Rp. 377.130.399.027 atau 92,35 %. Komposisi belanja barang dan jasa dengan persentase realisasi tertinggi pada Belanja Premi Asuransi sebesar 95,87 %.

Tabel 2.20
Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	Belanja Barang dan Jasa	408.369.582.566	377.130.399.027	92,35
1	Belanja Bahan Pakai Habis	103.612.961.967	86.445.329.329	83,43
2	Belanja Bahan/Material	-	-	-
3	Belanja Jasa Kantor	95.546.253.376	87.581.476.043	91,66
4	Belanja Premi Asuransi	20.729.062.800	19.872.524.170	95,87
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	344.500.000	273.000.000	79,25
8	Belanja Perjalanan Dinas	52.962.171.300	39.127.736.541	73,88
9	Belanja Pemeliharaan	7.213.669.303	5.785.970.761	80,21
10	Belanja Jasa Konsultansi	2.135.775.204	1.595.125.699	74,69
11	Belanja kursus.	1.082.330.200	643.032.050	59,41



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	pelatihan. sosialisasi dan bimbingan teknis PNS			
12	Belanja barang dan jasa BLUD	61.560.773.311	56.387.396.920	91,60

Sumber: BPKAD, 2022

c. Belanja Modal

Pada tahun 2022 belanja modal Kabupaten Maros dianggarkan sebesar Rp. 376.239.383.080 dan dapat terealisasi sebesar Rp. 327.524.592.440 atau 87,05 %. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.21
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Kabupaten Maros
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	BELANJA MODAL	376.239.383.080	327.524.592.440	87,05

Sumber : BPKAD, 2022

f.1.5 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat dengan jumlah pendapatan yang terbatas. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang



Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah didasari oleh pandangan bahwa setiap kewajiban yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah secara konsisten dapat dilaksanakan sesuai tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban, serta menjadi kredibilitas pemerintah daerah.

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kabupaten Maros adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman, dan Penerimaan kembali pemberian pinjaman. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman.

2. Target dan Realisasi Pembiayaan

Jumlah pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 tidak terealisasi atau 0% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 39.857.009.672. Rincian target dan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Maros tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.22
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
	PEMBIAYAAN DAERAH	39.857.009.672	0	0
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.857.009.672	0	0
	Penggunaan Silpa	39.857.009.672	0	0
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.831.702.753	0	0
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	19.783.268.393	0	0
	Sisa Dana BOS	48.434.360	0	0

Sumber: BPKAD, 2022

Untuk penerimaan pembiayaan daerah capaian tidak realisasi atau 0% dari target yang ditetapkan. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan tidak ada realisasi.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), membuktikan bahwa



sistem pemerintahan di Indonesia telah beralih dari sentralisasi menuju kepada desentralisasi, dan berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perencanaan pembangunan jangka panjang yang komprehensif, adaptif serta sinergis, dan penyusunannya dilakukan dengan menerapkan pendekatan ; (1) Pertumbuhan yang tinggi, (2) Pemerataan, (3) Partisipatif, (4) Pembangunan dari bawah ke atas (*bottom up*), (5) Pembangunan dari atas ke bawah (*top-down*), dan (6) Berwawasan lingkungan/berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros disusun sebagai perwujudan dari amanat kedua Undang-Undang tersebut. Kebijakan pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Maros ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2016-2021 (Lembaran Daerah No. 4 Tahun 2016).

Dalam menyusun RPJMD ini, acuan utama yang digunakan adalah rumusan Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Rencana Program Indikatif Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yang telah disampaikan melalui Sidang Paripurna DPRD dan semasa pelaksanaan kampanye pemilihan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati secara langsung. Disamping itu, penyusunan RPJMD Daerah ini juga mengacu pada RPJP Kabupaten Maros, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan/Renstra Provinsi Sulawesi Selatan, dan RPJP Nasional, dan berbagai kebijakan dan prioritas program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat termasuk sasaran pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama penyusunan RPJMD Kabupaten Maros adalah:

1. Menyajikan program dan kegiatan turunan Visi dan Misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang akan dilaksanakan sebagai program dan kegiatan prioritas utama;
2. Menyajikan gambaran tentang arah kebijakan umum yang wajib diikuti oleh semua pejabat daerah dan DPRD dalam menyusun RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD serta R-APBD dan DPA pada setiap tahun anggaran.

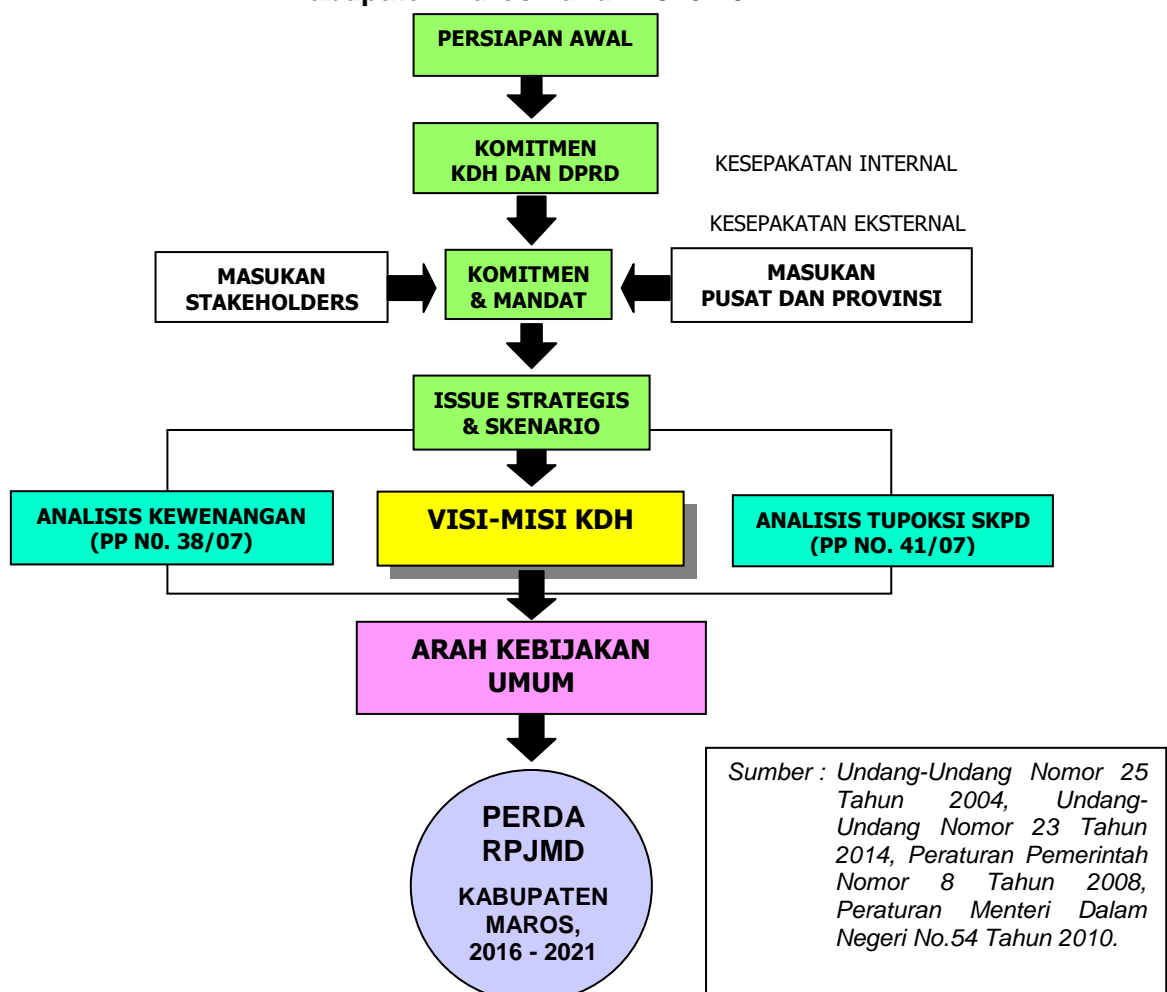
Sedangkan sasaran penyusunan RPJMD Kabupaten Maros 2016-2021 adalah :



1. Kesiapan Kebijakan dan Program Pembangunan dalam skala periode yang lebih jelas dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
2. Ketersediaan rumusan program pembangunan yang merupakan indikasi program yang tertuang dalam APBD.
3. Merupakan persetujuan dan komitmen bersama antara Pemerintah Kabupaten Maros dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros serta masyarakat terhadap pembangunan daerah

Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada gambar I.1.

Gambar I.1
Pola Pikir dan Proses Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Maros Tahun 2016-2021





Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen RPJMD juga berguna sebagai dasar penilaian kinerja bupati dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan menjadi tolok ukur keberhasilan bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sulawesi Selatan dan laporan keterangan pertanggungjawaban bupati yang nantinya diserahkan kepada DPRD Kabupaten Maros.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Maros digambarkan melalui kajian data dan informasi berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah Kabupaten Maros. Gambaran umum kinerja Kabupaten Maros tidak semua menggambarkan penurunan capaian, namun hal ini dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan Kabupaten Maros dengan dasar bahwa Kabupaten Maros sudah tidak lagi mentolelir kondisi-kondisi minor seperti angka kemiskinan, pemukiman kumuh dan kondisi minor lainnya.

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan permasalahan pokok pembangunan di Kabupaten Maros secara umum dapat terpilah pada kualitas sumberdaya manusia yang masih perlu ditingkatkan, Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih perlu di tingkatkan.

b. Visi dan Misi

Pembangunan Daerah merupakan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan masyarakat di daerah yang dilakukan secara berkelanjutan, berdasarkan potensi dan kemampuan daerah, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah harus mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, kukuh kekuatan moral dan etikanya.



Namun proses pembangunan yang dilakukan selama ini, tidak hanya menghasilkan kemajuan dan keberhasilan, tetapi juga menyisakan dampak berupa permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Ragam permasalahan tersebut menuntut perhatian untuk menjamin keberlangsungan pembangunan ke arah yang lebih baik, demokratis dan berkeadilan. Dibutuhkan kemampuan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta kemampuan mengoptimalkan kekuatan dan mengeliminir kelemahan yang dimiliki. Perubahan lingkungan eksternal, baik lingkungan global, regional, nasional maupun lokal pada berbagai bidang tetap harus menjadi referensi dalam perencanaan pembangunan daerah jangka panjang dan menengah.

Dibutuhkan pula sebuah Visi menyangkut kemana daerah dan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan rumusan umum dan gambaran mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Maros, dengan memperhatikan RPJP Kabupaten Maros 2005-2025, RPJM Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, dan RPJM Nasional, serta dinamika lingkungan strategis maka ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2021-2026, yaitu:

“MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING”

Yang dimaksud **sejahtera** menurut pengertian Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu suatu kondisi masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut berupa kecukupan dan mutu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebutuhan dasar lainnya seperti lingkungan yang bersih, aman dan nyaman. Juga terpenuhinya hak asasi dan partisipasi serta terwujudnya masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kondisi masyarakat Kabupaten Maros pada tahun 2022 yang **lebih baik** dari kondisi sebelumnya pada seluruh sektor kehidupan masyarakat yang ditandai dengan :



1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.
2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good Governance And Clean Government*.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

Guna Menyatukan langkah, gerak, dan tindakan yang nyata bagi seluruh stakeholders pembangunan Daerah dan seluruh komponen Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Maros baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskanlah Misi dengan tetap memperhitungkan kondisi, permasalahan, serta tantangan. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik;
2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia;
3. Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif;
4. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
5. Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah;
6. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD 2016-2021

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021 - 2026 dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai



sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja, kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program - program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan dan pengendalian.

Untuk mendukung visi “MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS, DAN BERDAYA SAING” maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maros periode 2021 – 2026. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Maros melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun ke depan.

6.1. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana dirumuskan pada Bab V, diperlukan strategi yang menurut Permendagri No. 86 tahun 2017, merupakan rangkaian tahapan atau



langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi dirumuskan dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman dalam mencapai sasaran. Sebuah strategi dapat dirumuskan untuk mencapai satu sasaran, dapat juga untuk mewujudkan lebih dari satu sasaran. Berdasarkan pemahaman tersebut maka rumusan strategi RPJMD Kabupaten Maros periode tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik

- Tujuan 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi

Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sasaran 2: Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas

Strategi: Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

2. Misi 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia

- Tujuan 2: Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing

Sasaran 3: Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Strategi: Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.

Sasaran 4: Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendidikan keagamaan Strategi: Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan



nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektifgender

Strategi: Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

3. Misi 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif

- Tujuan 3: Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat

Sasaran 6: Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat

Strategi : Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.

Sasaran 7: Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat

Strategi : Peningkatan_kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM

4. Misi 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

- Tujuan 4: Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya ekonomi daerah

Sasaran 8: Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB Strategi : Penguatan terhadap lapangan usaha

penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan



sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib.

Sasaran 9: Menurunnya jumlah pengangguran

Strategi : Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor –sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalinya Laju Inflasi

Strategi : Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.

Sasaran 11: Menurunnya jumlah masyarakat miskin

Strategi : Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

5. Misi 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah

- Tujuan 5: Menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat di tiapwilayah

Sasaran 12: Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat

Strategi : Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik



melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.

6. Misi 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana

- Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 13: Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan

Strategi: Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup

Tujuan 7: Menurunkan resiko bencana

Sasaran 14: Menurunnya resiko akibat bencana

Strategi : Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Selanjutnya keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi dalam RPJMD periode 2021 – 2026, disajikan dalam tabel berikut ini:

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Maros

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik			
Menciptakan tatakelola pemerintahan	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib



1	yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia				
2	Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing	3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
		4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan keagamaan	Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat
		5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan daam perspektif gender	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif				
3	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanan dasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	6	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa kebutuhan konsumsi masyarakat	Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
		7	Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM



MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal

4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah	8	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB	Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.
		9	Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerjanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.
		10	Terkendalnya Laju Inflasi	Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.
		11	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.



MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah				
5	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah	12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana				
6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	13	Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup
7	Menurunkan resiko bencana	14	Menurunnya resiko akibat bencana	Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten. berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Kebijakan tahunan yang belum terlaksana tetap akan menjadi perhatian pada tahun berikutnya disamping kebijakan prioritas tahun berjalan.

Penekanan prioritas kebijakan pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam RPJMD. Dengan prioritas kebijakan tersebut bukan berarti program pembangunan operasional OPD yang tidak menjadi prioritas kebijakan tidak berjalan. Program tersebut



tetap berjalan tetapi dengan penekanan strategis yang lebih rendah dibandingkan dengan program yang merupakan kebijakan yang diprioritaskan. Kebijakan pembangunan dengan penekanan strategis lebih rendah tersebut adalah program-program operasional pada semua OPD yang melaksanakan program pembangunan daerah untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan semua urusan pemerintahan.

Rumusan strategi dan arah kebijakan disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang akan melahirkan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Keterkaitan tema atau fokus pembangunan, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Maros sebagaimana digambarkan berikut ini:

Tema Pembangunan Kabupaten Maros Periode tahun 2021 – 2026

TEMA TAHUN 2022	TEMA TAHUN 2023	TEMA TAHUN 2024	TEMA TAHUN 2025	TEMA TAHUN 2026
Meningkatkan Daya Saing melalui ketahanan Ekonomi, Pelayanan Dasar dan Pembangunan SDM secara Inklusif	Percepatan pemulihan ekonomi dan sosial Masyarakat melalui infrastruktur wilayah dan peningkatan kualitas SDM	Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui pembangunan wilayah dan pengembangan SDM	Percepatan pembangunan wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan pemerataan wilayah	Meningkatkan pembangunan Manusia yang produktif dan berkarakter

Strategi dan arah kebijakan daerah dimaksudkan sebagai landasan operasional pembangunan Kabupaten Maros agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, strategi dan arah kebijakan mencakup seluruh aspek dan bidang pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Maros dalam kurun waktu 2016 - 2021.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, pemerintah



Kabupaten Maros memiliki strategi untuk mencapai sasaran dari **misi pertama**, yaitu :

1. Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2. Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.
3. Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
5. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.
6. Peningkatan_kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM.
7. Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanan dan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, danjaminan sosial wajib.



8. Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor – sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja. Sasaran 10: Terkendalnya Laju Inflasi.
9. Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.
10. Pembentukan dan pengembangan kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
11. Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.
12. Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
13. Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten.berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.

Tabel 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Periode 2021 – 2026 Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi pada setiap Misi

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
MISI 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan publik									
1	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang professional, bersinergi dan berkinerja tinggi	1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan penerapan budaya kerja, profesionalitas dan kesejahteraan aparatur, penataan organisasi, proses bisnis, tertib regulasi, akuntabilitas kinerja pemerintahan, pelayanan publik yang terdesentralisasi ke semua wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan dan pengendalian pembangunan yang ditunjang dengan mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).	Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja	Penguatan pengelolaan akuntabilitas kinerja
					Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.	Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.	Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.	Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.	Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui penerapan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan realisasi perjanjian kinerja yang disepakati.
					Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.	Pengintegrasian proses bisnis perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan ke dalam Sistem pemerintahan berbasis elektronik.
					Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan	Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan	Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan	Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan	Penyempurnaan berbagai produk hukum daerah yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan
					Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Penguatan pengawasan melalui Peningkatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.	Pembinaan Penataan Perangkat Daerah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis secara berkelanjutan, yang meliputi: pembinaan terhadap struktur organisasi, pembinaan terhadap budaya organisasi, dan pembinaan terhadap inovasi organisasi.	
			Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.	Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang meliputi: Pemantauan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, Pendampingan terhadap pelaksanaan penataan perangkat Daerah, dan Evaluasi pelaksanaan penataan perangkat Daerah.	
	2	Terciptanya pelayanan publik yang berkualitas	Penyempurnaan Kebijakan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan melalui survei kepuasan, keterbukaan akses terhadap hasil survei kepuasan, dan tindak lanjut atas hasil survey.
			Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar	Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar	Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar	Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar	Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar	Peningkatan mutu, jenis layanan, dan penerima layanan dasar

					Pendelegasian kewenanganterkait pelaksanaan pelayanan publik	Pendelegasian kewenanganterkait pelaksanaan pelayanan publik	Pendelegasian kewenanganterkait pelaksanaan pelayanan publik	Pendelegasian kewenanganterkait pelaksanaan pelayanan publik	Pendelegasian kewenanganterkait pelaksanaan pelayanan publik
MISI 2: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia									

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
2	Menciptakan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berdaya saing	3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan secara berkualitas yang ditunjang oleh ketersediaan SDM, sarana prasarana, dan teknologi informasi.	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun	Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan disemua jenjang dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun
					Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)	Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)	Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)	Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)	Peningkatan kualitas dan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan termasuk Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik (PNS dan PPPK)
					Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah	Pemerataan kualitas layanan antar satuan pendidikan dan antarwilayah
					Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.	Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.	Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.	Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.	Peningkatan efektifitas pemanfaatan Anggaran Pendidikan untuk peningkatan akses, kualitas, dan daya saing pendidikan.
					Penghapusan iuran komite sekolah.	Penghapusan iuran komite sekolah.	Penghapusan iuran komite sekolah.	Penghapusan iuran komite sekolah.	Penghapusan iuran komite sekolah.
					Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa	Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa	Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa	Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa	Penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru dan beasiswa untuk mahasiswa
					Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat	Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat	Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat	Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat	Penguatan terhadap upaya mendorong minat baca masyarakat

					Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat	Peningkatan ketersediaan perpustakaan/taman bacaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budayapendidikan	Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budayapendidikan	Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budayapendidikan	Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budayapendidikan	Peningkatan kerjasama dengan kampus - kampus dan seluruh lembaga penelitian terkait budayapendidikan
			Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan	Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan	Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan	Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan	Peningkatan akses bagi disabilitas dan masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan
			Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi	Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan kesehatan reproduksi
			Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB	Perluasan akses dan kualitas pelayanan KB
			Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuhkembang anak	Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuhkembang anak	Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuhkembang anak	Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuhkembang anak	Percepatan penurunan stunting dengan pengembangan sistem jaminan gizi dan tumbuhkembang anak
			Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit	Pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian penyakit
			Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
			Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
			Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan	Pemenuhan dan peningkatan kompetensi serta kesejahteraan tenaga kesehatan

				Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan	Pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan
--	--	--	--	---	---	---	---	---

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.	Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.	Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.	Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.	Pelindungan dan pemenuhan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan.	
			Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulandata, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan	Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulandata, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan	Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulandata, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan	Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulandata, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan	Pemanfaatan teknologi digital untuk pengumpulandata, media promosi, komunikasi, dan edukasi kesehatan	
	4	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan	Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat Kabupaten Maros berlandaskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan
				Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong
				Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'	Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'	Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'	Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'	Peningkatan Kesejahteraan (Insentif) bagi Imam masjid, guru mengaji, pastor, pendeta, guru sekolah minggu/remaja dan pegawai syara'
				Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan	Peningkatan fasilitasi pelayanan keagamaan
				Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat	Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat	Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat	Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat	Pemberdayaan dana sosial keagamaan dan pengembangan kelembagaan ekonomi umat

					Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.	Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.	Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.	Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.	Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat aktifitas keagamaan dan syiar.
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
			Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius	Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius	Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius	Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius	Pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal yang bernilai religius	
			Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan	Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan	Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan	Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan	Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya dalam pendidikan keagamaan	
			Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan	Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan	Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan	Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan	Pembinaan terhadap organisasi sosial dan kemasyarakatan	
			Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	
			Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.	Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.	Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.	Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.	Pelibatan Masyarakat secara aktif dalam mengemukakan pendapat atau saran pada pengambilan kebijakan publik.	
	5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan dalam perspektif gender	Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah melalui suatu sistem layanan yang berbasis pada penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan yang disertai dengan pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan	Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan	Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan	Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan	Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan	Pemberdayaan perempuan di semua sektor pembangunan
			Peningkatan pengetahuan pemahaman individu baik perempuan maupun laki-laki, keluarga, komunitas, lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha tentang gender	Pengintegrasian perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian.	Percepatan pelaksanaan PUG melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	Percepatan pelaksanaan PUG melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	Percepatan pelaksanaan PUG melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)	

				dunia usaha.	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO	Peningkatan perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan TPPO
--	--	--	--	--------------	---	---	---	---	---

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
			Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik	Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan politik		
			Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.	Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.	Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.	Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.	Perluasan kesempatan dalam berorganisasi serta berkreasi secara bebas dan bertanggung jawab.		
			Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan	Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan	Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan	Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan	Peningkatan upaya penurunan kasus perkawinan usia muda bagi pemuda perempuan		
			Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi	Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi	Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi	Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi	Peningkatan akses bagi pemuda perempuan mendapatkan pendidikan tingkat menengah dan perguruan tinggi		
			Perluasan kesempatan kerjadan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal	Perluasan kesempatan kerjadan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal	Perluasan kesempatan kerjadan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal	Perluasan kesempatan kerjadan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal	Perluasan kesempatan kerjadan berusaha bagi pemuda perempuan utamanya pada sektor formal		
MISI 3: Meningkatkan keterjangkauan kebutuhan dasar dan pelayanan dasar secara inklusif									
		Pemanfaatan teknologi	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pemantauan perkembangan harga dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat		

3	Mengoptimalkan pemenuhan pelayanandasar dan ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat	6	Meningkatnya ketersediaan kebutuhan barang dan jasa untuk konsumsi masyarakat	informasidan penguatan kerja sama untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi utamanya menjelang hari besar keagamaan.	Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.	Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.	Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.	Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.	Pengidentifikasian jumlah stok barang dan jasa beserta ketersediaannya di setiap wilayah kecamatan dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah terjadinya aksi spekulasi.
---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa sampai ke tingkat pedagang di pasar rakyat.
			Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatan hari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatan hari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatan hari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatan hari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat	Pelaksanaan penetrasi pasar menjelang peringatan hari - hari besar untuk menegaskan kecukupan stok dan pasokan barang dan jasa kebutuhan masyarakat
	7 Terpenuhinya standar pelayanan minimum masyarakat	Peningkatan kemampuan pemerintah daerah dan pemerintah Desa yang didukung oleh potensi masyarakat dan dunia usaha dalam menyediakan pelayanan dasar sesuai SPM	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara penuh dan konsisten termasuk perbaikan mekanisme pengaduan yang terintegrasi dengan manajemen kinerja
Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini			Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan anak usia dini	
Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)			Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan dasar (SD Sederajat dan SMP sederajat)	
Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan			Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan standar pelayanan pendidikan kesetaraan	
Pemenuhan standar pelayanan kesehatan			Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan	

					Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari -hari	Pemenuhan standar pelayanan kebutuhan pokok air minum sehari -hari
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik	Pemenuhan standar pelayanan pengolahan air limbah domestik
			Pemenuhan standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi	Pemenuhan standar pelayanan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
			Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Pemenuhan standar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
			Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana	Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana	Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana	Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana	Pemenuhan standar pelayanan informasi rawan bencana
			Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pemenuhan standar pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
			Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemenuhan standar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas

					Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar anak telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar anak telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar anak telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar anak telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar anak telantar
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar lanjut usia telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar lanjut usia telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar lanjut usia telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar lanjut usia telantar	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar lanjut usia telantar
			Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis	Pemenuhan standar pelayanan rehabilitasi sosialdasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis
			Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana	Pemenuhan standar pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana
			Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.	Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.	Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.	Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.	Percepatan pembangunan wilayah (Desa/Kelurahan) dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar.
			Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar	Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar	Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar	Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar	Peningkatan kualitas SDM pengelola pelayanan dasar
			Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah	Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah	Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah	Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah	Penguatan peran kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar di wilayah
			Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar	Peningkatan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan pelayanan dasar

					Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanandasar	Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanandasar	Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanandasar	Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanandasar	Perluasan jangkauan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengakselerasi pelayanandasar
MISI 4: Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah berbasis potensi lokal									

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
4	Meningkatkan nilai tambah ekonomi berbasis keunggulan sumberdaya daerah	8	Meningkatnya kontribusi lapangan usaha Daerah terhadap PDRB	Penguatan terhadap lapangan usaha penyumbang kontribusi PDRB yang memiliki pertumbuhan yang cepat serta memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Kabupaten Maros yang terdiri dari: sektor pertanian; industri pengolahan; konstruksi; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi, makanandan minuman; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib.	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pengelolaan lapangan usaha pertanian dan perikanan
					Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
					Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi
					Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil dan industrialisasi
					Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usahamikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usahamikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usahamikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usahamikro	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk usahamikro
					Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital	Peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan ekonomi utamanya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, ekonomi kreatif dan ekonomi digital
					Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor	Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor	Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor	Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor	Peningkatan kualitas produksi terutama pada komoditi yang berpotensi ekspor

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan	Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan	Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan	Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan	Penyediaan bantuan modal, infrastruktur, alsintan, pupuk, alat tangkap, bibit dan asuransi bagi petani serta nelayan
			Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional	Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional	Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional	Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional	Pemanfaatan keberadaan potensi world heritage pada bentangan kawasan karst maros sebagai tujuan wisata internasional
			Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama	Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama	Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama	Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama	Pengembangan destinasi wisata baru dan peremajaan destinasi wisata lama
			Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional, koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
			Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan	Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan	Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan	Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan	Pengembangan infrastruktur utama dan pendukung kepariwisataan
			Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk usaha kreatif dan digital
			Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif	Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif	Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif	Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif	Pendampingan dan inkubasi usaha ekonomi kreatif
			Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif	Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif	Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif	Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif	Pengembangan dan revitalisasi ruang kreatif

					Peningkatan populasi pelaku usaha digital	Peningkatan populasi pelaku usaha digital	Peningkatan populasi pelaku usaha digital	Peningkatan populasi pelaku usaha digital	Peningkatan populasi pelaku usaha digital
					Pengembangan maros creative center	Pengembangan maros creative center	Pengembangan maros creative center	Pengembangan maros creative center	Pengembangan maros creative center

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Perluasan aktivitas ekonomikreatif	Perluasan aktivitas ekonomikreatif	Perluasan aktivitas ekonomikreatif	Perluasan aktivitas ekonomikreatif	Perluasan aktivitas ekonomikreatif
			Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi untukekonomi kreatif dan digital	Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi untukekonomi kreatif dan digital	Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi untukekonomi kreatif dan digital	Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi untukekonomi kreatif dan digital	Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi untukekonomi kreatif dan digital
			Pengoptimalan pemanfaatan teknologidigital dan industri 4.0	Pengoptimalan pemanfaatan teknologidigital dan industri 4.1	Pengoptimalan pemanfaatan teknologidigital dan industri 4.2	Pengoptimalan pemanfaatan teknologidigital dan industri 4.3	Pengoptimalan pemanfaatan teknologidigital dan industri 4.4
	9 Menurunnya jumlah pengangguran	Peningkatan penyerapan tenaga kerja utamanya melalui sektor –sektor lapangan usaha yang memiliki potensi lokal Daerah, memiliki pertumbuhan yang cepat, dan dapat menyediakan lapangan kerja yang luas serta ditunjang dengan peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja.	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja	Peningkatan investasi pada sektor unggulan Daerah yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja
Penyediaan balai latihankerja			Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja	Peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja	
Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan			Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan	Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan	Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan	Pengembangan sistem informasi dan promosi ketenagakerjaan	
Pengembangan Kawasan Industri Maros yang mampu memberikan daya serap terhadap ketersediaan tenaga kerja lokal			Perluasan kesempatan kerjamelalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerjayang tepat dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerjayang tepat dan perlindungan tenaga kerja	Peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerjayang tepat dan perlindungan tenaga kerja	
Peningkatan kerjasamalembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.			Peningkatan kerjasamalembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.	Peningkatan kerjasamalembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.	Peningkatan kerjasamalembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.	Peningkatan kerjasamalembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja.	

				Peningkatan pelayanan kepemudaan termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda melalui pengembangan maros creative center	Pengembangan tenaga kerja pemuda berbasis teknologi informasi dan kebutuhan pasar kerja	Peningkatan akses terhadap modalan bagi wirausaha muda yang memiliki ide bisnis dan usaha yang menarik	Pengembangan kewirausahaan pemuda yang berorientasi regional dan nasional dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan daerah	Pengembangan kewirausahaan pemuda yang berorientasi regional dan nasional dengan memperhatikan kompetensi dan produk unggulan daerah
	10	Terkendalinya Laju Inflasi	Penguatan ketahanan pangan dan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan meningkatkan produksi serta menjaga kelancaran distribusi	Peningkatan ketersediaan komoditas pangan	Peningkatan ketersediaan komoditas pangan	Peningkatan ketersediaan komoditas pangan	Peningkatan ketersediaan komoditas pangan	Peningkatan ketersediaan komoditas pangan
				Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik	Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik	Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik	Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik	Peningkatan dukungan infrastruktur dan logistik

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING								
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
		melalui optimalisasi infrastruktur dan upaya penanganan dampak bencana alam yang disertai dengan penguatan sinergi antar lembaga terkait.	Penguatan kerjasamadengan institusi lain	Penguatan kerjasamadengan institusi lain	Penguatan kerjasamadengan institusi lain	Penguatan kerjasamadengan institusi lain	Penguatan kerjasamadengan institusi lain	
			Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antarapetani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern.	Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antarapetani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern.	Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antarapetani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern.	Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antarapetani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern.	Peningkatan akses pasar melalui kemitraan antarapetani dengan pedagang/industri pengolahan/pasar modern.	
			Optimalisasi peran TPID	Optimalisasi peran TPID	Optimalisasi peran TPID	Optimalisasi peran TPID	Optimalisasi peran TPID	
			Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	
			Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	Penguatan sistem informasidan peningkatan akses pemasaran	
	11	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Pembentukan dan pengembangan kelompok UsahaEkonomi Masyarakat serta peningkatan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial tanpa Diskriminasi dengan mendorong partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.	Pelatihan usaha serta pemberian akses usahaproduktif bagi keluargamiskin dan rentan	Pelatihan usaha serta pemberian akses usahaproduktif bagi keluargamiskin dan rentan	Pelatihan usaha serta pemberian akses usahaproduktif bagi keluargamiskin dan rentan	Pelatihan usaha serta pemberian akses usahaproduktif bagi keluargamiskin dan rentan	Pelatihan usaha serta pemberian akses usahaproduktif bagi keluargamiskin dan rentan
				Peningkatan usaha ekonomiproduktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga	Peningkatan usaha ekonomiproduktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga	Peningkatan usaha ekonomiproduktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga	Peningkatan usaha ekonomiproduktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga	Peningkatan usaha ekonomiproduktif bagi kelompok miskin dan rentan untuk peningkatan pendapatan keluarga
				Penguatan kapasitas usahakelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha sertakemitraan usaha	Penguatan kapasitas usahakelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha sertakemitraan usaha	Penguatan kapasitas usahakelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha sertakemitraan usaha	Penguatan kapasitas usahakelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha sertakemitraan usaha	Penguatan kapasitas usahakelompok miskin dan rentan dengan skema pembinaan usaha sertakemitraan usaha
				Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha
				Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha	Peningkatan kapasitas danketerampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha

					<p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p>	<p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p>	<p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p>	<p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p>	<p>Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu</p>
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Percepatan pelaksanaan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.	Percepatan pelaksanaan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.	Percepatan pelaksanaan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.	Percepatan pelaksanaan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.	Percepatan pelaksanaan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan berperspektif gender.
			Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.	Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.	Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.	Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.	Peningkatan akses dan penerima manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan pada usaha ekonomi produktif.
			Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru	Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru	Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru	Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru	Penyediaan bantuan pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu termasuk penyediaan perlengkapan sekolah setiap tahun ajaran baru
			Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan	Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan	Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan	Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan	Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi masyarakat miskin dan rentan
			Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS	Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS	Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS	Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS	Penyediaan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin, termasuk penyediaan subsidi pembayaran iuran BPJS
			Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi	Penguatan pelaksanaan jaminan sosial komprehensif dan terintegrasi

					Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat	Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat	Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat	Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat	Penguatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dan subsidi yang terintegrasi dan tepat
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
			sasaran	sasaran	sasaran	sasaran	sasaran		
			Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu	Penguatan pelaksanaan pendampingan dan layanan terpadu
MISI 5: Memantapkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan wilayah									
5	Mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah	12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur penunjang aktifitas ekonomi masyarakat	Peningkatan fungsi layanan dan kualitas aksesibilitas antar ruang yang mampu mengakselerasi peningkatan usaha ekonomi kecil dan menengah terutama ekonomi produktif masyarakat miskin serta perkembangan ekonomi kreatif, baik melalui pembiayaan Daerah maupun melalui kerjasama dengan swasta/dunia usaha atau kerjasama dengan lembaga/pemerintah lainnya.	Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.	Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.	Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.	Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.	Peningkatan dan Pemantapan kondisi jaringan jalan dan jembatan beserta prasarana fasilitas perlengkapan jalan.
					Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.	Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.	Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.	Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.	Pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
					Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan	Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan	Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan	Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan	Pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan
					Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi	Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi
					Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)
					Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi	Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi	Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi	Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi	Peningkatan ketersediaan sarana komunikasi dan informasi

--	--	--	--

Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dankawasan permukiman layak huni.	Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dankawasan permukiman layak huni.	Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dankawasan permukiman layak huni.	Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dankawasan permukiman layak huni.	Peningkatan ketersediaan serta pengelolaan lingkungan perumahan dankawasan permukiman layak huni.
---	---	---	---	---

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN						
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026		
			Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	
			Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.	Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.	Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.	Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.	Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.	Peningkatan kinerja perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.	
			Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa	Peningkatan ketersediaan sarana prasarana transportasi angkutan barang dan jasa	
			Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan kapasitas dan kualitas pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	
			Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	Peningkatan peran masyarakat dan kerjasama antar kawasan perkotaan dalam kerangka pembangunan kawasan perkotaan Mamminasata.	
MISI 6: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana									
6	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	13	Menurunnya Tingkat Pencemaran lingkungan	Peningkatan integrasi antara pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penguatan kelembagaan dan penegakan hukum bidang lingkungan	Penyediaan status mutu udara Daerah	Penyediaan status mutu udara Daerah	Penyediaan status mutu udara Daerah	Penyediaan status mutu udara Daerah	Penyediaan status mutu udara Daerah
					Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah	Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah	Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah	Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah	Penyediaan data kualitas udara ambien Daerah
					Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.	Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.	Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.	Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.	Peningkatan proporsi jumlah industry yang memenuhi baku mutu emisi.

			hidup	Pengendalian kualitas emisdari berbagai macam sumber	Pengendalian kualitas emisdari berbagai macam sumber	Pengendalian kualitas emisdari berbagai macam sumber	Pengendalian kualitas emisdari berbagai macam sumber	Pengendalian kualitas emisdari berbagai macam sumber
--	--	--	-------	--	--	--	--	--

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.	Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.	Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.	Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.	Pengembangan ruang terbuka hijau, termasuk pelestarian dan rehabilitasi hutan mangrove pada wilayah pesisir.
			Penerapan Car Free Day	Penerapan Car Free Day	Penerapan Car Free Day	Penerapan Car Free Day	Penerapan Car Free Day
			Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif	Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif	Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif	Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif	Peningkatan peran sertamasyarakat secara aktif
			Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan	Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan	Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan	Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan	Pengenalan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan
			Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.	Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.	Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.	Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.	Pengendalian pencemaran air secara administrasi, yang meliputi: Penerapan Standard Kualitas Air Sungai, penerapan Baku mutu kualitas air limbah industri, dan Pelaporan hasil pemantauan kualitas air.
			Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.	Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.	Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.	Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.	Penerapan Produksi Bersih, yaitu pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, proaktif, terpadu dan diterapkan secara kontinyu pada setiap kegiatan mulai dari hulu sampai ke hilir yang terkait dengan proses produksi terhadap suatu produk barang atau jasa.
			Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	Penyediaan dan Pengoperasian Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran air utamanya yang berdomisili di sekitar sungai	Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran air utamanya yang berdomisili di sekitar sungai	Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran air utamanya yang berdomisili di sekitar sungai	Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran air utamanya yang berdomisili di sekitar sungai	Penyuluhan terhadap masyarakat akan pentingnya sumber daya air dan bahaya pencemaran air utamanya yang berdomisili di sekitar sungai
			Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah	Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah	Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah	Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah	Penyuluhan melalui jalur pendidikan-pendidikan formal atau sekolah
			Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air	Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air	Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air	Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air	Sosialisasi peraturan mengenai pengendalian pencemaran air
			Pemantauan kualitas tanah	Pemantauan kualitas tanah	Pemantauan kualitas tanah	Pemantauan kualitas tanah	Pemantauan kualitas tanah
			pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah	pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah	pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah	pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah	pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah
			Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat	Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat	Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat	Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat	Publikasi informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat
			Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan	Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan	Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan	Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan	Pemulihan kualitas tanah yang mengalami pecemaran atau kerusakan
			Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutantanaman.	Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutantanaman.	Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutantanaman.	Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutantanaman.	Penetapan kriteria kerusakan lahan pada aktifitas pertanian, perkebunan, dan hutantanaman.
			Penetapan izin lingkungan	Penetapan izin lingkungan	Penetapan izin lingkungan	Penetapan izin lingkungan	Penetapan izin lingkungan

					Peningkatan upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove pada wilayah pesisir	Peningkatan upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove pada wilayah pesisir	Peningkatan upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove pada wilayah pesisir	Peningkatan upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove pada wilayah pesisir	Peningkatan upaya pelestarian dan rehabilitasi mangrove pada wilayah pesisir
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING									
TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN				
					TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
7	Menurunkan resiko bencana	14	Menurunnya resiko akibat bencana	Peningkatan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana.	Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah	Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah	Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah	Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah	Pengarusutamaan resiko bencana kedalam perencanaan pembangunan daerah
					Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.	Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.	Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.	Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.	Pengenalan, pengkajian, dan pemantauan resiko bencana melalui penyusunan peta resiko bencana yang di fokuskan pada wilayah rawan bencana.
					Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.	Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.	Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.	Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.	Pemanfaatan kajian dan peta resiko bencana pada penyusunan rencana aksi Daerah pengurangan resiko bencana.
					Integrasi kajian resiko bencana kedalam RTRW	Integrasi kajian resiko bencana kedalam RTRW	Integrasi kajian resiko bencana kedalam RTRW	Integrasi kajian resiko bencana kedalam RTRW	Integrasi kajian resiko bencana kedalam RTRW
					Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.	Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.	Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.	Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.	Penyusunan Rencana Kontijensi bencana yang mungkin akan terjadi sebagai pedoman kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana.
					Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.	Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.	Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.	Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.	Peningkatan mitigasi bencana dan pelayanan tanggap darurat bencana.
					Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana	Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana dan mitigasi bencana

VISI : MAROS SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERDAYA SAING							
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN			TAHUN 2026	
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024		TAHUN 2025
			Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan	Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan	Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan	Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan	Peningkatan sistem manajemen resiko dan mitigasi bencana kebakaran melalui upaya optimalisasi rekomendasi dan pemantauan berkala proteksi kebakaran pada bangunan, kawasan permukiman, lahan, dan hutan
			Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.	Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.	Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.	Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.	Peningkatan sosialisasi dan desiminasi pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.
			Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pascabencana melalui Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana
			Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.	Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.	Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.	Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.	Pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun mitigasi bencana.
			Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana	Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana
			Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.	Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.	Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.	Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.	Penyediaan sistem dini bencana pada kawasan resiko bencana dan memastikan berfungsinya dengan baik sistem tersebut.

					Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**VISI : MAROS SEJAHTERA,
RELIGIUS DAN BERDAYA
SAING**

TUJUAN	SASARAN	S T R A T E G I	ARAH KEBIJAKAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
			Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana	Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
			Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana	Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana	Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana	Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana	Pembangunan dan pemberian perlindungan bagi prasarana vital yang diperlukan untuk memastikan terlaksananya aktifitas pelayanan publik, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban pada situasi darurat dan pasca bencana
			Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan	Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan	Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan	Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan	Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
			Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat.	Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat.	Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat.	Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat.	Pengembangan Desa tangguh bencana dan gerakan Desa hebat.

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Latar Belakang

Konsep Otonomi Daerah memberikan perwujudan kepada Pemerintah Daerah untuk mengefisienkan pelayanan pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang besar seperti Negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan akses pelayanan dapat ditingkatkan secara terus menerus seiring dengan intensifnya interaksi antara warga dengan pemerintahnya.

Hubungan antara warga selaku konstituen dengan Kepala Daerah yang telah dipilih oleh warganya dalam era demokrasi otonomi dan desentralisasi ini menjadi hubungan yang lebih baik dalam pelayanan maupun kebijakan lainnya. Terkait dengan pelayanan, pada hakekatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang tidak boleh di beda-bedakan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Tetapi, dilain sisi fungsi pelayanan pemerintah pusat hanya dapat diselenggarakan di daerah.

Dari dua pertimbangan di atas, selanjutnya diperintahkan kepada seluruh daerah untuk mewujudkan fungsi pelayanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan kapasitas keuangan negara dan prioritas pembangunan yang ada, maka wujud pelayanan yang diwajibkan di atas merupakan pelayanan yang minimal yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan di daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sehingga pelayanan yang diberikan bukanlah pelayanan yang diorientasikan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar. Sementara bila ada daerah yang lebih mampu memberikan pelayanan yang dapat lebih memuaskan masyarakat, berdasarkan pada kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah tersebut sehingga dikatakan sebagai pelayanan minimal.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota. Untuk urusan Pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar indikator kinerja. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, maka Pemerintah Kabupaten Maros menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang SPM bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang SPM Bidang Sosial Daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Tahun 2008 tentang SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang SPM Bidang Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyusunannya didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Diterapkan pada urusan wajib. Oleh karena itu SPM merupakan bagian integral dari Pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terpadu sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
2. Diberlakukan untuk seluruh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. SPM harus mampu memberikan pelayanan kepada publik tanpa kecuali (tidak hanya masyarakat miskin), dalam bentuk, jenis, tingkat dan mutu pelayanan yang esensial dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
3. Menjamin akses masyarakat mendapat pelayanan dasar tanpa mengorbankan mutu dan mempunyai dampak luas pada masyarakat.
4. Merupakan indikator kinerja bukan standar teknis, dikelola dengan manajerial profesional sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.
5. Bersifat dinamis

c. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintahan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros untuk mencapai sasaran adalah meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SPM yang telah ditetapkan pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Maros untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Maros menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Daerah. Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Organisasi perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

d. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun salah satu kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Maros untuk mendukung pencapaian SPM dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pemerintah daerah yaitu, Program Penyempurnaan Sistem Manajemen Pelayanan Publik dan Program Peningkatan Kapasitas Administrasi Pelayanan Publik.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2022, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja Makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian Kinerja Makro dihasilkan dari berbagai program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari : Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio).



a. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), indeks pendidikan (Angka Melek Huruf, Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak (Daya beli).

Berdasarkan tiga komponen tersebut, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 70,41 dan tahun 2022 sebesar 71,00 dengan perubahan sebesar 0.838%. Peningkatan IPM menunjukkan efektivitas program utama yang menjadi bagian dari pelaksanaan dalam misi pembangunan daerah Kabupaten Maros, yang diantaranya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

KOMPONEN IPM	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Indeks Kesehatan	75,40		
Angka Harapan Hidup	69,04	69,28	
Indeks Pendidikan	63,25		
Rata-rata Lama Sekolah	8,01	8,02	
Harapan Lama Sekolah	13,16	13,30	
IPM	70,41	71,00	0,838%

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2022

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Dengan berbagai program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan maka persentase penduduk miskin di Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 9,57 persen dan tahun 2022 sebesar 9,43 persen dengan perubahan sebesar -1,46%.

Pencapaian Angka Kemiskinan Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Kemiskinan Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Angka Kemiskinan %	9.57	9,43	- 1,46

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2022

Kinerja penanggulangan kemiskinan ini tidak lepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Maros dalam mendorong perekonomian daerah. Program yang digalakkan di Kabupaten Maros untuk mengatasi kemiskinan diantaranya bedah rumah, pengembangan ekonomi produktif, dan penyediaan sarana air bersih.

c. Angka Pengangguran

Masalah pokok ketenagakerjaan yang terjadi adalah produktifitas tenaga kerja yang masih rendah dan pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga berdampak terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan perbandingan jumlah penduduk usia kerja yang menganggur dengan banyaknya angkatan kerja.

Angka Pengangguran di Kabupaten Maros pada tahun 2021 sebesar 6.30% dan pada tahun 2022 sebesar 5,04% dengan perubahan sebesar -20,06%.

Pencapaian Pengangguran di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Angka Pengangguran Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Angka Pengangguran %	6,30	5,04	-20,025%.

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2022

d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk domestik regional bruto (PDRB) adalah besarnya produk domestik bruto (PDB) suatu daerah. Produk domestik regional bruto menyajikan data series PDB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000, yang disajikan dalam nilai rupiah maupun



persentase, berdasarkan data beberapa tahun terakhir baik data yang dihimpun secara langsung (data primer) maupun data yang dikutip dari administrasi Instansi/Dinas/Lembaga Pemerintah maupun swasta (data sekunder). Struktur perekonomian di suatu daerah dicerminkan oleh kontribusi/peranan nilai tambah masing-masing sektor terhadap total PDRB, pergerakan sektor-sektor yang memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB akan sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan dimana telah melampaui dari target pada RPJMD Kabupaten Maros. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 mengalami perlambatan sebesar 1,36 persen dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 9,13 persen dengan perubahan sebesar 571,32%.

Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2022	
Pertumbuhan Ekonomi %	1,36	9,13	571,32

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2022

e. Pendapatan Per Kapita

PDRB perkapita adalah untuk mengetahui peningkatan kemakmuran/kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data yang ada terkait dengan PDRB perkapita Kabupaten Maros terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2021 PDRB perkapita sebesar Rp. 19.005.000,- dan terakhir pada tahun 2022 sebesar Rp. 391.489,- yang artinya bahwa kondisi kemakmuran Masyarakat mengalami tren peningkatan yang positif.

Pencapaian PDRB Per Kapita di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.



**PDRB Perkapita Tahun 2021-2022
Kabupaten Maros**

Uraian	2021	2022	Perubahan %
Nilai PDRB (Juta Rp.)	19,005,000	23.544.300	
Jumlah Penduduk (jiwa)	396,924	391.489	
PDRB perkapita (Juta Rp/ Jiwa)	47,88	60,14	25,60%

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2022

f. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Indeks Gini/koefisien Gini adalah untuk mengukur tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan data bahwa tingkat pemerataan pendapatan di Kabupaten Maros berada pada ketimpangan rendah berdasarkan koefisien Gini pada 2021 sebesar 0,365 dan tahun 2022 sebesar 0,362 dengan perubahan sebesar -0,82%.

Pencapaian Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Maros dapat dilihat pada Tabel di bawah.

**Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Kabupaten Maros
Tahun 2021 – 2022**

URAIAN	TAHUN		Perubahan %
	2021	2021	
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) %	0,365	0,362	-0,82%

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2022

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan implementasi pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (desentralisasi).

Kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan pilihan tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan



menyusun program dan kegiatan terkait dengan masing-masing urusan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) pelaksana urusan.

Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2022, telah menyusun program dan kegiatan serta telah mengalokasikan sumber daya berupa dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan desentralisasi. Keberhasilan pelaksanaan urusan desentralisasi tersebut dapat dinilai dari tingkat pencapaian program dan kegiatan yang diukur dari tingkat capaian urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dari masing-masing urusan.



2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PENDIDIKAN	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta	182 PAUD	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	984 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (DIV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	185 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD nonformal dari lembaga pemerintah	163 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD = 236 SMP=70 304	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	10.101 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	9.182 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	19.795 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	8.524 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.556 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	857 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	2.556 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	1.521 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	2.291 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	857 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	310 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	257 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1.277 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	585 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	228 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	28 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	11 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah tenaga penunjang lainnya	84 Orang	DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	164 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	125 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	121 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	228 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	KESEHATAN	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2 RS	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2 RS	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	6	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.206	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	5	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.165	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1.276	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1276	DINAS KESEHATAN	
Jumlah dukungan		DINAS			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		logistik kesehatan yang tersedia	3	KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1235	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	3	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1235	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	541	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	7	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	564	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	4	DINAS KESEHATAN	
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	564	DINAS KESEHATAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN																
1	2	3	4	5	6																
3	PEKERJAAN UMUM	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten																
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten																
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten																
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten																
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	0	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten																
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : <table border="1" data-bbox="643 1686 1050 2033"> <tr> <td>i. Bangunan perkuatan tebing (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii. Tanggul sungai (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>iii. Kanal banjir (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>vii. Breakwater (m)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)</td> <td></td> </tr> </table>	i. Bangunan perkuatan tebing (m)		ii. Tanggul sungai (m)		iii. Kanal banjir (m)		iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)		v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)		vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)		vii. Breakwater (m)		viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten
i. Bangunan perkuatan tebing (m)																					
ii. Tanggul sungai (m)																					
iii. Kanal banjir (m)																					
iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)																					
v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)																					
vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)																					
vii. Breakwater (m)																					
viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)																					
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS	-	DINAS PEKERJAAN UMUM,	Tidak Terdapat Wilayah																



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		kewenangan kabupaten/kota (ha)		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Sungai Kewengan Kabupaten
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/ kota (m)	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	-	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai Kewengan Kabupaten
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah kabupaten/kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m)	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN	Tidak Terdapat Wilayah Sungai



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		kabupaten/kota	ii. Tanggul sungai (m)		RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Kewengan Kabupaten
			iii. Kanal banjir (m)			
			iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit)			
			v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas)			
			vi. Polder/Kolam Retensi (Unit)			
			vii. Breakwater (m)			
			viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)			
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) X100%	82,72%		
			Panjang jaringan irigasi primer (m) 100.114 X100%			
			121.032			
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) X100%	80,32%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Panjang jaringan irigasi sekunder (m) 55.741 X100%			
			69.402			
		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Irigasi Tersier merupakan kewenangan Provinsi
			Panjang jaringan irigasi tersier (m) 0 X100%			
			0			
		Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				PERTANAHAN	
		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain	0	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	94.528	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	275	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	94.803	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	15	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	94.803		PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} < 25 \text{ jiwa/ha}}$	X100 %	95,24%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			94.528	X100 %		
			99.249			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun} > 25 \text{ jiwa/ha}}$	X100 %	0%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			0	X100 %		
			0			
		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{Rumah di wilayah pengembangan SPALDT}}$	X100 %	4,10%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			275	X100 %		
			6.704			
		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{Rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}}$	X100 %	1,61%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			1.464	X100 %		
			90.907			
		Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}}$	X100 %	100%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			2	X100		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
				%	HAN	
			2			
		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$	X100 %	12%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			6	X100 %		
			50			
		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota}} \times 100\%$	X100 %	4,1%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			275	X100 %		
			6.704			
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot (m)}}{\sum \text{Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	X100 %	0,02%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			15	X100 %		
			94.528			
		Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)}} \times 100\%$	X100 %	100%	DINAS PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			4.778	X100 %		
			4.778			
		Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	4.778			PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada			PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
		Penetapan Keputusan	Ada			PEKERJAA N UMUM,



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	3.675 Bangunan	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	8 Unit Bangunan	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	1.032,13 Km	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang dibangun	1,07 Km	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jembatan yang dibangun	176 Meter	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang ditingkatkan	35,54 Km	PEKERJAAN UMUM,	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		(struktur/fungsi)		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	0 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	39,30 Meter	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Panjang jalan yang dipelihara	8.478 Km	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	650	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	550	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Terselenggaranya Sistem Informasi	1	PEKERJAA N UMUM,	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa	0	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	550	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	550	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		PERTANAHAN	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	NGAN DAN PERTANAHAN PEKERJAA N UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4	PERUMAHAN RAKYAT	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	Belum ada relokasi sesuai rencana aksi	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	245	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
				N HIDUP	
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Ada Program Pemerintah yang berdampak Relokasi Untuk Masyarakat di Tahun 2022
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	17,07 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	393 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	5,36 Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah di kab/kota	91.432 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit PK RTLH	393 Unit	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah tidak layak huni	30.011 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	606 Rumah	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Rasio rumah dan KK	Jumlah KK X100%	DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah total unit rumah	98,03%	PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			89.628	X100%		
			91.432			
		Jumlah rumah pembangunan baru	3.248 Rumah		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	14		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Tidak Ada		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang terregistrasi	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Tidak Ada	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	118		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	5.768		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	5		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	5 PPNS		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	7		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Tersedianya sarana prasarana minimal	136		POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$		100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
			$\frac{1}{1} \times 100\%$				
		Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{\text{Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}}{\text{Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana}} \times 100\%$		23,52%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
$\frac{91.235}{\dots} \times 100\%$							



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			387.984			
		Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			1	100%		
			1			
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	$\frac{\text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun}}{\text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan}} \times 100\%$	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Ada Pembuatan dokumen Renkon
			0	100%		
			0			
		Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			100	100%		
			100			
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	0.03%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			100	100%		
			387.984			
		Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	0,03%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			117	100%		
			387.984			
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan}}{\text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA DAERAH	
			387.984	100%		
			387.984			
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status	$\frac{\text{Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB}}{\text{Jumlah penetapan KLB}} \times 100\%$	0%	BADAN PENANGGU LANGAN BENCANA	Tidak Ada Penetapan



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
		KLB	Jumlah seluruh penetapan status KLB		DAERAH	Status Darurat Bencana	
			$\frac{0}{0} \times 100\%$				
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	$\frac{2}{2} \times 100\%$	0%	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	Tidak Ada Penetapan Status Darurat Bencana
			Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	$\frac{2}{2} \times 100\%$			
		Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{48}{48} \times 100\%$	100%	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
			Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	$\frac{48}{48} \times 100\%$			
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	$\frac{15}{18} \times 100\%$	83,33%	BADAN PENANGGU LANGGAN BENCANA DAERAH	
			Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	$\frac{15}{18} \times 100\%$			
		Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	159 Operasi Penyelamatan 3 Jenis Pelayanan		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada 6 Sektor		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
		Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	60		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Tidak Ada	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Petugas Pemadam Kebakaran yang ditempatkan pada Kelurahan/ Desa di Kab. Maros Tahun 2021 belum tersedia ataupun dibentuk
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	235	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Ada 19 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Ada 181 Orang	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6	SOSIAL	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah data		DINAS	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	10.787	SOSIAL	
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	4 Tim	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	292	DINAS SOSIAL	
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	105	DINAS SOSIAL	
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	3	DINAS SOSIAL	
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	1	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyangang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	61	DINAS SOSIAL	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		memanfaatkan paket perbekalan kesehatan			
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINAS SOSIAL	
		Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	4	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	4	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	61	DINAS SOSIAL	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang	61	DINAS SOSIAL	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		direunifikasi dengan keluarga			
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	49	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	1.015	DINAS SOSIAL	
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	1.015	DINAS SOSIAL	
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	1	DINAS SOSIAL	UPT Rumah Penampungan Trauma Center
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	2	DINAS SOSIAL	paket permakanan khusus bagi kelompok rentan
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	100	DINAS SOSIAL	korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	47	DINAS SOSIAL	

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7	TENAGA KERJA	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota	0	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	$\frac{\text{Realisasi Indikator}}{\text{Target Indikator}} \times 100\%$ $\frac{100}{100} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota	Tidak Ada	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
					P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi kluster	$\frac{\text{Jumlah penerapan Program PBK kualifikasi KKNI atau Okupasi pada tahun n}}{\text{Keseluruhan Program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun kluster pada tahun n}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Instruktur yang bersertifikat pada tahun n}}{\text{Jumlah Instruktur Seluruhnya Pada Tahun n}} \times 100\%$	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			$\frac{144}{144} \times 100\%$			
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{\text{Jumlah Instruktur pada tahun n}}{\text{Jumlah peserta pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	4,15%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			$\frac{141}{3.466} \times 100\%$			
		Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh LPK pada tahun n}} \times 100\%$	20%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			$\frac{4}{20} \times 100\%$			
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{\text{Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n}}{\text{Jumlah LPK yang terdata pada tahun n}} \times 100\%$	95%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
			$\frac{19}{20} \times 100\%$			
		Jumlah penganggur yang dilatih	3.466 Orang	-	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun n}}{\text{Jumlah seluruh lulusan pelatihan pada tahun n}} \times 100\%$	100%	DINAS PENANAMAN N	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah orang yang dilatih pada tahun n			
			3.466	X100%		
			3.466		NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN	
		Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n	X100%		
			Jumlah lulusan pada tahun n		0%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			0	X100%		
			0			
		Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n	X100%	100%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
			Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n			
			3.466	X100%		
			3.466			
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Σ CPMI dilatih	X100%	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN
			Σ CPMI terdaftar			
			0	X100%		
			0			
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Tidak Ada			DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI
		Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	X100%	100%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN
			Jumlah Perusahaan n pada tahun n			
			304	X100%		
			304			
		Data Tingkat Produktivitas Total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)		0,27%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n	X100%	13,24%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTS P DAN KETENAGA KERJAAN
			Jumlah Perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih			
			27	X100%		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			204			
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan yang memiliki serikat Pekerja/ Serikat Buruh}} \times 100\%$		0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			0			
			304			
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	7			DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$		38,81%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			118			
			304			
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$		43,75%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			133			
			304			
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$		5,92%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			18			
			304			
		Jumlah mogok kerja	2			DINAS TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI
		Jumlah penutupan perusahaan	1			DINAS TENAGA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
					KERJA DAN TRANSMIG RASI	
		Jumlah perselisihan kepentingan		18	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		0	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah perselisihan PHK		11	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK		240	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite		2 Kali	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan		1 Kali	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun } n}{\text{Jumlah Perusahaan } n \text{ pada tahun } n} \times 100\%$	5,56%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	
		Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota		1.220	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGA KERJAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	2.149		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Bursa Kerja Khusus(BKK) wilayah kab/kota	1		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	1		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antarkerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	19		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	0		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	341		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	$\frac{\sum \text{CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi}}{\sum \text{CPMI/CTKI}} \times 100\%$		0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN
			$\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	22		DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	$\frac{\sum \text{fasilitasi PMI yang dipulangkan}}{\sum \text{PMI yang pulang}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	$\frac{\sum \text{PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja}}{\sum \text{PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	$\frac{\sum \text{PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan}}{\sum \text{PMI/TKI purna dan keluarganya}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	$\frac{\sum \text{LTSA yang terbentuk}}{\text{Jumlah daerah kantong PMI/TKI}} \times 100\%$	0%	DINAS PENANAMAN NODAL,PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	45 OPD		DP3ADALDUK	
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	240		DP3ADALDUK	
		Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	1		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	1		DP3ADALDUK	Forum Anak
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani}}{\text{Jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab./kota}} \times 100\%$	0,023%	DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	1		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	1		DP3ADALDUK	
		Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	1		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga layanan			DP3ADALDUK	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	1			
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		DP3ADALDUK	
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi	1		DP3ADALDUK	
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan		0,007%	DP3ADALDUK
			Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan			
			$\frac{14}{196.129} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak infrastruktur pergudangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak ada Regulasi yang harga minimum daerah terkait tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	Tidak terdapat kegiatan pengawasan keamanan pangan segar
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
10	PERTANAHAN	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregristrasi $\frac{0}{0} \times 100\%$			
			0			
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee) $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek) $\frac{0}{0} \times 100\%$			
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek $\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun $\frac{0}{0} \times 100\%$			
			0			
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun $\frac{0}{0} \times 100\%$			
0						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Hasil perhitungan kabupaten/kota terhadap : a. Indeks kualitas air (IKA) b. Indeks Kualitas Udara (IKU) c. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA = 55,45 IKU = 87,77 ITH = 53,55	68,13 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	63,146	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota $\times 100\%$ Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi $\frac{34}{43} \times 100\%$	79,07 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota	Jumlah PPLHD yang ada $\times 100\%$ Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota	Jumlah MHA yang diakui $\times 100\%$ Jumlah usulan MHA $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Terasiliasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan $\times 100\%$ Jumlah MHA yang ada $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat $\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani $\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$ Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi $\frac{5}{5} \times 100\%$	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANG AN		
1	2	3	4		5	6		
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan	X100%	43,69 %	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL		
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan					
			79.982	X100%				183.047
		Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta perceraian yang diterbitkan	X100%	47,69 %	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL		
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan					
			2.365	X100%				5.023
		Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL		
			Peristiwa kematian yang dilaporkan					
			8.709	X100%				8.709
		Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun	X100%	100%	DINAS KEPENDUDUK AN DAN PENCATATAN SIPIIL		
			2 tahun					
			2	X100%				2



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	80 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Ada
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	0 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Semua Desa di tahun berjalan sama dengan tahun sebelumnya
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	534	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PKK dan Posyandu
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	65 Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	118 Kelompok Binaan PKK di 56 Desa

N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Tidak Ada	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Terdapat Dokumen GDPK hanya belum diperdakan	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	27 Tahun	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i^f \times k}$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun $b_i = 385$ $p_i^f \times k = 15.450$	28,68 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)}}{\text{Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)}} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			$\frac{364.101}{364.101} \times 100\%$			
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	38 Stakeholders		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{\text{Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP}}{\text{Jumlah faskes}} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			$\frac{25}{25} \times 100\%$			
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	21,99 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			$\frac{6.625}{30.122} \times 100\%$			
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	24 Pokja		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern}}{\text{Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan}} \times 100\%$	100%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			$\frac{2.483}{2.483} \times 100\%$			
		Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	Daftar Desa/Kelurahan yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten/Kota. Data/informasi yang diambil adalah 50% dari total seluruh Desa/Kelurahan dengan persentase kesertaan KB paling rendah		43,68 %	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Persentase kesertaan KB keluarga	$\frac{\text{Jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI}}{\text{Jumlah Keluarga Penerima PBI}} \times 100\%$		DINAS PENGENDALIAN	

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4		5	6
		Penerima Bantuan luran (PBI)	Jumlah Keluarga PBI	94,85 %	N PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
			$\frac{25.410}{26.789} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	X100%	83,33 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	X100%		
			10	12		
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	X100%	42,37 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah kendaraan wajib uji	X100%		
			755	1.782		
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	X100%		
			0	0		
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	X100%	88,67 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
			Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	X100%		
			133	150		
Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota	X100%	9,54%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
	Target kebutuhan perlengkapan Jalan Kabupaten atau Kota	X100%				
	152,64	16				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Perangkat Daerah				
		39	X100%	39		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah Perangkat Daerah				
		39	X100%	39		
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ya, 184		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan instansi Penyelenggara Negara domain dan sub domain sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo No.5 Tahun 2015	X100%	23,08 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah				
		9	X100%	39		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Jumlah perangkat daerah				
55	X100%					



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			55			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	X100%	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			21	X100%		
			39			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	X100%	471,79 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			184	X100%		
			39			
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	X100%	12,82 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			5	X100%		
			39			
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			33	X100%		
			33			
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			184	X100%		
			184			
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan	X100%	53,85	DINAS KOMUNIKASI DAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		layanan pusat data pemerintah	pusat data pemerintah	%	INFORMATIKA	
			Jumlah perangkat daerah			
			21	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data	X100%	53,85 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah			
			21	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah			
			39	X100%		
			39			
		Persentase data yang dapat dibagi pakai	Jumlah data yang dapat dibagi pakai	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah			
			39	X100%		
			39			
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	X100%	15,38 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah perangkat daerah			
			6	X100%		
			39			
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo	X100%	25%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah ASN Pengelola TIK			
			6	X100%		
			24			
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: - Visi Misi Tujuan dan Sasaran - Organisasi - Strategi		1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			<ul style="list-style-type: none"> - Peta Jalan - Arah Kebijakan - Cetak biru teknis/ Peta rencana strategi 		
			2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada	
		Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	$\frac{\Sigma \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP}}{6} \times 100\%$ $\frac{\Sigma \text{Diseminasi dan layanan Informasi Publik}}{6} \times 100\%$	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	X100%	1300%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam					
			26	X100%				
			2	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam tahun yang dilaporkan	X100%	100%
		Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan						
		4	X100%					
		4						
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	X100%	10,56 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN		
			koperasi yang ada					
			38	X100%				
		360		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	X100%	17,72 %
		Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada						
45	X100%							
254		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	X100%	7,5%		
Jumlah koperasi yang ada								
27	X100%							
360		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	X100%	19,17 %		
Jumlah koperasi yang ada								
69	X100%							



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	360			
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{0}{360} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0%			DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	61,11%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{220}{360} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	1,94%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{7}{360} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	0,83%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{3}{360} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pendampingan kelembagaan dan usaha}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{0}{360} \times 100\%$	X100%		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas kemitraan}}{\text{Jumlah koperasi yang ada}} \times 100\%$	X100%	1,67%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			$\frac{6}{360} \times 100\%$	X100%		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		dalam daerah kabupaten/kota	360			
		Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	X100%	11,11 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
	Jumlah wirausaha yang ada					
	30		X100%			
			270			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS)	X100%	27,20 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
	Jumlah usaha mikro yang ada					
	7.442		X100%			
			27.357			
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	X100%	9,92%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
	Jumlah usaha mikro yang ada					
	2.713		X100%			
			27.375			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	X100%	149,85 %	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
	Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk					
	20.380		X100%			
			13.600			
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	X100%	6,49%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
	Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran					
	2.205		X100%			
			31.775			
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	X100%	5,26%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
	Jumlah usaha mikro yang ada					
	1.438		X100%			
			27.357			
		Persentase usaha	Jumlah usaha mikro	X100%		DINAS



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha Jumlah usaha mikro yang ada 4.783 X100% 27.357	17,48 %	KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan kepada investor	Tidak Ada Fasilitas/Intensif	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	Naskah Akademik Perda Telah disusun Tahun 2021 dan Perdanya sudah dibuat 2021 Namun sampai dengan saat ini belum selesai
		Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Intensif penanaman modal	Ada, 1 SOP	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/intensif penanaman modal	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan Pemberian fasilitas/Intensif penanaman modal per tahun	Tidak Ada	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	Belum Tersedia Laporan Karena Belum Selesai Perda yang mengatur
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	Ada, 6 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	0 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Tidak Ada Kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	Tidak dilaksanakan Karena adanya refofusing Anggaran dan Pandemi Covid 19
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	149 Konsultasi	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan non perizinan	1.627 Izin	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat	30.888.623.531.353	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Kabupaten/Kota		DAN KETENAGAKERJAAN	
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	Ada, 10 kegiatan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	141 Perusahaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima	29 Permintaan	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	414 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	414 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	664 Orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	14 orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	157 Orang	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	6 Cabang Olah raga	DINAS PARIWISATA PEMUDAAN DAN OLAHRAGA	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Tersedianya buku profil daerah	Ada, 1		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	26		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	26		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	Tidak Ada		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral}}{\text{Jumlah kegiatan statistik sektoral}} \times 100\%$	34,09 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{15}{44} \times 100\%$			
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	$\frac{\text{Jumlah metadata indikator statistik sektoral}}{\text{Jumlah indikator statistik sektoral}} \times 100\%$	47,55 %	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			$\frac{97}{204} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
21	PERSANDIAAN	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	X100%	0%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	X100%		
			0	X100%		
			14			
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi persandian	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada	X100%		
			33	X100%		
			33			
		Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah Sistem Elektronik (SE) atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah Sistem Elektronik (SE) yang ada	X100%		
			33	X100%		
			33			
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Jumlah titik pada Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS)	X100%		
			50	X100%		
			50			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan	335 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya)	233 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	233 Obyek PK	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi+ Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar Jumlah CB diselamatkan = Jumlah CB diamankan = Jumlah CB dizonasi = Jumlah CB dipelihara = Jumlah CB dipugar =	335 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Layanan perijinan membawa cagar budaya kabupaten ke luar kabupaten dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	3 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pengembangan cagar budaya kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	40 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah CB diteliti = 0 Jumlah CB direvitalisasi = 0 Jumlah CB diadaptasi = 0			
		Pemanfaatan cagar budaya kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	233 Cagar Budaya	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	225	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
			Jumlah koleksi museum dikelola = 5 Jumlah koleksi museum diamankan = 4 Jumlah koleksi museum dikembangkan = 4 Jumlah koleksi museum dimanfaatkan = 4			
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	2.089 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum	Jumlah partisipasi dalam pengelolaan museum	1.650		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	225		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	14 Tim	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Pembentukan tim ahli cagar budaya kabupaten	Jumlah pembentukan tim ahli CB	5 Tim Ahli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	5 Orang Ahli	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah SDM Museum	5 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	5 Orang	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) Sarana dan prasarana CB Sarana dan Prasarana Museum	3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	16 Kegiatan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
23	PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) X100%	66,74 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 259.993 X100%					
		391.489					
		Persentase pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan perpustakaan yang memanfaatkan perpustakaan secara online maupun onsite X100%	10,45 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 40.708 X100%					
		391.489					
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya X100%	0,22%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
		Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) 871 X100%					
		391.489					
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan X100%	59,53 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya 278 X100%							
467							
Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	61,78		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Tidak Ada		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				
Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	2		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip aktif	X100%			
		1.107	X100%			
		1.107				
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip in-aktif	X100%			
		2.545	X100%			
		2.545				
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan daftar arsip	X100%	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Jumlah seluruh arsip statis	X100%			
		98	X100%			
		98				
Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	X100%	0%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten	X100%					
0	X100%					
0						
Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip		53.016	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		600	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di Kabupaten/Kota	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah		658	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik		98	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		
Pencarian arsip statis yang pengelolaannya	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala		Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKA		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)		AN DAN KEARSIPAN	
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/ Kota yang sesuai NSPK	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Tidak Ada	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
25	PERIKANAN	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	26 Rumah Tangga		DINAS PERIKANAN	
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{\text{Jumlah TPI yang operasional}}{\text{Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	100%	DINAS PERIKANAN	
			$\frac{1}{1} \times 100\%$			
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Tidak Ada		DINAS PERIKANAN	Semua izin usaha di Kabupaten Maros diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	538 Orang		DINAS PERIKANAN	
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	200.000 Ekor		DINAS PERIKANAN	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
26	PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	3 Entitas		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	42		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/ kota	0 Tanda Daftar Usaha		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	1.024 Orang		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri (Bisa sebagai peserta atau penyelenggara)	70 Kali		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/ kota	Tidak Ada		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	22		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	142,86 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			Jumlah tenaga kerja pariwisata	$\frac{280}{196} \times 100\%$			
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	7,69%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{280}{3.640} \times 100\%$						
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	10 Lokasi		DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	Kecamatan	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
27	PERTANIAN	Jumlah Sarana dan prasarana pertanian yang diberikan	61		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Prasarana pertanian yang digunakan	48		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi izin usaha pertanian	9	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
		Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	X100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Jumlah prasarana yang dibangun	100%		
			$\frac{48}{48} \times 100\%$			
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	X100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			usulan usaha pertanian	90%		
			$\frac{9}{10} \times 100\%$			
		Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	X100%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Luas area terkena bencana	100%		
			$\frac{25.532,98}{25.532,98} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN										
1	2	3	4		5	6										
28	PERDAGANGAN	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 353 903 546"> Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja </td> <td data-bbox="903 353 1062 546"> $\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}$ </td> <td data-bbox="1062 353 1158 1106" rowspan="2">50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 546 903 770"> $\frac{0}{0}$ </td> <td data-bbox="903 546 1062 770"> $\frac{0}{0} \times 100\%$ </td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 770 903 1106"> Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja </td> <td data-bbox="903 770 1062 1106"> $\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}$ </td> <td data-bbox="1062 770 1158 1106" rowspan="2">50%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1106 903 2076"> $\frac{0}{0}$ </td> <td data-bbox="903 1106 1062 2076"> $\frac{0}{0} \times 100\%$ </td> </tr> </table>	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}$	50%	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}$	50%	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}$	50%														
$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$															
Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan} \times 100}{\text{Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar}}$	50%														
$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$															
		Persentase penerbitan TDG	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1106 903 1234"> Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja </td> <td data-bbox="903 1106 1062 1234"> $\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \times 100}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}}$ </td> <td data-bbox="1062 1106 1158 1346" rowspan="2">100%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1234 903 1346"> $\frac{5}{5}$ </td> <td data-bbox="903 1234 1062 1346"> $\frac{5}{5} \times 100\%$ </td> </tr> </table>	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \times 100}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}}$	100%	$\frac{5}{5}$	$\frac{5}{5} \times 100\%$		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \times 100}{\text{Jumlah permohonan penerbitan TDG}}$	100%														
$\frac{5}{5}$	$\frac{5}{5} \times 100\%$															
		Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1346 903 1458"> Jumlah penerbitan TDG </td> <td data-bbox="903 1346 1062 1458"> $\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \times 100}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}}$ </td> <td data-bbox="1062 1346 1158 1570" rowspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1458 903 1570"> $\frac{5}{0}$ </td> <td data-bbox="903 1458 1062 1570"> $\frac{5}{0} \times 100\%$ </td> </tr> </table>	Jumlah penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \times 100}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}}$	0%	$\frac{5}{0}$	$\frac{5}{0} \times 100\%$		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Jumlah penerbitan TDG	$\frac{\text{Jumlah penerbitan TDG} \times 100}{\text{Jumlah gudang yang ada di Kab/Kota}}$	0%														
$\frac{5}{0}$	$\frac{5}{0} \times 100\%$															
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="639 1570 903 1973"> Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar </td> <td data-bbox="903 1570 1062 1973"> $\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \times 100}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}}$ </td> <td data-bbox="1062 1570 1158 2076" rowspan="2">0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="639 1973 903 2076"> $\frac{0}{0}$ </td> <td data-bbox="903 1973 1062 2076"> $\frac{0}{0} \times 100\%$ </td> </tr> </table>	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \times 100}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}}$	0%	$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$		DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN						
Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit} \times 100}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri}}$	0%														
$\frac{0}{0}$	$\frac{0}{0} \times 100\%$															



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri}} \times 100\%$	0%		
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	$\frac{\text{Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit } \leq 2 \text{ hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar}}{\text{Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri}} \times 100\%$	0%		
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota}}{\text{Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah KA yang terbit } \leq 1 \text{ hari kerja (1x24 jam)}}{\text{Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	$K = (a + b) \times 100\%$ <p>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</p>	0%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5) a = 0 b = 0			
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	15%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$x = \frac{a}{b \times c} \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b=Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c= RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)		190,90%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
			a = 47.92 5,97			
			b = 11.89 1,7			
			c = 13.21 3			
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan X100% Jumlah potensial UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab./kota X100% $\frac{561}{1.543}$	36%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	
		Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku X100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan X100% $\frac{11}{337}$	3%	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
29	PERINDUSTRIAN	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%) Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK		100%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{370}{370} \times 100\%$	100%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IPIU) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	$\frac{\text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Ada Izin Perluasan Industri yang diterbitkan 2022
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0			DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/	$\frac{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kab./Kota yang masuk dalam SIINas}}{\text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/}} \times 100\%$		0,54%	DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/ Kota	Total populasi perusahaan industri		PERDAGANGAN	
			$\frac{2}{370} \times 100\%$			



N O	URUSAN PEMERINTAH AN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTPUT)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANG AN
1	2	3	4	5	6
30	TRANSMIGRA SI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	6	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		Jumlah satuan pemukiman yang dibina	150	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	X100%	85,22 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan					
			13.015	X100%				15.272
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	X100%	102,80 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan					
			48.841	X100%				44.592
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	X100%	108,66 %	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten yang bersangkutan					
			21.619	X100%				21.614
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	X100%	100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten yang bersangkutan					
			420	X100%				420



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	$\frac{\text{Jumlah Daya tampung Rumah Sakit Rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	$\frac{285}{389.580} \times 100\%$	0.073 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	$\frac{2}{2} \times 100\%$	100%	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{\text{Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan}}{\text{Jumlah Ibu Hamil di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	$\frac{6.535}{6.434} \times 100\%$	101,57 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Persalinan}}{\text{Jumlah Ibu Bersalin di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	$\frac{6.584}{6.434} \times 100\%$	102,33 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Bayi Baru Lahir di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	$\frac{6.533}{3.331} \times 100\%$	196,12 %	DINAS KESEHATAN
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah Balita di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$	$\frac{29.341}{40.257} \times 100\%$	72,88 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar}} \times 100\%$		133,75 %	DINAS KESEHATAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota $\frac{59.644}{44.592} \times 100\%$			
		Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{140.280}{250.786} \times 100\%$		55,93 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{23.381}{36.689} \times 100\%$		63,728 1%	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{8.872}{24.315} \times 100\%$		36,488 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita DM di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{1.714}{2.041} \times 100\%$		71,387 %	DINAS KESEHATAN
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar $\frac{\text{Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar}}{\text{Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ $\frac{823}{871} \times 100\%$		94,489 %	DINAS KESEHATAN



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	X100%	DINAS KESEHATAN	
	95,182 %					
			Jumlah penderita TBC di Kabupaten / Kota	X100%	DINAS KESEHATAN	
			5.433	X100%		
			5.708			
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	X100%	DINAS KESEHATAN	
	100,64 %					
			Jumlah Balita di Kabupaten / Kota	X100%		
			8.175	X100%		
			8123			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN		
1	2	3	4		5	6		
3	PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	X100%	1				
		1	X100%	1				
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	Tidak Terdapat Wilayah Kewenangan Kabupaten	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	X100%	1				
		1	X100%	1				
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)	X100%	81,45 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
		Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kotaluas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota	X100%	4.953,16				
		6,081	X100%	6,081				
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	X100%	81,61 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN		
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	X100%	80.999				



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			99.249			
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD)}}{\text{Jumlah rumah di Kabupaten Kota}} \times 100\%$	99,65 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			98.900	X100%		
			99.249			
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah IMB yang berlaku}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			4.778	X100%		
			4.778			
		Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota}} \times 100\%$	77,104 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			795,81	X100%		
			1.032,13			
		Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis}}{\text{Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	60,573 %	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			550	X100%		
			908			
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			214	X100%		
			214			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
4	PERUMAHAN RAKYAT	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	$\frac{245}{245} \times 100\%$	100%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	$\frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0%	Tidak ada program kegiatan terkait pada Tahun 2022
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha}} \times 100\%$	$\frac{5,36}{17,07} \times 100\%$	31,4%	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah tidak layak huni}}{\text{Jumlah total unit rumah kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{30.011}{91.432} \times 100\%$	32,823 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	$\frac{\text{Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah unit rumah kab/kota}} \times 100\%$	$\frac{1.656}{91.432} \times 100\%$	1,811 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			$\frac{118}{118} \times 100\%$			
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100\%$	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
			$\frac{5}{5} \times 100\%$			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	387.984 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	387.984 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	15 Orang		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	<p>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas</p>	72%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota $\frac{36}{50} \times 100\%$			
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran $\frac{668}{50}$	13,36 Menit	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti X100%	100%	DINAS SOSIAL	
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis $\frac{305}{305} \times 100\%$			
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran X100%	100%	DINAS SOSIAL	
			Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota $\frac{1.015}{1.015} \times 100\%$			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	X100%	10,526 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten	X100%		
			2	19		
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	X100%	27,983 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah tenaga kerja keseluruhan	X100%		
			3.466	12.386		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	X100%	190088 ,00%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah tenaga kerja	X100%		
			23.544.300	12.386		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	X100%	43,75 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
			Jumlah Perusahaan	X100%		
			133	304		
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	X100%	15,868 %	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		
	Jumlah pencaker yang terdaftar	X100%				
	341	2.149				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja langsung APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja langsung di APBD}} \times 100\%$ $\frac{9.9906.974.802}{1.449.473.299.517} \times 100\%$	6,893 %	DP3ADALDUK	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi}}{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $\frac{30}{30} \times 100\%$	100%	DP3ADALDUK	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$ $\frac{14}{196.129} \times 100\%$	7,138 %	DP3ADALDUK	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan X100%		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
Jumlah kebutuhan pangan 15.868,3 X100%	364,91 4%					
4.348,5						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Seluruh luas tanah yang diberikan ijin lokasi				
			0	X100%			0
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Luas penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum				
			0	X100%			0
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Luas izin lokasi yang diterbitkan				
			0	X100%			0
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek land reform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah penerima tanah obyek landreform				
			2.250	X100%			2.250
		Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah	X100%	0%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Luas izin membuka tanah yang diterbitkan				
			0	X100%			0
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	X100%	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
			Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan				
			1	X100%			1



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH Kab/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%). IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan IKA = 55,54 IKU = 87,77 IKL = 53,55		68,13 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	$\frac{\text{Total volume sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total volume timbunan sampah kabupaten/kota}} \times 100\%$ $\frac{102.532}{162.374} \times 100\%$		63,146 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	$\frac{\text{Jumlah penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota}}{\text{Usaha dan atau kegiatan dilakukan pemeriksaan}} \times 100\%$ $\frac{5}{14} \times 100\%$		35,714 %	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	X100%	96,67 %	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah penduduk 17 tahun ke atas			
			267.254	X100%		
		Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	X100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah anak usia 0-17 tahun	X100%		
			25.967	X100%		
		Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	X100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah anak usia 0-18 tahun	X100%		
			123.535	X100%		
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	X100%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
			Jumlah OPD	X100%		
			5	X100%		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun	50%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			X100%				
			Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)				
		1	X100%	2		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	31,707 %				
		X100%					
Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)							
13	X100%	41					



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
14	PENGENDALIAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,57 Per Perempuan Usia 15 -49 tahun		DP3ADALDUK	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern	X100%	DP3ADALDUK	
			Jumlah Pasangan Usia Subur	50,487 %		
			28.591	X100%		
		Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tidak terlayani	X100%	DP3ADALDUK	
			Jumlah Pasangan Usia Subur	48,806 %		
			27.639	X100%		
			56.630			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) IK1 = 0,78 Bobot angkutan jalan = 7 IK2 = 0.35 Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan = 0,3	0,66	DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	9,54		DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	X100%	100%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
			Jumlah OPD	X100%		
			39	39		
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi	X100%	84,615 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
			Jumlah layanan publik	X100%		
			33	39		
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	X100%	70,531 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
			Jumlah penduduk	X100%		
			274.773	389.580		



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	X100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah seluruh koperasi	X100%			18,33 %
			66	X100%			
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	X100%	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		
			Jumlah usaha mikro keseluruhan	X100%			0,11%
			30	X100%			
27.357							



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten /Kota	Jumlah investasi tahun n - Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN KETENAGAKERJAAN	
		-2,89%				
-921.225.458.647	$\frac{\quad}{\quad} \times 100\%$	31.809.848.990.000				



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten/kota	X100%	0.424 %	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			414	97.713		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	X100%	0.68%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
			Jumlah pemuda (16-30 tahun) di kabupaten/kota	X100%		
			644	97.713		
Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional		1 Medali	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Medali Perunggu Kejuaraan Nasional Karate Tahun 2022	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
20	STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	64,103 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			X100% Jumlah OPD 25			
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan pembangunan daerah	64,103 %	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
			X100% Jumlah OPD 25			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi X100%	5480%	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Jumlah area penilaian				
		274 X100%	5			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	X100%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Jumlah cagar budaya yang terdata		69,55 %				
233	X100%					
233						



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	61,78	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) . UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan . UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{AM} \times 100$ UPLM 1= 45 UPLM 2= 36.887 UPLM 3= 100 UPLM 4= 16.181 UPLM 5= 35 UPLM 6= 3.248 UPLM 7= 4.053	32,46 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$ <p>T = Tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN</p> <p style="text-align: right;">a = 1.107 i = 2.545 s = 98 j = 0</p>	75%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kab.yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p> <p style="text-align: right;">m = 0 b = 0 g = 0 a = 0 c = 0 i = 0</p>	90,62 %	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
25	PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	48.634,4 Ton	110.295 Ton	DINAS PERIKANAN	
			44.095 Ton			



N O	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	6726,67%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			$\frac{1.009}{15} \times 100\%$			
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Jumlah wisatawan tahun n} - \text{jumlah wisatawan tahun n-1}}{\text{Jumlah wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$	623,17%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			$\frac{408.218}{65.507} \times 100\%$			
		Tingkat Hunian Akomodasi	$\frac{\text{Jumlah kamar yang terjual}}{\text{Jumlah kamar yang tersedia}} \times 100\%$	40,245%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
			$\frac{79.030}{196.370} \times 100\%$			
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		0,38%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		1,73%	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA			



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN	
1	2	3	4		5	6	
27	PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	X100%	560,371%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
			Luas panen				
			237.535,84	X100%			42.389
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun berjalan - jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya	X100%	70,483%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	
jumlah kejadian /kasus penyakit hewan tahun sebelumnya							
2.001	X100%		2.839				



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
28	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	0%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{\text{Realisasi RDKK}}{\text{47.925,97}} \times 100\%$	115,689%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota}} \times 100\%$	36,358%	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			$\frac{561}{1.543} \times 100\%$			



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
29	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021 - Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 $\times 100\%$	1508,696 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 Jumlah IKM 2021 = Jumlah IKM 2020 = 173				
		$\frac{347}{23} \times 100\%$				
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)% Untuk masing-masing penilaian indikator adalah persentase capaian indikator dibagi target dikali (100/N)% Nilai akhir adalah akumulasi dari N indikator tersebut	100 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan $\frac{85}{370} \times 100\%$	22,97%		DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan $\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan $\times 100\%$ Jumlah izin yang dikeluarkan $\frac{0}{0} \times 100\%$	0 %	DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Terdapat Kawasan Industri Di Kabupaten Maros		
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%)			DINAS KOPERASI, UKM		



NO	URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN			
1	2	3	4	5	6			
		terkini	<p>- Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)</p> <p>- Tidak menyampaikan informasi industri (0%)</p> <p>2) Kelengkapan informasi industri meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">- Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) <p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p> <table border="1" data-bbox="639 703 1158 792"><tr><td data-bbox="639 703 1070 741">1) Keterkinian informasi industri = 5%</td><td data-bbox="1070 703 1158 741" rowspan="2">150%</td></tr><tr><td data-bbox="639 741 1070 792">2) Kelengkapan informasi industri = 5%</td></tr></table>	1) Keterkinian informasi industri = 5%	150%	2) Kelengkapan informasi industri = 5%	PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
1) Keterkinian informasi industri = 5%	150%							
2) Kelengkapan informasi industri = 5%								



2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
1	PERENCANAAN DAN KEUANGAN	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	$\frac{\text{Jumlah Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah APBD}} \times 100\%$ $\frac{224.397.654.924}{1.435.670.137.122} \times 100\%$	15,63 %	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Rasio PAD	$\frac{\text{Jumlah PAD}}{\text{Jumlah PDRB Non Migas}} \times 100\%$ $\frac{266.637.121.347,16}{1.517.257.948.614} \times 100\%$	17,57 4%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 3	INSPEKTORAT	
		Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{\text{Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures}}{\text{Jumlah belanja APBD}} \times 100\%$ $\frac{946.741.404.662}{1.435.670.137.122} \times 100\%$	65,94 4%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
		Opini Laporan Keuangan	2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022	DISCLAIMER WDP WDP WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
2	PENGADAAN	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	$\frac{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}}{\text{Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021}} \times 100\%$	0%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
			Jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022 $\frac{0}{0} \times 100\%$			
		Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	$\frac{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif}}{\text{Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan tanpa kompetitif}} \times 100\%$ $\frac{315}{338} \times 100\%$		90,78 5%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{\text{Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja langsung}} \times 100\%$ $\frac{340.993987.474,97}{363.281.909.226,00} \times 100\%$		93,86 2%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
		Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	$\frac{\text{Jumlah Nilai PBJ yang menggunakan Produl Dalam Negeri, Produk Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n)-Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dalam Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)}} \times 100\%$ $\frac{576.309.642.054}{1153050555915} \times 100\%$		49,98 1%	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA
3	KEPEGAWAIAN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai menurut pendidikan PT ke atas}}{\text{Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA/ke bawah}} \times 100\%$ $\frac{1.899}{1.058} \times 100\%$		179,4 9%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{\text{Jumlah pegawai PNS/Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)}}{\text{Total pegawai}} \times 100\%$		15,89 5%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETERANGAN				
1	2	3	4	5	6				
		kesehatan)	Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\frac{512}{2.957} \times 100\%$	AN SUMBER DAYA MANUSIA					
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi $\times 100\%$ Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) $\frac{239}{258} \times 100\%$	92,63 6% BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
4	MANAJEMEN KEUANGAN	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi}}{\text{Total belanja APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$ <table border="1" data-bbox="639 1144 1171 1272"> <tr> <td>Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =</td> <td>1.435.670.137.122</td> </tr> <tr> <td>Total belanja APBD =</td> <td>1.558.038.658.286</td> </tr> </table>	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =	1.435.670.137.122	Total belanja APBD =	1.558.038.658.286	7,854 % BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi =	1.435.670.137.122								
Total belanja APBD =	1.558.038.658.286								
		Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left[\left(\frac{\text{Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi}}{\text{Total PAD dalam APBD}} \right) - 1 \right] \times 100\%$ <table border="1" data-bbox="639 1518 1171 1644"> <tr> <td>Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =</td> <td>266.637.121.347,16</td> </tr> <tr> <td>Total PAD dalam APBD =</td> <td>300.275.072.614</td> </tr> </table>	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =	266.637.121.347,16	Total PAD dalam APBD =	300.275.072.614	11,20 24% BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	
Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi =	266.637.121.347,16								
Total PAD dalam APBD =	300.275.072.614								
		Asset Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH				
		Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	$\frac{\text{Nilai realisasi SILPA}}{\text{Total belanja anggaran tahun sebelumnya}} \times 100\%$ $\frac{50.654.167.776,16}{1.213.365.604.137,7} \times 100\%$	4,175 % BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					



N O	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA		SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4		5	6
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	X100%	0%	KOMINFO
			Realisasi belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	X100%		
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda	X100%	100%	KOMINFO
			Total jumlah dokumen yang telah dirinci	X100%		

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian kinerja Kabupaten Maros tahun 2022 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Utama Kabupaten Maros tahun 2022 dalam Perjanjian Kinerja. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Perhitungan Capaian Kinerja diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100\%$$

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama tahun 2022 ini merupakan lanjutan dari rangkaian tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2021 - 2026. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros tahun 2022 diuraikan berdasarkan sasaran tiap-tiap misi.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten



Maros tahun 2022 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Maros 2021 - 2026. Ini berarti, dokumen RKPD Tahun 2022 merupakan tahun pertama penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maros 2021 -2026.

Sejumlah sasaran strategis yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maros dapat dicapai melalui pencapaian target indikator program dan kegiatan berdasarkan tugas, pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2021 - 2026 dan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2022 melaksanakan **178 (seratus tujuh puluh delapan) program prioritas**. Adapun sasaran dan indikator sasaran serta indikasi program dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 meliputi :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Maros

MISI 1			
MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prioritas Pembangunan 1 : Pemantapan Ekonomi Daerah Yang berbasis Pada Ekonomi Kreatif, Industri Kecil menengah, UKM, Pariwisata dan Pertanian			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB	7,66 Persen
2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	46,48 Rp/Jiwa
3	Meningkatnya Pendapatan Daerah	Tingkat Kemandirian Kabupaten	17,28
4	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja	Produktifitas Total Daerah	72,49
5	Terkendalinya Inflasi Daerah	Laju Inflasi	1,94
6	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	7,00
Prioritas Pembangunan 2 : Pemantapan Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Layanan Sosial Dasar Masyarakat Dan Usaha Ekonomi Produktif.			
5	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0,370 Persen
6	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan	90,63
MISI 2			
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
Prioritas Pembangunan 3 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60,20 IRB



2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5 IKM
MISI 3			
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT			
Prioritas Pembangunan 3 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan Pilkada, Penciptaan Kondusifitas Wilayah dan Pemenuhan Target Standar Pelayanan Minimal			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan dan Anak	Angka Kriminalitas Tertangani	0,183
Prioritas Pembangunan 4 : Pemantapan Kualitas SDM Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Gizi, Pengarusutamaan Gender dan Pengendalian Penduduk			
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	70,14 IPM
2	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89,5 IPG 72,73 IDG
3	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	85,71 Persen
4	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,04 Persen
MISI 4			
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN			
Prioritas 5 Pembangunan Tahun 2021 : Pemantapan Daya Saing Wilayah Melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan, Ketaatan Terhadap Tata Ruang Wilayah, pembangunan Wilayah.			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,65 IPD
2	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni Pembangunan	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,67 IKB
3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	3,58 Persen
MISI 5			
MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM			
Prioritas 6 Pembangunan Tahun 2021 : Pemantapan Daya Dukung Lingkungan Dan SDA Yang Berkelanjutan Melalui pengelolaan Lahan, Sumberdaya Air, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan	Indeks Produksi Sub sektor pertanian	102,05 Nilai Indeks
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,54 IKLH
3	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Resiko Bencana (IRD)	141,35 IRB
MISI 6			
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA			
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Prioritas 6 pembangunan Tahun 2021 : pemantapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru melalui Konektifitas Infrastruktur Transportasi, Komunikasi dan Informasi, Pemerintahan, Pelayanan Dasar dan Ekonomi			
1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,05 Nilai Indeks



2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	3,00 IP-TIK
---	---	---------------------------------	-------------

b. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama.

➤ Capaian Kinerja Sasaran

Adapun pengukuran kinerja dilakukan terhadap target tahunan yang dilakukan analisis terkait program dan kegiatan yang mendukung atau menghambat keberhasilan serta permasalahan dan solusi atas keberhasilan capaian tersebut sebagai berikut :

- 1) Misi 1 : Meningkatkan perekonomian Daerah
Tujuan : Mewujudkan pembangunan Ekonomi Daerah yang berkualitas

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Pemerintah
Kabupaten Maros Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Persentase Pertumbuhan PDRB	-1,81 %	1,36 Persen	175,14	ST
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	46,48 Rp/Jiwa	47,88 Rp/Jiwa	103,01	ST
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	17,28 Persen	16,32 Persen	16,32	ST
	Terkendalnya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	1,94 Persen	0,92 persen	210,87	ST
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,63 Persen	90,43 Persen	99,78	ST
	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat	Rasio Gini	0,370 Rasio	0,365 Rasio	99,46	ST



Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja	Produktifitas Total Daerah	72,49	77,19	106,48	ST
---	----------------------------	-------	-------	--------	----

Sasaran meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan untuk data tingkat pengangguran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.3.6
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

No	KARAKTERISTIK	TAHUN			
		2018	2019	2020	2021
1	Penduduk Usia kerja	249.456,00	252.588,00	266.630,00	160.661,00
2	Angkatan kerja	143.250,00	159.217,00	166.446	160.661
	a. Bekerja	133.998,00	151.722,00	155.993	150.533
	b. Pengangguran	9.253,00	7.495,00	10.453	10.128

Penduduk Usia Kerja Pada Kabupaten Maros pada tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 penduduk usia kerja 266.630 jiwa sedangkan tahun 2021 penduduk usia kerja 160.661 jiwa, dan jumlah pengangguran menurun dari 10.453 jiwa menjadi 10.128 jiwa.

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Miskin

Uraian	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk Miskin	34.850	34.620	34.110	
Tingkat Kemiskinan Maros	9,89	9,74	9,57	
Garis Kemiskinan Maros	405.944	414.342	424.637	
Indeks Kedalaman (P1) Maros	2,50	1,45	1,61	
Indeks Keparahan (P2) Maros	0,89	0,34	0,41	
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	90,11	90,26	90,43	
Gini Ratio	0,382	0,386	0,365	

Tingkat Kemiskinan Maros sebesar 9,57 %. Persentase Angka penduduk miskin di kabupaten Maros 90,43 persen, keberhasilan menekan angka kemiskinan dari 34.620 jiwa menjadi 34.110 jiwa atau menurun sekitar 510 jiwa walaupun penurunnya sangat kecil. Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Maros tahun 2021 9,57 % menurun dibandingkan 2020 yaitu 9,74 %.



Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan salah satunya dengan melakukan program/kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Maros untuk meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja sehingga mengurangi angka kemiskinan.

Permasalahan :

1. Penurunan PDRB dikarenakan adanya penurunan sector transportasi dan perdagangan mengalami kontraksi
2. Penurunan Tingkat kemandirian kabupaten terjadi dikarenakan adanya recofusing anggaran terutamanya penyesuaian kembali pendapatan asli daerah yang disebabkan oleh adanya pandemic covid-19
3. Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi
4. Jumlah pengangguran di Kabupaten Maros masih ada
5. Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.
6. Masih ada buta aksara tersebar di 14 kecamatan.

Solusi :

1. Menghidupkan kembali Pariwisata dan mencari objek wisata baru.
2. Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat
3. Penumbuhan wirausaha muda, Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja, Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja
Peningkatkan pelatihan berbasis kompetensi
4. Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan kewirausahaan



5. Memberikan pendampingan dan pelatihan/pendidikan non formal (a,b dan c)

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Upaya Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial
2. Penyelenggaraan Dan Pembinaan Pendidikan Dasar
3. Pendidikan Anak Usia Dini
4. Pendidikan Non Formal
5. Pemberdayaan Perempuan Dan Kesetaraan Gender
6. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
7. Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan
8. Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda
9. Pemberdayaan Kepemudaan
10. Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM/UKM
11. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa
12. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
13. Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator: *Tingkat kemandirian Kabupaten* dengan capaian 79,54 % atau realisasi 16,45 % dengan target 20,68 % termasuk kategori Baik.

Permasalahan :

1. Banyak sektor Pendapatan Asli Daerah tertutup diakibatkan adanya pandemic Covid-19.
2. Kurangnya penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah

Solusi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan, Sistem Data Informasi serta Manajemen Pendapatan Daerah, Mempersingkat birokrasi Pemungutan pajak, dan Melakukan Monitoring dan Evaluasi



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Bersumber dari Pajak, Retribusi dan Dana Perimbangan
2. Pengelolaan Dan Pengendalian PBB/BPHTB
3. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen
4. Pengelolaan Destinasi Dan Usaha Kepariwisata Daerah
5. Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Sungai, Laut, Dan Udara
6. Pengelolaan Angkutan Dan Lalu Lintas Darat
7. Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perijinan Daerah
8. Pengembangan Promosi Dan Kerjasama Investasi
9. Pembinaan Dan Pengawasan Penanaman Modal
10. Program Peningkatan Sarana Prasarana Kerja Aparatur

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah dengan indikator: *Tingkat kemandirian Kabupaten* dengan capaian 94,44 % atau realisasi 16,32 % dengan target 16,45% termasuk kategori Sangat Tinggi. Beberapa program yang dilaksanakan untuk sasaran strategi tersebut antara lain : Pembinaan dan pemantauan pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan SDA, Peningkatan ketahanan pangan, peningkatan produksi peternakan dan pencegahan penyakit, pengembangan dan pemberdayaan UMKM/UKM, pengembangan sentra industri potensial dan industri kecil menengah, peningkatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) dalam jangka waktu tertentu. Penyebab meningkatnya berkaitan dengan mekanisme pasar antara lain; konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Sasaran Terkendalnya Inflasi Daerah dengan indikator: *laju Inflasi Daerah* dengan capaian 210,87 persen dengan target 1,94 persen atau realisasi 0,92 persen termasuk kategori Sangat Tinggi.



Sasaran Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat. dengan indikator: *Rasio Gini* dengan capaian rasio 99,46 % dengan target rasio 0,370 rasio dengan realisasi 0,365 Rasio termasuk kategori Sangat Tinggi. Indeks Gini adalah Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan berada pada kategori sedang. Indeks Gini Kabupaten Maros tiga tahun terakhir cukup menggembirakan. Pada tahun 2016 pada angka 0,41. Pada tahun 2017 indeks gini Kabupaten Maros mencapai angka 0,40 dan tahun 2018 angka 0,33 dan tahun 2019 yaitu 0,38 sedangkan 2020 yaitu 0,36 Dan pada tahun ini mencapai 0,365. Hal ini mengindikasikan bahwa semua kelompok penduduk memperoleh manfaat dari pertumbuhan.

Permasalahan :

1. Kemampuan daya beli yang terbatas

Solusi :

1. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT)
3. Menggunakan Tenaga Kerja Lokal dan Padat Karya

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan Sentra Industri Potensial Dan Industri Kecil Menengah
3. Pembinaan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan
4. Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
6. Peningkatan Kualitas Dan Pemberdayaan Lembaga Koperasi

1. Sasaran meningkatnya pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan indikator: Persentase Pertumbuhan *PDRB* dengan target -1,81 % namun realisasi



mencapai 1,36 % dengan kategori Sangat Tinggi. Hal ini disebabkan salah satu sektor yang paling besar kontribusinya adalah sektor transportasi. Capaian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 juga melewati target RPJMD tahun pelaksanaan 2021, dengan target sebesar -1,81 persen. Pertumbuhan ekonomi yang membaik pada tahun 2021 disebabkan membaiknya kondisi transportasi udara pada tahun 2021 yang masih memiliki kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Maros (24,88 %), dengan pertumbuhan sebesar 0,28 persen.

Sektor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 adalah sektor pertanian, dimana produksi yang cukup besar dari sektor tersebut mengakibatkan kontribusi sektor pertanian meningkat dari 18,72 persen pada tahun 2020 menjadi 19,74 persen pada tahun 2021, dengan pertumbuhan sebesar 8,15 persen.

Permasalahan :

1. Pencapaian PDRB berdasarkan 17 sektor lapangan usaha dan sektor transportasi dalam perdagangan dalam hal ini transportasi udara (bandara) terjadi pandemic Covid-19 yang mengakibatkan penutupan bandara selama kurang lebih 3 bulan hal ini menyebabkan tingkat pembelian konsumen menurun yang berimbas pada PDRB Kabupaten Maros sehingga hal ini berpengaruh pada sektor transportasi.

Solusi :

1. Mengembangkan nilai tambah produksi dari sektor lain seperti pertanian, akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi dan jasa lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah
2. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
3. Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
4. Pengembangan Perumahan
5. Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman
6. Pengembangan Sentra Industri Potensial Dan Industri Kecil Menengah



7. Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perijinan Daerah
8. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen
9. Pengembangan Dan Pemberdayaan UMKM/UKM
10. Pengelolaan Destinasi Dan Usaha Kepariwisata Daerah

Pendapatan per kapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka yang digunakan semestinya adalah total pendapatan regional dibagi jumlah penduduk. Akan tetapi angka ini sangat sulit diperoleh sehingga diganti dengan total PDRB atas dasar harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sasaran meningkatnya meningkatnya pendapatan masyarakat dengan indikator : *PDRB Perkapita* dengan capaian 103,01 % dengan target 46,48 Rp/Jiwa dan realisasi 47,88 Rp/Jiwa % termasuk kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Dari 17 sektor yang mengalami penurunan, sector yang mengalami pertumbuhan adalah sector informasi dan telekomunikasi dan jasa kesehatan dan kegiatan social disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dan yang berkontraksi adalah sector pertanian, kehutanan dan perikanan dan sector industry pengolahan, pengadaan listrik dan gas, sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektir transfortasi dan pergudangan, sector penyedian akomodasi dan makan minum, sector jasa perusahaan, sector administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib dan sector lainnya mengalami perlambatan.

Solusi :

1. Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan
2. Pembinaan dan Pelatihan keterampilan dan wirausaha
3. Mencari Objek Wisata Baru
4. Peningkatan Infrastuktur daerah pelosok

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Pelayanan Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja



2. Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif
3. Penyelenggaraan Jalan Dan Jembatan
4. Pengelolaan Sumber Daya Air
5. Pembinaan Dan Pengembangan Pemuda

- 2) Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Tujuan I : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Profesional dan berkinerja Tinggi
Tujuan II : Mewujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Misi 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60,2 IRB	50,20 IRB	83,39	T
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	82,87	99,25	ST

Sasaran Terwujudnya Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dengan target kinerja 60,2 IRD dan realisasi 50,20 dengan persentase capaian 83,39 dengan kategori Tinggi

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator : *Persentase pencapaian Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*. Untuk Indeks Kualitas Masyarakat (IKM) dengan target 83,5 IKM dengan realisasi 82,87 dengan persentase capaian 99,25 % dengan kategori Sangat Tinggi.

Dalam rangka pencapaian IRB yang lebih baik, Pemerintah Kabupaten Maros telah melakukan beberapa terobosan dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat diantaranya pelayanan E-KTP di kecamatan-kecamatan sehingga masyarakat tidak menumpuk di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selain itu pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan terhadap investor juga telah dilakukan, dan paling utama adalah pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang akan menjadi pusat semua jenis pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
2. Peningkatan mutu dan professional pendidik serta tenaga kependidikan



3. Pendidikan Non Formal
4. Peningkatan Pelayanan Dan Pengelolaan Administrasi Perijinan Daerah
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
6. Pelayanan Administrasi Pencatatan Sipil
7. Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat
8. Pelayanan Penempatan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja
9. Pengelolaan Data/Informasi Dan Layanan Kepegawaian

- 3) Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
 Tujuan : Meningkatkan taraf hidup Penduduk, baik sebagai Individu maupun sebagai masyarakat

Tabel 3.9.
Target dan Realisasi Misi 3

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	70,49 IPM	69,86 IPM	99,10	ST
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50	89,20	99,66	ST
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,76	72,43	99,55	ST
	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	0,183	0,187	102,17	ST
	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	85,71	83,62	97,56	ST
	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,04	1,99	102,51	ST

Sasaran Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks pembangunan manusia* dengan Capaian 99,10 % dengan target 70,49 % dan realisasi 69,86% atau dengan kategori Baik Sekali. Adapun data IPM adalah sebagai berikut :

URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,97	12,99	13,02	13,04	13,16
Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rp)	10.127	10.331	10.981	10.963	11.032
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,42	7,5	7,46	13,16	8,01
Umur Harapan Hidup (tahun)	68,6	68,74	68,98	69,02	69,04
IPM	68,43	68,94	69,8	69,86	70,41

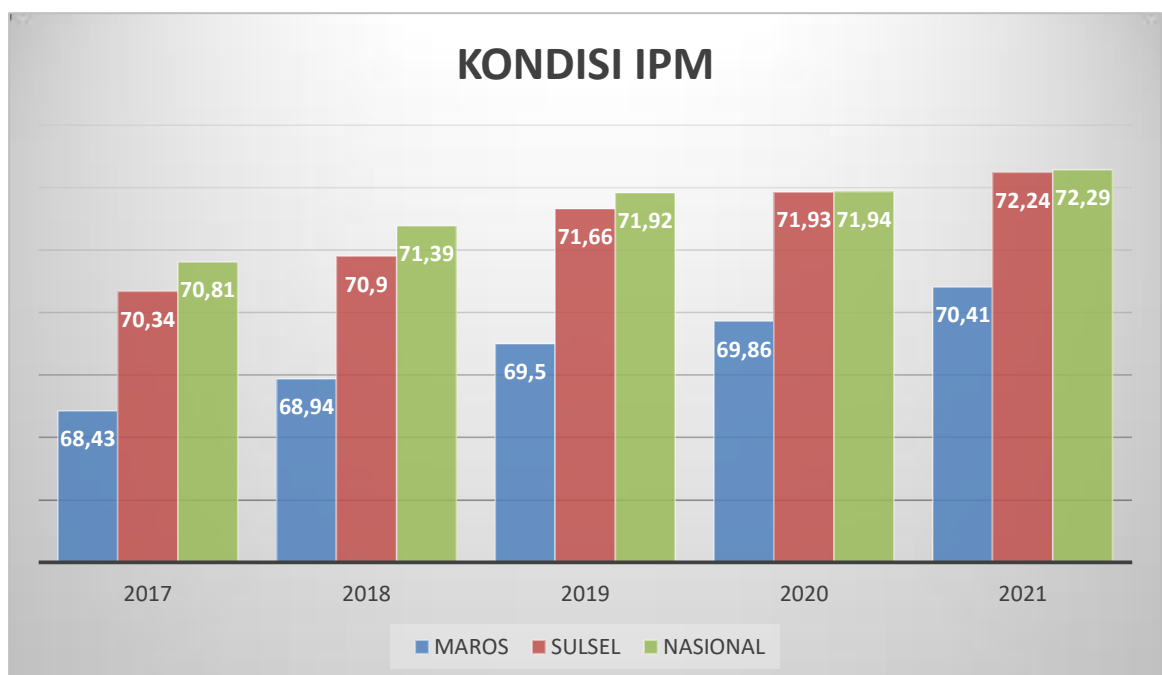


Pertumbuhan IPM Kabupaten Maros Untuk tahun 2021 mencapai 70,41. Dalam perhitungan IPM, komponen indikator IPM yaitu Angka harapan Hidup, Harapan lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per kapita.

- Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 yaitu 13,16
- Indeks kesehatan yaitu 75,40
- Indeks Pendidikan yaitu 63,25
- Daya Beli (PPP) yaitu Rp.11,032
- Angka Rata-Rata Lama Sekolah yaitu 8,01
- Angka Harapan Hidup yaitu 69,04

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang meliputi aspek kesehatan melalui pengukuran angka harapan hidup saat lahir, pendidikan melalui pengukuran angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta aspek kesejahteraan melalui pengukuran daya beli atau pengeluaran per kapita. Perkembangan IPM Kabupaten Maros selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik sebagaimana terlihat pada Grafik 2.3 berikut ini

Grafik 2.13
Kondisi IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber : BPS Kab. Maros, 2021



Berdasarkan grafik tersebut diatas, terlihat bahwa kondisi IPM Kabupaten Maros sejak tahun 2018-2022 meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 IPM Kabupaten Maros sebesar 68,94 kemudian meningkat **hingga mencapai 70,41 pada tahun 2021**. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Maros selama sepuluh tahun terakhir. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia tenaga pendidik serta tenaga kesehatan dilakukan secara konsisten setiap tahunnya.

Salah satu program dalam mendukung terwujudnya IPM dengan mengoptimalkan kesehatan masyarakat, salah satu kegiatan penunjang yaitu dengan program GERMAS (Gerakan masyarakat Hidup Sehat) salah satu implemenatsi atas program ini dilaksanakan senam kebugaran , pemeriksaan kesehatan dan mengajak masyarakat untuk berperilaku hidup sehat seperti makan buah dan sayuran, membersihkan lingkungan dan rutin berolahraga, Selain GERMAS untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan meningkatkan derajat kesehatan beberapa puskesmas melakukan inovasi dalam pelayanan dimasyarakat antara lain puskesmas LAU membuat sebuah kegiatan inovasi MTKS GAMMARA PKM LAU, yang mengedukasi anak secara dini untuk mau berperilaku hidup sehat melalui manajemen secara terpadu dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Selain itu dilaksanakan Car Free Day setiap hari minggu pagi yang mana kegiatan ini mengajak masyarakat untuk berolahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Kabupaten Maros juga bergerak aktif dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan memberikan edukasi dan mengajak masyarakat dalam membersihkan lingkungan, memanfaatkan sisa sampah untuk menjadi barang yang berguna, pemberdayaan masyarakat dalam pembuatan pupuk kompos dan membuat barang-barang bekas menjadi suatu barang atau daur ulang sampah yang bernilai jual. Dan sebagai wujud kepedulian pemerintah atas kesehatan masyarakat dibentuk tim pembina kabupaten sehat, forum kabupaten sehat serta forkom kecamatan sehat Kabupaten Maros.



Pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan tidak lepas dari peran aktif masyarakat dan dukungan seluruh sektor pemerintahan yang terkait, dalam menggerakkan, memfasilitasi serta membantu masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara mandiri.

Selain kesehatan dalam rangka mengurangi buta aksara di Kabupaten Maros melalui DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN di lakukan pelatihan dan pembelajaran untuk masyarakat yang buta aksara.

Dalam Hal pendidikan, untuk menunjang proses belajar mengajar setiap tahun dikuncurkan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan baik itu dalam hal rehabilitasi, revitalisasi serta pembangunan ruang kelas baru dan pemenuhan meubeler sekolah pada jenjang pendidikan Paud/TK, SD, SMP maupun SKB.

Dalam upaya meningkatkan minat baca Dinas Perpustakaan Kabupaten Maros melaksanakan Road Show Gerakan Membaca dan Kabupaten Maros terpilih dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (RI) sebagai satu dari 65 kabupaten dan kota se Indonesia sebagai penerima manfaat program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sebagai inovasi untuk menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat belajar dan berkegiatan yang berkelanjutan, pada 6 (enam) desa yaitu desa Pajukukang, Desa Labuaja, Desa Bori Kamase, Desa Bonto Tallasa , Desa Allatenggae dan Desa Baruga. Transformasi perpustakaan di desa dimulai dengan upaya merubah paradigma yang melekat di benak masyarakat selama ini bahwa perpustakaan sekadar layanan peminjaman dan pengembalian kolaksi buku, tapi kini perpustakaan telah bertransformasi menjadi pusat informasi serta tempat belajar dan bekegiatan.

Selain itu dalam hal mendukung peningkatan akses dan mutu pendidikan didirikan taman baca. Salah satu taman baca yang didirikan SDN Inpres 105 Alatengae Maros dengan konsep Taman Baca Apung, selain itu didusun salometti, desa toddolimae kec. Tompobulu didirikan taman baca pustaka alam, TBM Binaan PKBM Delia Cenrana Desa Limapoccoe Kec. Cenrana didesain unik perpaduan tempat membaca dan cafe. Pembanguna Taman Baca merupakan wujud kecintaan masyarakat Maros untuk mewujudkan masyarakat Maros gemar membaca dengan konsep yang berbeda di beberapa tempat sehingga mengundang minat baca terlebih dikalangan anak-anak dan remaja.



Permasalahan :

1. Kapasitas SDM Tenaga guru masih perlu ditingkatkan dan distribusi penempatan guru yang belum merata
2. Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai
3. Masih Rendahnya Angka melanjutkan sekolah pendidikan dasar ke pendidikan selanjutnya
4. Masih Rendahnya Angka Partisipasi Pendidikan Kesetaraan
5. Masih ada tenaga pendidik belum bersertifikasi
6. Masih Putus sekolah
7. Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil atau stunting
8. Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir dan Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan

Solusi :

1. pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
2. Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru serta peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
3. Penyedia sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan informasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Meningkatkan dan mendorong Masyarakat putus sekolah untuk mau melanjutkan pendidikannya melalui program pendidikan kesetaraan
5. Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga pendidikan
6. Optimalisasi pelayanan kesehatan
7. Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1 Akses
8. Pemberian makanan tambahan dan gizi tambahan terhadap ibu hamil serta balita.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :



1. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan
2. Peningkatan mutu dan professional pendidik serta tenaga kependidikan
3. Pendidikan Non Formal
4. Pengelolaan dan Distribusi Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
5. Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit
6. Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Peningkatan Efisiensi Dan Pengamanan Perdagangan Serta Perlindungan Konsumen

Sasaran Meningkatkan peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks pembangunan gender* dengan Capaian 99,66 persen dengan target 89,50 % dan realisasi 89,20 % atau dengan kategori Sangat Tinggi dan *Persentase pencapaian Indeks pemberdayaan gender* dengan Capaian 99,55 persen dengan target 72,76 % dan realisasi 72,43 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Terdapatnya kesenjangan ekonomi dan pendapatan antara perempuan dan laki-laki dalam meningkatkan perekonomian
2. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT
3. Masih adanya kasus perkawinan usia anak.

Solusi :

1. Meningkatkan tingkat pendidikan perempuan
2. Memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha industri rumahan
3. Sudah adanya Unit Pelayanan P2TP2A, Sudah ada SOP P2TP2A, sudah ada beberapa kelompok pengaduan tingkat desa dan kelurahan yang telah terbentuk
4. Telah Terbit Perda Kabupaten layak anak

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
2. Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan



3. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
4. Peningkatan Upaya Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Sasaran Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak, dengan indikator : *Persentase pencapaian angka kriminalitas yang tertagani* dengan Capaian 102,17 % dengan target 0,183/10.000 penduduk dan realisasi 0,187/10.000 penduduk atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk menjaga ketertiban masyarakat dalam stabilitas keamanan dibuat poskamling di setiap desa, dan dilakukan pelatihan satuan perlindungan masyarakat di perdesaan. Untuk perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan dibentuk Unit Layanan Terpadu kekerasan terhadap perempuan dan anak bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, rumah sakit dan pengadilan.

Permasalahan :

1. Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi; serta Kurangnya sarana prasarana untuk mendukung ketertantaman dan ketertiban di wilayah kecamatan
2. Jumlah kasus yang tertagani hanya kasus yang dilaporkan sedangkan banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap tabu/aib.

Solusi :

1. Perlu beberapa pembuatan sarana parasarana seperti pos kamling di wilayah kecamatan serta Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik.
2. Sudah adanya Unit Pelayanan P2TP2A, Sudah ada SOP P2TP2A, sudah ada beberapa kelompok pengaduan tingkat desa dan kelurahan yang telah terbentuk
3. Penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Masyarakat
2. Peningkatan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan
3. Penanganan Konflik Sosial
4. Pembinaan Kerukunan Dan Stabilitas Keamanan

Sasaran Meningkatkan Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat, dengan indikator : Indeks Ketahanan Pangan Daerah. Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten Penghasil Beras, dan untuk rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama yang terdiri dari Beras (Padi), sayuran, Kedelai, jagung, kacang hijau dan ubi, untuk kesediaan pangan sebesar ini artikan bahwa Kabupaten Maros memiliki cukup pangan . Persentase pencapaian Indeks ketahanan pangan daerah dengan Capaian 97,56 persen dengan target 85,71 persen dan realisasi 83,62 persen atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Produksi pangan di Kabupaten Maros mengalami penurunan namun ketersediaan cadangan pangan jauh melebihi kebutuhan pangan masyarakat

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Sasaran Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah., dengan indikator : *Persentase pencapaian laju Pertumbuhan penduduk* dengan Capaian 102,51% dengan target 2,04% dan realisasi 1,99 % atau dengan kategori sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB
2. Angka Kelahiran Total atau TFR masih tinggi
3. Angka kelahiran remaja (ASFR) Masih tinggi



4. Laju pertumbuhan penduduk masih sangat tinggi diakibatkan migrasi penduduk terutama wilayah kecamatan yang berbatasan dengan kota Makassar
5. Rendahnya Pasangan Usia Subur yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang

Solusi :

- Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk terutama masalah migrasi penduduk
- Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana
- Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana.
- Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Pengembangan Kelembagaan dan pengendalian Penduduk
2. Penyuluhan Dan Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Kependudukan Dan KB
3. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
4. Peningkatan Partisipasi Dan Pemberdayaan Masyarakat.

4) Misi 4 : Meningkatkan Pembangunan wilayah dan kawasan

Tujuan : Meningkatkan pembangunan wilayah perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Misi 4

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
4	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,65	0,67	103,08	ST
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,67	0,69	102,99	ST
	Meningkatnya	Tingkat	3,58	4,32	120,67	ST



Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian Terhadap RTRW				
--------------------------------	--------------------------	--	--	--	--

Sasaran Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Pembangunan Desa* dengan nilai capaian 103,08 % dengan target 0,65 % dan realisasi 0,67 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan :

1. Masih terdapat desa tertinggal di Kabupaten Maros, dikarenakan masih lemahnya beberapa dimensi pada ketahanan sosial, ekonomi, transportasi dan infrastruktur
2. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Solusi :

1. Dibutuhkan kajian lebih dalam pada penyusunan dokumen perencanaan tahunan desa dan penganggaran desa (APBDesa) dengan keterlibatan beberapa sektor perangkat daerah untuk membantu desa meningkatkan nilai indikator di beberapa dimensi seperti kesehatan, pendidikan, sosial, permukiman, ekonomi, transportasi dan infrastruktur
2. Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa
3. Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku
4. Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan Teknologi tepat guna untuk peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa
2. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membangun Desa



3. Program Pengembangan Kelembagaan Sosial Ekonomi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.

Sasaran Terwujudnya Ruang kota Yang layak Huni, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Kota Berlanjutan (IKB)* dengan nilai capaian 102,99 % dengan target 0,67 IKB dan realisasi 0,69 atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang., dengan indikator : *Persentase Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW* dengan nilai capaian 120 % dengan target 3,56% dan realisasi 4,32 % atau dengan kategori Baik Sekali.

Permasalahan :

1. Masih adanya pembangunan baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan tidak sesuai dengan Dokumen RTRW.

Solusi :

1. Dibuat produk turunan dari RTRW berupa RDTR untuk setiap kecamatan
2. Revisi RTRW

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah
2. Perencanaan Dan pengendalian Bidang Pembangunan Wilayah Dan Kawasan

- 1) Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber daya Alam
 Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemanfaatan dan pelestarian Sumber daya Alam.
 Tujuan II : Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Misi 5

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
5	Meningkatnya Produksi	Indeks Produksi	102,05	104,02	101,93	ST



Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan	Sub Sektor Pertanian				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,54	67,33	100,44	ST
Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Resiko Bencana (IRD)	141,35	141,87	100,37	ST

Sasaran Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Produksi Sub Sektor* dengan Capaian 11,93 % dengan target 102,05% dan realisasi 104,02 % atau dengan kategori Sangat Tinggi. Untuk sasaran Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan hasil dari keseluruhan masuk dalam kategori sangat berhasil.

Permasalahan :

1. Cara bercocok tanam masih menggunakan metode Lama sehingga produksi tidak maksimal.
2. Distribusi hasil pertanian mengalami penurunan diakibatkan adanya pembatasan kegiatan masyarakat karena adanya pandemi.
3. Daya masyarakat menurun karena Pandemi.
4. Adanya anomali iklim, bencana alam dan serangan OPT mengakibatkan gagal panen dan penurunan produksi
5. Kegiatan usaha tani sebagian besar masih bersifat subsistem dengan komoditas utama berupa bahan pangan pokok (padi)
6. Kelangkaan Pupuk di Petani.
7. Terbatas wilayah area pengelolaan perikanan tangkap
8. Kurangnya RPH (rumah pemotongan Hewan).

Solusi :

1. Dukungan dan komitmen pemerintah daerah dalam hal pembangunan infrastruktur
2. Adanya sosialisasi dan penggalakan konsumsi pangan lokal
3. Adanya kerjasama dengan investor dan kemitraan serta promosi produk pertanian dan sertifikasi produk pertanian



4. Dukungan organisasi kelembagaan non pemerintah (LSM/HKTI/KTNA/Asosiasi/Koperasi Tani/Gapoktan/Poktan/P3A/GP3A) serta Pengadaan Tenaga Penyuluh Pertanian
5. Pembinaan Kelompok petani Pembudidaya dan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
6. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Dan Hortikultura
2. Pengembangan Sarana Prasarana Penunjang Produksi Dan Agribisnis
3. Peningkatan Ketahanan Pangan
4. Pengembangan Budidaya perikanan
5. Pengembangan perikanan tangkap
6. Pembinaan dan penyediaan sarana prasarana perikanan

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup, dengan indikator : *Persentase pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* dengan Capaian 100,44 % dengan target 63,54 IKLH dan realisasi 67,33 IKLH atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Permasalahan

1. Berkurangnya luas tutupan hutan
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/berkelanjutan;
3. Masih adanya pencemaran dan pengrusakan lingkungan
4. Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi area perkebunan yang dikelola oleh masyarakat;

Solusi :

1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kerusakan lingkungan
2. Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta sekolah,



ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R

3. Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.
4. Pengawasan bagi industry/usaha di Kabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Perencanaan Dan Pengendalian Bidang Pembangunan Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
3. Pembinaan & Pemantauan Pemberdayaan Ekonomi Dan Pengelolaan SDA
4. Penegakan Kebijakan Dan Peraturan Perundangan Daerah

Sasaran Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana, dengan indikator : *Indeks Resiko Bencana dengan capaian* 100,37 % dengan Target 141,35 IRB dan Realisasi 141,87 dengan Kategori Baik Sekali.

Permasalahan :

1. Tingkat Ketahanan masyarakat terhadap bencana masih rendah
2. Pemahaman masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan dalam rangka mengantisipasi terjadi bencana masih rendah.

Solusi :

1. Meningkatkan sistem ketahanan bencana yang handal melalui pemantauan secara berkesinambungan, pemutakhiran sistem mitigasi bencana, dan penanganan bencana skala Kabupaten
2. Sosialiasi tentang lingkungan hidup.
3. Pembangunan Desa tangguh Bencana (Destana)
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mitigasi bencana.



Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Peningkatan Efektifitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Alam
2. Peningkatan Upaya Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup
3. Pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

2) Misi 6 : Meningkatkan pembangunan Infrastruktur Dan teknologi Informatika

Tujuan I : Meningkatkan Infrastuktur pendukung pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Misi 6

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,05	69,68	107,12	ST
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	3,00	3,20	106,67	ST

Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas, dengan indikator : *Indeks Daya Saing Infrastuktur* dengan Capaian 17,12 % dengan target 65,05 % dan realisasi 69,68 % atau dengan kategori Sangat Tinggi.

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Masih ada kerusakan pada sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi
2. Pembangunan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya dikawasan pesisir dan kumuh.
3. Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai dan jalan yang tidak sesuai peruntukannya;
4. Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang



5. Penyediaan transportasi umum di daerah tertentu masih kurang

Solusi :

1. Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana
2. Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi
3. Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan
4. Penyediaan sarana dan prasarana dengan memperhatikan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang.
5. Membuka jalur transportasi umum pada daerah tertentu.
6. Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan/ dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Pembangunan Bangunan dan Gedung
3. Pengelolaan Angkutan dan Lalu lintas Sungai, Laut dan Udara
4. Pengelolaan angkutan dan lalu lintas darat
5. Pengembangan Perumahan
6. Pengembangan Kinerja Layanan Air Minum dan Sanitasi
7. Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Infrastruktur Daerah

Persentase pencapaian Indeks pembangunan TIK (IP-TIK) dengan sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik dengan



Capaian 106,67% dengan target 3,00 % dan realisasi 3,20 % atau dengan kategori Baik Sekali.

Dalam Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) merupakan suatu ukuran standar yang dapat menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi suatu wilayah, kesenjangan digital, serta potensi pengembangan TIK. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

Adapun permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Penyedia sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi belum maksimal
2. Masih kurangnya SDM dalam bidang teknologi informasi
3. Implementasi e-government belum optimal.

Solusi :

1. Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia informasi dan teknologi yang memiliki kompetensi dibidangnya
3. Pembentukan suatu kebijakan yang kuat dalam memberikan dukungan kepada pengimplementasi e-goverment dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan / dilaksanakan untuk sasaran strategis tersebut, antara lain :

1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Umum
2. Program Pengembangan Data dan Informasi Pemerintah Daerah
3. Program Pengamanan Data dan Informasi Pemerintah Daerah.

Dari indikator diatas dapat dilihat ringkasan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.13



**Perbandingan Target sasaran dan Realisasi
Tahun 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Persentase Pertumbuhan PDRB	-1,81	1,36	175,14	ST
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	46,48	47,88	103,01	ST
	Meningkatnya kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat Kemandirian kabupaten	17,28	16,32	94,44	ST
	Terkendalnya Inflasi Daerah	Laju Inflasi daerah	1,94	0,92	210,87	ST
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,63	90,43	99,78	ST
	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	7,00	2,91	41,57	SR
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan Kesempatan kerja	Produktifitas Total Daerah	72,49	77,19	106,48	ST
	Menurunnya kesenjangan Tingkat pendapatan Daerah	Rasio Gini	0,370	0,365	99,46	ST
2	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	60,2	50,20	83,39	T
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5	82,87	99,25	ST
3	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, kerukunan hidup dan perlindungan masyarakat termasuk perempuan dan anak	Angka kriminalitas yang tertagani	0,183	0,187	102,17	ST
	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	Indeks pembangunan Manusia	70,14	70,41	100,38	ST



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,50	89,20	99,66	ST
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,76	72,43	99,55	ST
	Meningkatnya Kualitas dan ketersediaan Bahan pangan Masyarakat	Indeks ketahanan Pangan Daerah	85,71	83,62	97,56	ST
	Terkendalinya Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah	Laju Pertumbuhan penduduk	2,04	1,99	102,51	ST
4	Meningkatnya Pemerataan dan percepatan pembangunan desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,65	0,67	103,08	ST
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,67	0,69	102,99	ST
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	3,58	4,32	120,67	ST
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, perikanan, perkebunan dan Peternakan	Indeks produksi Sub Sektor Pertanian	102,05	104,02	101,93	ST
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH)	63,54	67,33	100,44	ST
	Menurunnya Potensi kerugian dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	141,35	141,87	100,37	ST
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana	Indeks Daya Saing Infrastruktur	65,05	69,68	107,12	ST



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)				
		TOLOK UKUR	TARGET KINERJA	REALISASI	%	Kategori
	Prasarana Umum yang berkualitas					
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	3,00	3,20	106,67	ST

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 24 Indikator Kinerja Utama Bupati Maros Tahun 2021, disimpulkan bahwa 22 (Tujuh Belas) indikator dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan 1 (Satu) indikator sasaran mencapai nilai yang Tinggi, 1 (satu) indikator dalam kategori Rendah.

IKU yang masuk kriteria Sangat tinggi dari target yang ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (KLH) dengan nilai 100,44%, Indeks Kesiapsiagaan Bencana 100,37%, Indeks Daya Saing Infrastruktur 107,12 persen, Laju pertumbuhan penduduk 102,51 persen, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 99,78 persen, Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) 102,99%, tingkat kesesuaian terhadap RTRW 120,67 persen, Rasio Gini 99,46 persen, indeks pembangunan manusia 100,38 persen, indeks pembangunan gender 99,66 persen, indeks ketahanan pangan daerah 97,56 persen, indeks produksi sub sector pertanian 101,93 persen, indeks pembangunan TIK (IP_TIK) 106,67 persen, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 99,25 persen, indeks pembangunan desa 103,08 persen,

Dengan demikian masih terdapat indikator sasaran yang pencapaiannya belum maksimal seperti yang diharapkan sehingga perlu perhatian sehingga pada tahun berikutnya nilai yang diharapkan dapat tercapai.

Sesuai dengan perkembangan dan dinamika dan tuntutan masyarakat, kinerja pemerintah Kabupaten Maros selalu berupaya untuk dioptimalkan.

Oleh karenanya, segala program pembangunan pemerintah daerah selalu diupayakan untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).



Beberapa pelayanan dan kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Maros mendapatkan apresiasi dan penghargaan sebagai wujud nyata dalam pembangunan menuju Maros lebih Sejahtera diantara penghargaan yang diraih Kabupaten Maros adalah akuntabilitas kinerja yang mendapatkan penilaian baik, Tahun 2019 Kabupaten Maros juga mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pemerintah Kabupaten Maros juga mendapatkan Sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Pada Tahun 2019 dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, pada tanggal 17 Desember 2020 di Jakarta, Penghargaan Unit Penyelenggaraan pelayanan Publik Terbaik Kategori “Sangat Baik” (Disdukcapil) dan penghargaan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terbaik Kategori Sangat Baik (DMPTSP)

c. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021 ataupun Tahun Terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun - tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dan tahun 2021 sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	-10.87	175,14
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	47.53	103,01
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90.26	99,78
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	16.45	94,44
	Terkendalinya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	2,13	210,87



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan	Rasio Gini	0.368	99,46
	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	11,38	41,57
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan	Produktifitas Total Daerah	73,50	106,48
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih,	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	50,20	83,39
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,87	99,25
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	100,38
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	99,66
		Indeks Pemberdayaan Gender	72,43	99,55
	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	0,177/ 10000	102,17
	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	83,11	97,56
	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.05	102,51
4	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,66	103,08
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,6	102,99
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	2,83	120,67
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan.	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	99,00	101,93



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,79	100,44
	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	145,46	100,37
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	62,64	107,12
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	2,67	106,67



d. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Periode terakhir dokumen RPJMD Kabupaten Maros, Perbandingan ini untuk mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka menengah Daerah. Perbandingan antara Target RPJMD dengan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja
Tahun 2020 dan tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	-10,87	7,66
	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	47,53	46,48
	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	90,26	90,63
	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.	Tingkat Kemandirian Kabupaten	16,45	17,28
	Terkendalinya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	2,13	1,94
	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan	Rasio Gini	0,368	0,370
	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB	11,38	7,00
	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja dan	Produktifitas Total Daerah	73,50	72,49
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih,	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	50,20	60,20
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,87	83,5
3	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	69,86	70,14
	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,23	89,5
		Indeks Pemberdayaan Gender	72,43	72,73



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA (IMPACT)		
		TOLOK UKUR	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.	Angka kriminalitas yang tertangani	0,177/ 10000	0,183/10.0 00
	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	83,11	85,71
	Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	2.05	2,04
4	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	0,66	0,65
	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,6	0,67
	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	2,83	3,58
5	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan.	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	99,00	102,05
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,79	63,54
	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Kesiapsiagaan Bencana	145,46	141,35
6	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	62,64	65,05
	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	2,67	3,00



e. **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai**

1. Struktur Organisasi

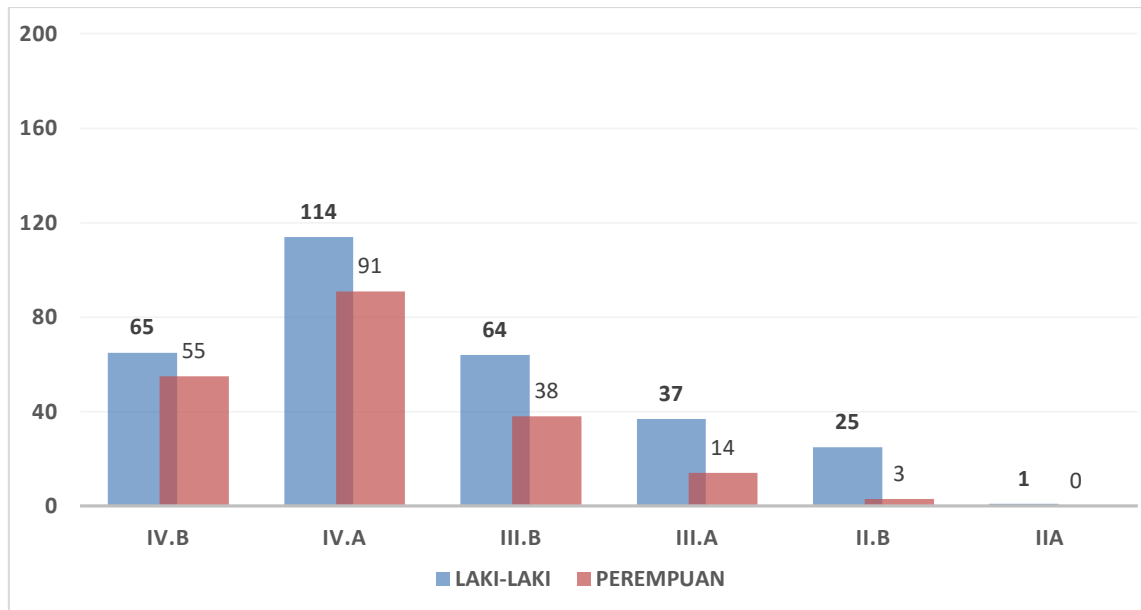
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dilakukan penyesuaian dan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah tersebut, sehingga pada tahun 2016 telah ditetapkan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros dan Peraturan Bupati Maros tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maros.

Fungsi aparatur negara/pemerintah dalam menjalankan pelayanan merupakan fungsi penunjang yang bersifat relatif. Fungsi ini ditujukan bagi terlaksananya tujuan negara dalam melayani warga negaranya melalui aparatur pemerintah. Pelayanan merupakan salah satu produk organisasi berupa jasa, sehingga pada dasarnya pelayanan tidak kasat mata, diraba, dan dimiliki, melainkan hanya sebatas digunakan, dirasakan, dibeli, atau disewa. Sekalipun demikian, dalam kehidupan organisasi, fungsi pelayanan memiliki nilai strategis dibandingkan dengan fungsi organisasi lainnya. Ini karena fungsi pelayanan sangat berpotensi dalam menentukan kelanggengan, perkembangan dan keunggulan bersaing organisasi di masa yang akan datang. Jumlah ASN Negeri Sipil dan PPPK berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.614 orang.

Jumlah ASN berdasarkan eselon Kabupaten Maros sebanyak 507 orang yang terdiri dari 1 Orang yang menduduki eselon II-A, 28 orang yang menduduki jabatan pada eselon II-B, 51 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-A, 102 orang yang menduduki jabatan pada eselon III-B, 205 orang yang menduduki jabatan pada eselon IV-A serta 120 orang ASN yang menduduki jabatan pada eselon IV-B.



Grafik 1.7
Jumlah ASN Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2022



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2022

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tersebut, Pemerintah Kabupaten Maros memiliki 31 (tiga puluh satu) Satuan Kerja Perangkat Daerah, 14 (empat belas) Kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) Kelurahan serta 80 (delapan puluh) Desa dan 9 (Sembilan) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan dan Dinas.

Berdasarkan uraian jabatan dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diatas yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 07 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, diurai sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD Tipe B;
3. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Dinas Terdiri Dari :
 - 1) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN dan Kebudayaan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - 2) Dinas Kesehatan merupakan dinas tipe A yang merupakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- 3) Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN merupakan Dinas Tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN;
- 4) DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan;
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- 6) Dinas Sosial merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan bidang sosial;
- 7) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 9) Dinas Lingkungan Hidup merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- 12) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 13) Dinas Perhubungan merupakan dinas tipe yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;



- 14) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
 - 15) Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, UKM dan perdagangan;
 - 16) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 17) Dinas Kepemudaan dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga;
 - 18) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata;
 - 19) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - 20) Dinas Perikanan merupakan dinas tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
 - 21) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan dinas tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan ketahanan pangan;
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- 1) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan pendapatan Daerah merupakan Badan tipe A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - 3) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah;



- 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana ;
 - 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah merupakan Badan tipe B yang melaksanakan urusan pemerinatahn bidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Balai Layanan Umum Daerah (BLUD), terdiri dari :
- 1) RSUD Salewangang merupakan RSUD Tipe C

Disamping Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta Lembaga Penunjang Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maros, terdapat pula 3 (tiga) kelompok jabatan Staf Ahli Bupati yakni :

- a. Staf Ahli Bidang Sosial, Politik dan Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Sumber Daya Manusia;
- c. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Sumber Daya Alam;

Kecamatan, terdiri dari :

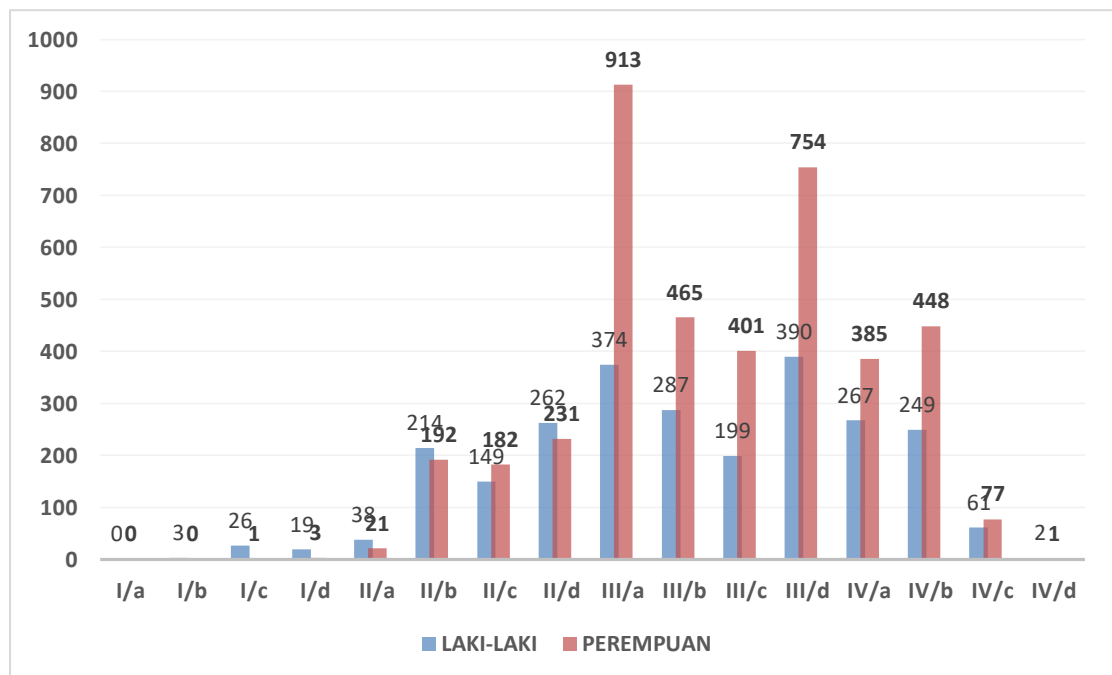
1. Kecamatan Marusu dengan tipe A
2. Kecamatan Moncongloe dengan tipe A
3. Kecamatan Mandai dengan tipe A
4. Kecamatan Tanralili dengan tipe A
5. Kecamatan Tompobulu dengan tipe A
6. Kecamatan Turikale dengan tipe A
7. Kecamatan Maros Baru dengan tipe A
8. Kecamatan Lau dengan tipe A
9. Kecamatan Bontoa dengan tipe A
10. Kecamatan Bantimurung dengan tipe A
11. Kecamatan Simbang dengan tipe A
12. Kecamatan Cenrana dengan tipe A
13. Kecamatan Camba dengan tipe A
14. Kecamatan Mallawa dengan tipe A



2. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN)

Jumlah ASN Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pejabat Struktural/Fungsional Kabupaten Maros sebanyak 6.614 orang. Jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin Kabupaten Maros paling besar terdapat pada golongan III/A dengan jumlah ASN sebanyak 1.287 orang, kemudian diikuti oleh golongan III/D dimana pada golongan tersebut terdapat 1.144 orang pegawai, kemudian golongan III/B dengan jumlah ASN sebanyak 752 orang. Secara lengkap jumlah ASN berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.

**Grafik Jumlah ASN
Berdasarkan Golongan Ruang dan Jenis Kelamin
Kabupaten Maros Tahun 2022**



Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2022

f. Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Secara umum Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten Maros menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Maros, namun demikian program/kegiatan tersebut akan selalu dilakukan Review apakah dalam tahun pelaksanaan terdapat program/kegiatan yang harus segera dilaksanakan atau dihentikan yang dinilai berdasarkan pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Maros. Rencana dan Realisasi Program/kegiatan untuk tahun 2022 terdiri dari 136 (seratus



tiga puluh enam) program dan terdapat 26 program Pembangunan. Adapun program pembangunan adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 1		
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah		
Indikator Kinerja : Pertumbuhan PDRB		
1	Program Penguatan Sektor Ekonomi Daerah	Sekretariat Daerah
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
8		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
9		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
10		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		
PDRB Per Kapita		
1	Program Pengembangan potensi ekonomi lokal	Sekretariat Daerah
2		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
3		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8		Seluruh Kecamatan
9		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
10		Balitbangda
11		Badan Keuangan Daerah
12		Bappeda
Sasaran : Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat		
Rasio Gini		
1	Program Pemerataan Distribusi Pendapatan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
3		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas Perikanan
6		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
7		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
8		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9		Dinas Kesehatan
10		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
11		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
12		Balitbangda
Sasaran : Menurunnya Tingkat Kemiskinan.		
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan		
1	Program Penanganan Masyarakat Miskin Dan Rentan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Badan Keuangan Daerah



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4		Balitbangda
5		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6		Dinas Kesehatan
7		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
8		Dinas Sosial
9		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
10		Seluruh Kecamatan
11		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
12		Dinas Perikanan
13		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
14		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
15		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
16		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
17		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
18		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
19		Dinas Pemuda Dan Olahraga
Sasaran : Meningkatnya Pendapatan Daerah.		
Tingkat Kemandirian Kabupaten		
1	Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Badan Keuangan Daerah
2		Balitbangda
3		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
4		Dinas Perhubungan
5		Seluruh Kecamatan
6		Dinas Perikanan
7		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8		Dinas Kesehatan
9		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
10		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
11		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja		
Produktifitas Total Daerah		
1	Program Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
5		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
7		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
8		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
9		Dinas Perikanan
10		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
11		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
SASARAN: Terkendalinya Inflasi Daerah		
Laju Inflasi Daerah		
1	Program Pengendalian Inflasi Daerah	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
5		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
6		Dinas Perikanan
7		Dinas Perhubungan
8		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
9		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
SASARAN: Meningkatnya Nilai Investasi		
Pertumbuhan PMTB		
1	Program Peningkatan Investasi Padat Karya	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Badan Keuangan Daerah
4		Balitbangda
5		Dinas Penanaman Modal Dan PTSP
6		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
7		Dinas Perikanan
8		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
9		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
Misi 2		
SASARAN: Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.		
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)		
1	Program Pengelolaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Badan Keuangan Daerah
4		Bappeda
5		Dinas Komunikasi Dan Informatika
6		Seluruh SKPD/OPD
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.		
Indeks Kepuasan Masyarakat		
1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Inspektorat Kabupaten
3		Badan Keuangan Daerah
4		Bappeda
5		Balitbangda
6		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
7		Dinas Komunikasi Dan Informatika
8		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
9		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
11		Dinas Kesehatan
12		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
13		RSUD Salewangang
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Seluruh Kecamatan
16		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
1	Program Percepatan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Inspektorat Kabupaten
5		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		PERTANAHAN
6		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7		Dinas Kesehatan
8		RSUD Salewangang
9		Dinas Sosial
10		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
11		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 3		
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.		
Indeks Pembangunan Manusia		
1	Program Pembangunan Sumberdaya Manusia Masyarakat	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
5		Dinas Kesehatan
6		Dinas Sosial
7		RSUD Salewangang
8		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
11		Dinas Pengendalian Penduduk
12		Dan Keluarga Berencana
13		Dinas Pemuda Dan Olahraga
14		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
15		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
Sasaran : Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.		
Indeks Pembangunan Gender (IPG)		
1	Program : Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
6		Dinas Kesehatan
7		Dinas Sosial
8		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
9		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
10		Dinas Komunikasi Dan Informatika
11		Dinas Pemuda Dan Olahraga
12		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
13		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
14		Dinas Perikanan
15		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
SASARAN: Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan		
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
1	Program Peningkatan Peran Aktif Perempuan Dalam Pembangunan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
5		Badan Keuangan Daerah
6		Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah
7		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Sasaran : Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Kerukunan Hidup, Dan Perlindungan		



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Masyarakat Termasuk Perempuan Dan Anak.		
Angka kriminalitas yang tertangani		
1	Program Pemeliharaan Ketertiban, Ketentraman, Keamanan Dan Perlindungan Masyarakat	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
3		Inspektorat Kabupaten
4		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
5		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
6		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat		
Indeks Ketahanan Pangan Daerah		
1	Program Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
3		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
4		Dinas Perikanan
5		Dinas Kesehatan
6		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan		
Laju Pertumbuhan Penduduk		
1	Program Pengendalian Pertumbuhan Dan Distribusi penduduk	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
3		Bappeda
4		Balitbangda
5		Dinas Administrasi Penduduk Dan Catatan Sipil
6		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8		Seluruh Kecamatan
9		Dinas Kesehatan
MISI : 4		
SASARAN: Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa		
Indeks Pembangunan Desa (IPD)		
1	Program Percepatan Pembangunan Desa	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Sosial Dan Pemerintahan)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Badan Keuangan Daerah
5		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
6		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
9		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
10		Dinas Perikanan
11		Dinas Kesehatan
12		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
13		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
14		Dinas Perpustakaan Dan Arsip
15		Dinas Komunikasi Dan Informatika
16		Dinas Pemuda Dan Olahraga
17		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		Perlindungan Anak
18		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni		
Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)		
1	Program Pengelolaan Kawasan Perkotaan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Badan Keuangan Daerah
5		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
6		Dinas Koperasi, UKM, Dan Perdagangan
7		Dinas Kesehatan
8		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9		Dinas Komunikasi Dan Informatika
10		Dinas Perhubungan
11		Dinas Lingkungan Hidup
12		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Sasaran : Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW		
1	Program Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
5		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
6		Dinas Perhubungan
7		Dinas Lingkungan Hidup
8		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar
9		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
MISI 5		
Sasaran : Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan		
Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian		
1	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi)
2		Bappeda
3		Balitbangda
4		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
5		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN
6		Seluruh Kecamatan
7	Program Peningkatan Produksi Perikanan	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan
8		Ekonomi)
9		Bappeda
10		Balitbangda
11		Dinas Perikanan
Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.		
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		
1	Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);



NO	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2		Dinas Lingkungan Hidup;
3		Bappeda;
4		Balitbangda;
5		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
6		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN;
7		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian;
8		Dinas Perhubungan;
Sasaran : Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.		
Indeks Resiko Bencana (IRB)		
1	Program Penanganan Resiko Bencana	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
3		Dinas Lingkungan Hidup;
4		Badan Keuangan Daerah;
5		Bappeda;
6		Balitbangda;
7		Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar;
8		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN;
9		Dinas Sosial;
10		Dinas Kesehatan;
11		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
MISI 6		
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas		
Indeks Daya Saing Infrastruktur		
1	Program Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Infrastruktur Daerah	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Dinas Lingkungan Hidup;
3		Badan Keuangan Daerah;
4		Bappeda;
5		Balitbangda;
6		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN;
7		Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
8		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar;
9		Dinas Perhubungan;
10		Seluruh Kecamatan
Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.		
Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)		
1	Program Peningkatan Kualitas Dan Ketersediaan Infrastruktur Penunjang Informasi Publik	Sekretariat Daerah (Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi);
2		Bappeda;
3		Balitbangda;
4		Dinas PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN;
5		Dinas Komunikasi Dan Informatika;
6		Seluruh Kecamatan

Program Penunjang Pencapaian Sasaran

**Kabupaten Tahun 2022**

Pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan urusan kewenangan masing- masing. Dalam Pelaksanaan urusan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, adapun permasalahan tersebut berdasarkan urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel Permasalahan dan Solusi Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	PENDIDIKAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan belum tercapai;	1 Penganggaran untuk mendukung fungsi pendidikan perlu ditingkatkan dalam rangka mengentaskan dan meningkatkan angka melek huruf serta untuk mendukung dan memberikan jaminan kepada anak-anak usia sekolah di Kabupaten Maros dapat bersekolah sampai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
		2 Angka kelulusan belum mencapai 100 % dari semua tingkatan;	2 Pembinaan dan pendampingan peningkatan prestasi pendidikan Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
		3 Kapasitas SDM tenaga guru masih perlu ditingkatkan;	3 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
		4 Distribusi penempatan tenaga guru belum merata.	4 Perlu adanya regulasi dan penataan penempatan guru se Kabupaten Maros
		5 Sarana dan prasarana pendidikan belum memadai (Sekolah Dasar)	5 Penyediaan sarana prasarana pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerataan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal diseluruh wilayah Kabupaten Maros.
		6 Tugas guru sebagai ASN yang wajib bekerja selama 37,5 jam per pekan belum terpenuhi	6 Perlunya adanya regulasi dan penempatan jam-jam belajar untuk memaksimalkan waktu mengajar
2	KESEHATAN	1 Beberapa indikator Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan belum tercapai	1 Penganggaran untuk mendukung program yang berkaitan dengan SPM dan Melakukan perhitungan SPM Kesehatan
		2 Masih kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat;	2 Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pola hidup sehat dan Penciptaan budaya hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui upaya promotif dan preventif.
		3 Perbaikan gizi balita belum maksimal	3 Peningkatan cakupan pelayanan gizi bagi ibu dan anak



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih terdapat beberapa Puskesmas yang belum terakreditasi dan Puskesmas yang sudah terakreditasi perlu dilakukan Reakreditasi untuk mencapai penilaian yang semakin baik dari status Dasar, Madya, Utama dan Paripurna	4 Mengusulkan dan Menganggaran akreditasi Puskesmas
		5 Sarana dan prasarana puskesmas harus memenuhi standar SPM	5 Peningkatan ketersediaan sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan yang berkualitas. Peningkatan ketersediaan dan pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan di sarana kesehatan sesuai kebutuhan.
		6 Masih terdapat angka kematian bayi baru lahir	6 Pemetaan wilayah setempat dan pendampingan tenaga kesehatan (bidan) tentang K1
		7 Masih terdapat angka kematian ibu pasca melahirkan	7 Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran Stimulasi makanan tambahan pada Ibu Hamil
		8 Belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan tumbuh kerdil	8 Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai tata laksana gizi buruk
		9 Ketersediaan tenaga kesehatan masih kurang.	9 Penambahan dan distribusi SDM kesehatan sesuai dengan Abk dan ANJAB.
3	PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	<p>1 Tingkat kerusakan sarana prasarana jalan, jembatan dan irigasi masih Tinggi</p> <p>2 Sarana dan prasarana termasuk bangunan belum memperhatikan hak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas dan kaum rentang</p> <p>3 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam tertib</p> <p>4 Banyaknya area hutan produksi yang beralih fungsi menjadi permukiman yang dikelola oleh masyarakat;</p> <p>5 Banyaknya pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai yang tidak sesuai</p> <p>6 Ketersedian sumber air bersih pada kawasan pesisir masih sangat kurang;</p> <p>7 Masih tingginya RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak;</p> <p>8 Produk tata ruang yang telah disusun belum disadari sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum;</p> <p>9 Banyaknya sarana prasarana air bersih yang sudah terbangun tetapi dalam kondisi yang rusak;</p>	<p>1 Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dan pembangunan dalam bidang sarana dan prasarana</p> <p>Perlunya sosialisasi Produk tata ruang sebagai produk yang mempunyai kekuatan hukum</p> <p>Perlunya sosialisasi tentang pemahaman pemeliharaan sarana dan prasana infrastruktur</p> <p>Untuk menerbitkan Perbup tentang alih fungsi lahan dan pemanfaatan area sempadan sungai, jalan dan area pantai</p>



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI		
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	1	Pengelolaan perumahan yang layak huni belum maksimal, khususnya dikawasan pesisir;	1	Untuk lebih mengoptimalkan Program kegiatan untuk mendukung peningkatan perbaikan dalam bidang perumahan sebagai wujud mencapai target 100 % rumah yang pengguna air bersih, 0 % kawasan kumuh, dan 100 % rumah tangga bersanitasi Peningkatan harmonisasi dalam pemanfaatan, penataan dan pengendalian ruang pada seluruh Kawasan Strategis (Nasional, Provinsi, dan Kabupaten) Peningkatan kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan.
		2	Sarana dan prasarana dasar permukiman belum memadai;		
		3	Jumlah RT yang tidak memenuhi sanitasi yang layak masih tinggi;		
		4	Penanganan terhadap kejadian bencana belum sepenuhnya berjalan optimal.		
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1	Ketentraman masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi;	1	Mengoptimalkan program kegiatan mengenai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Peningkatan keamanan kota melalui pencegahan, penyediaan fasilitas dan sistem penanganan kriminalitas dan konflik, serta memberdayakan modal sosial masyarakat kota yang berbasis TIK
		2	Belum optimalnya penerapan perda;	2	Mensosialisasikan penerapan PERDA Pelaksanaan pembinaan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan bupati secara terpadu
6	SOSIAL	1	Angka kemiskinan masih tinggi;	1	Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha Peningkatan pelaksanaan dan peningkatan keterpaduan program/kegiatan pengentasan kemiskinan baik prespektif gender Peningkatan akses dan penerimaan manfaat bagi penduduk miskin perempuan dan laki-laki terhadap pelayanan dasar, pelayanan dan rehabilitasi sosial, serta kesempatan kerja Peningkatan Peluang Kerja dan Berusaha bagi penduduk kurang mampu Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu
		2	Tingkat pengangguran terbuka masih terbilang cukup tinggi;	2	Penumbuhan wirausaha muda Peningkatan kerjasama lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga pemberi kerja Perluasan kesempatan kerja melalui Penciptaan lapangan kerja dan budaya masyarakat bekerja Peningkatkan pelatihan berbasis kompetensi



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		3 Penyandang masalah kesejahteraan sosial masih tinggi;	3 Perlu ada program/kegiatan yang difokuskan kepada pembinaan dan pengembangan kompetensi seperti pelatihan kerja. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi keluarga kurang mampu Peningkatan cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu
		4 Bencana banjir masih sering melanda pada wilayah-wilayah tertentu;	4 Perlunya sosialisasi tentang menjaga lingkungan.
7	TENAGA KERJA	1 Angka pengangguran masih relatif tinggi.	1 Menekan angka pengangguran dengan menyiapkan tenaga kerja siap pakai. Dan Meningkatkan investasi daerah dalam rangka penciptaan lapangan kerja serta
		2 Sumberdaya manusia tenaga kerja masih rendah dan belum berdaya saing.	2 Melaksanakan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diarahkan sesuai kebutuhan berdasarkan standar kompetensi perusahaan, yang didukung dengan sertifikasi profesi, pemagangan, pelayanan penempatan, peningkatan produktifitas tenaga kerja. Dan Meningkatkan program perluasan kesempatan kerja yang diarahkan untuk kegiatan kewirausahaan
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1 Masih adanya kejadian kasus kekerasan dalam rumah	1 Penguatan lembaga perlindungan anak.
		2 Anak jalanan, anak terlantar, anak korban narkoba dan anak putus sekolah masih ada.	2 Sosialisasi kepada masyarakat dan generasi muda tentang Narkoba Membuat Pelatihan/keterampilan anak putus sekolah.
9	PANGAN	1 Diversifikasi produk pangan lokal belum optimal	1 Melakukan sosialisasi Diversifikasi produk pangan lokal
		2 Menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk pangan lokal	2 Mengembangkan diversifikasi produk pangan olahan
10	PERTANAHAN	1 Penetapan batas wilayah kecamatan belum akurat;	1 Melakukan pengukuran batas wilayah Menetapkan batas wilayah kecamatan lewat PERBUP
11	LINGKUNGAN HIDUP	1 Meningkatnya dampak emisi gas rumah kaca;	1 Meningkatkan koordinasi dengan dinas terkait untuk bersama-sama melakukan pembinaan teknis dalam pengelolaan lingkungan Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati
		2 Menurunnya ketersediaan dan kualitas sumber air baku;	
		3 Meningkatnya pencemaran dan pengrusakan lingkungan;	2 Pengawasan bagi industry/usaha di Kabupaten Maros. Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan/ berkelanjutan;	3 Sosialisasi menyeluruh terhadap budaya hidup bersih dimasyarakat lebih ditingkatkan. Peningkatan peran serta sekolah, ormas/lembaga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan hidup Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R secara berkala
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1 Masih adanya masyarakat yang belum memahami pentingnya kepemilikan KTP	1 Menyusun data kependudukan dengan melibatkan pemerintah ditingkat bawah (kelurahan dan desa).
		2 Layanan administrasi kependudukan masih belum berjalan secara efisien dan efektif;	2 System penataan administrasi kependudukan ditingkat kelurahan dan desa agar setiap hari lebih up date.
		3 Ketersediaan sarana dan prasarana layanan administrasi kependudukan belum maksimal	3 Penambahan sarana dan prasarana kependudukan
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1 Masih rendahnya realisasi pelaksanaan program kegiatan Dana Desa.	1 Perlu dilaksanakan bimbingan teknis terhadap pemerintah desa tentang pelaksanaan penyusunan perencanaan Melaksanakan Evaluasi dan pemantapan penggunaan aplikasi keuangan Desa Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
		2 Perlunya dilakukan evaluasi atas pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan.	2 Monitoring dan Evaluasi pengeluaran ADD.
		3 Belum optimalnya perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat desa khususnya masyarakat miskin, marginal dan terpinggirkan.	3 Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa Melakukan pembinaan masyarakat desa khususnya masyarakat miskin Membentuk Labsite Desa Peningkatan alokasi dana desa dalam APBD sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku Melakukan pelatihan Keterampilan dan membentuk Pos pelayanan Teknologi tepat guna Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1 Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjadi akseptor KB;	1 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang keluarga berencana Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana Peningkatan peserta KB aktif dan KB mandiri
		2 Laju pertumbuhan penduduk masih relatif tinggi;	2 Program pemberdayaan keluarga sejahtera lebih ditingkatkan. Peningkatan Kerjasama dengan Kabupaten/Kota sekitar untuk pengendalian terhadap dampak negatif dari pertumbuhan penduduk Pengendalian angka Total Fertility Rate (TFR)
		3 Masih rendahnya tingkat kapasitas tenaga penyuluh KB;	3 Pelatihan kompetensi untuk tenaga penyuluh dan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Masih kurangnya sarana prasarana layanan KB.	Menambah jumlah sarana dan prasarana UPTD KB.
15	PERHUBUNGAN	1 Layanan transportasi angkutan umum belum memberikan jaminan 2 Terminal angkutan umum belum berfungsi dengan baik. 3 Masih rendahnya kedisiplinan masyarakat sebagai pengguna jalan 4 Masih rendahnya ketersediaan rambu- rambu lalu lintas	1 Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah Pembangunan dan pengembangan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi dengan pelayanan regional dan nasional Penyediaan prasarana fasilitas perlengkapan jalan Pelaksanaan pengujian kelayakan kendaraan angkutan umum (KIR) sesuai ketentuan
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1 Implementasi e-government dan pelayanan telekomunikasi belum optimal. 2 Infrastruktur sarana dan prasarana data centre harus senantiasa terpelihara. 3 Sarana dan prasarana TIK belum tersedia 4 Pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi belum tersed 5 Belum tersedianya jaringan sistem kebencanaan yang terintegrasi	1 Peningkatan prasarana dan sarana jaringan IT pada instansi, tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan sekolah-sekolah didukung kompetensi sumber daya manusia di bidang teknis IT 2 Penyediaan infrastruktur Pengendalian keamanan data dan informasi (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras) Program pemeliharaan infrastruktur lebih ditingkatkan Pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan publik secara integratif, aman, mudah, murah, dan
17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1 Belum tersedianya data pelaku UMKM yang akurat; 2 Tingkat kapasitas SDM pelaku UMKM masih rendah 3 Masih tingginya koperasi yang tidak aktif	1 Melakukan pencatatan data pelaku UMKM yang sudah terlegalitas (memiliki izin) 2 Menyelenggarakan program pelatihan kompetensi SDM Pelaku Koperasi dan UMKM Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna 3 Memfasilitasi kemitraan koperasi dengan perusahaan swasta dan Perbankan. Mendorong partisipasi masyarakat dalam berkoperasi Peningkatan Pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi Peningkatan proporsi jumlah koperasi sehat melalui penataan kelembagaan dan pembinaan usaha
18	PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan investasi masih belum optimal 2 Pelayanan perijinan berinvestasi belum efektif	1 Meningkatkan informasi penanaman modal yang berbasis Informasi Teknologi dalam mendukung iklim investasi di daerah. Melakukan Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan Melakukan Pelayanan Perizinan keliling di 14 Kecamatan
19	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	1 Masih terbatas sarana dan prasarana olah raga;	1 Meningkatkan anggaran pembangunan sarana olahraga.



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan masih relatif rendah;	2 Menggalakkan olahraga di masyarakat dengan penyelenggaraan perlombaan olahraga.
		3 Pembinaan terhadap peningkatan prestasi olahraga masih kurang	3 Meningkatkan pembinaan cabang olahraga dengan memberikan insentif bagi cabang olahraga dan atlet.
20	STATISTIK	1 Profil daerah yang berkualitas harus senantiasa tersedia	1 Menyediakan profil daerah yang mudah diakses (pada website daerah)
		2 Ketersediaan Kabupaten dalam angka dan PDRB harus tepat waktu	2 Merekrut tenaga dalam pengambilan data untuk penyusunan data Kabupaten Data Membuat jejaring ke instansi untuk mengirimkan data yang dibutuhkan
21	PERSANDIAN	1 Jaringan komunikasi persandian belum tersedia	1 Membuat Jaringan komunikasi persandian
		2 Belum terdatanya aplikasi OPD secara menyeluruh	2 Mendata aplikasi OPD secara menyeluruh
22	PERPUSTAKAAN	1 Masih rendahnya minat baca masyarakat.	1 Melakukan sosialisasi Pemasarakan literasi Kepada masyarakat dan sekolah tentang Penting Membaca Road Show Gerakan gemar membaca Bagi pelajar
		2 Ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang perpustakaan
		3 Regulasi tentang Perpustakaan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi keperputakaan Membuat peraturan Bupati tentang Perpustakaan
23	KEARSIPAN	1 Belum memadainya SDM tentang kearsipan;	1 Perlu penambahan petugas arsip daerah dan peningkatan kompetensinya dalam mengelola arsip.
		2 Sarana prasarana kearsipan masih terbatas	2 Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kearsipan
		3 Regulasi tentang kearsipan belum berjalan secara maksimal	3 Mengusulkan Regulasi kearsipan Membuat peraturan Bupati tentang Kearsipan
24	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1 Masih tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove.	1 Sosialisasi sangat dibutuhkan kepada masyarakat dan perlu ditingkatkan intensitasnya agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami penting Hutan mangrove
		2 Belum optimalnya pembinaan terhadap kelompok- kelompok petani pembudidaya dan nelayan.	2 Pembinaan Kelompok petani Pembudidaya dan nelayan Peningkatan kinerja sumber daya manusia dan kelembagaan perikanan.
		3 Masih rendahnya pendapatan petani.	3 Bantuan dana dari pemerintah pusat masih sangat dibutuhkan Bantuan Pemasaran untuk hasil olah ikan. Peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Peningkatan produksi perikanan dan kelautan



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		4 Sarana prasarana jalan produksi masih belum optimal	4 Menyediakan sarana dan prasarana jalan produksi
25	KEBUDAYAAN	1 Nilai – nilai budaya yang ada dalam masyarakat harus senantiasa dijaga dan dilestraiakan. 2 Ketersediaan dan SDM pelaku budaya masih sangat terbatas	1 Perlunya meningkatkan pembinaan dengan sasaran pelaku seni generasi muda melalui berbagai ajang festival seni budaya daerah maupun pengiriman kontingen atau duta seni budaya ke luar daerah untuk menambah wawasan dan kreatifitas serta promosi seni budaya ke luar daerah.
26	PARIWISATA	1 Belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata 2 Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan tempat-tempat wisata belum maksimal 3 Pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata belum optimal	1 Perlu adanya dukungan penambahan event/kegiatan pariwisata 2 Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat baik itu pelatihan/kursus bahasa, pembuatan produk dan kursus pendukung lainnya 3 Lebih meningkatkan promosi wisata baik ditingkat nasional maupun manca negara.
27	PERTANIAN	1 Berkurangnya lahan / areal persawahan akibat alih fungsi lahan 2 Kontribusi sektor pertanian terhadap 3 Wabah antraks masih sering terjadi; 4 Produksi dan produktivitas perkebunan masih rendah	1 Perlu dibuat regulasi Peraturan daerah tentang penguatan lahan pertanian dalam rangka mengatasi alih fungsi lahan akibat perkembangan kota maros. dan Cetak sawah baru 2 Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan produksi padi dengan melakukan penerapan 3 Sosialisasi pencegahan wabah antraks 4 Pemenuhan sarana prasarana infrastuktur pertanian Pembinaan, pemberdayaan dan pendampingan bagi kelompok tani
28	PERDAGANGAN	1 Adanya perdagangan bebas yang menjadi tantangan bagi daerah; 2 Sarana prasarana pasar tradisional belum memadai; 3 Sarana prasarana pasar harus selalu terpelihara dan dalam kondisi yang Baik	1 Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagangan tentang perdagangan bebas dan Bimbingan teknis tentang Daya Saing Pemanfaatan Inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam peningkatan produksi dan pemasaran produk usaha 2 Penyediaan dan peningkatan sarana ekonomi, khususnya sektor perdagangan dan jasa termasuk perbaikan pasar tradisional 3 Memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pemeliharaan sarana dan prasarana kepada pedagang pasar serta anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana pasar ditingkatkan
29	PERINDUSTRIAN	1 Terbatasnya lahan bagi industri berskala menengah dan besar;	1 Membuat regulasi Pengembangan Sentra Industri sebagai cikal bakal kawasan industri Maros yang terintegrasi dengan sumber bahan baku lokal dan pemasaran produksi hasil industri



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Industri- industri potensial harus senantiasa dikembangkan	2 Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan dan Produktivitas Pelaku sektor industri kreatif. Pengembangan hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat Peningkatan Kualitas SDM Usaha mikro dalam pengaplikasian teknologi tepat guna
		3 Belum terpromosinya industri-industri kecil;	3 Melakukan promosi hasil produksi masyarakat pelaku IKM (Industri kecil menengah) Pembentukan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat Memantau serta mengembangkannya secara berkelanjutan. Membangun Show Room Untuk Hasil Olahan Masyarakat Pelaku IKM
30	TRANSMIGRASI	1 Animo masyarakat untuk bertransmigrasi lokal relatif rendah dan ketidakpastian transmigrasi;	1 Menyelenggarakan Bimbingan dan fasilitasi serta sosialisasi ketransmigrasian
		2 Semakin rendahnya transmigrasi umum dan transmigrasi swakarya Mandiri	2
32	KEPEGAWAIAN	1 Belum optimalnya kompetensi ASN yang sesuai dengan unit kerja Perangkat Daerah;	1 Peninjauan kembali terhadap kesesuaian lembaga/struktur OPD dengan tugas pokok dan fungsinya. Uji Kompetensi Jabatan struktural dan Fungsional Administrasi Mutasi ASN Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya manusia aparatur melalui pendidikan, pelatihan, uji kompetensi, pemberian reward, dan penerapan punishment.
		2 Masih belum optimalnya pembinaan disiplin dan terdapat ASN yang tidak disiplin di setiap unit kerja;	2 Penanganan kasus- kasus pelanggaran disiplin dan kode etik ASN Penegakan Disiplin Aparatur
		3 Jumlah ASN yang lebih besar daripada beban kerja yang terdapat pada setiap unit kerja utamanya yang berposisi sebagai tenaga administrator dan pengarsipan, sedangkan disisi lain ASN yang berposisi pada jabatan fungsional terutama tenaga pendidik, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan dan tenaga fungsional tertentu belum mencukupi untuk memenuhi beban kerja yang ada.	3 Penyusunan Dokumen Analisa Beban Kerja Perekrutan/penerimaan CPNS dan P3K untuk jabatan fungsional Peningkatan kualitas, ketersediaan, dan pemanfaatan Data dan Informasi yang terpilah sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan Daerah.
33	PERENCANAAN	1 Integrasi perencanaan dan penganggaran yang belum optimal;	1 Pemanfaatan Teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERMASALAHAN	SOLUSI
		2 Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana;	2 Peningkatan kapasitas tenaga perencana, baik di Bappeda maupun yang ada di masing-masing OPD melalui Diklat/Bimtek perencanaan
		3 Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah	3 Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah maupun lembaga kemsyarakatan lainnya
		4 Belum optimalnya kerjasama pembangunan dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat	
		5 Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	6 Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah
34	KEUANGAN	1 Belum optimalnya pendapatan asli daerah khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terlihat dari persentase besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD pada tahun sebelumnya	1 Mempersingkat Regulasi Pemungutan pajak Membuat Peraturan Tentang Mekanisme pajak BPHTB Pencatatan kembali Pajak Per-Tahun Melakukan Monitoring dan Evaluasi Melakukan sosialisasi Pajak
		2 Kurangnya penerapan standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah	2 Dibuatkan aplikasi pelayanan pemungutan pajak (secara Online) Dibuatkan SOP standar pelayanan
		3 Belum optimalnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acrual	3 Memberikan pelatihan kompetensi tentang manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis acrual



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa. Dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau Kabupaten/kota dan/atau Desa, sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan.

Pengalokasian dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi antara program dan kegiatan tugas pembantuan yang didanai oleh APBN.

3.1. Dasar hukum Penyelenggaraan tugas Pembantuan

Dasar hukum atau peraturan yang digunakan secara umum dalam pengelolaan pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan tugas pembantuan adalah :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional;
3. Undang – Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Keuangan Daerah; dan



6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

3.2. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan

3.2.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Maros tidak menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat diakibatkan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19.

3.2.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten Maros

Pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Maros tidak menerima anggaran Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat diakibatkan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemic COVID-19.

3.3. Permasalahan dan Kendala

Adanya pandemi COVID-19 yang masih terjadi pada tahun 2022 mengakibatkan tidak adanya terlaksananya tugas pembantuan di Kabupaten Maros sehingga memunculkan suatu kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan pada daerah-daerah yang masih sangat membutuhkan anggaran tambahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Diharapkan untuk tahun 2022 ini, pemerintah melalui Kementerian tetap menganggarkan ataupun menyalurkan anggaran tugas pembantuan mengingat adanya tren penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia, sehingga hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang bisa mendorong dan membantu daerah-daerah untuk dapat meningkatkan seluruh aspek yang berdampak baik kepada Masyarakat.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pencapaian dan penerapan SPM yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai dengan akhir tahun anggaran sesuai target yang telah ditetapkan oleh Kementerian / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) pusat masing-masing bidang SPM dan diharapkan setiap SKPD dapat mengintegrasikan program kegiatan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Kegiatan ini sangat penting karena indikator-indikator yang terdapat pada setiap bidang SPM merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Penerapan dan pencapaian ini dimaksudkan untuk memenuhi regulasi yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Nomor 100/1023/SJ Tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di daerah, tertanggal 26 Maret 2012 bahwa setiap Pemerintahan Daerah harus melaporkan kegiatan SPMnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah.

Penerapan dan pencapaian ini juga memberikan informasi mengenai capaian kinerja pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta secara teknis dijelaskan secara rinci melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian SPM di Kabupaten Maros, sangat membantu penyusunan rencana pencapaian SPM yang lebih realistis dan dapat dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pencapaian SPM di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar.



Profil singkat pelayanan dasar Kabupaten Maros merupakan sekumpulan data dan informasi yang dikumpulkan, distrukturkan dan diolah untuk menggambarkan kondisi pelayanan dasar sebagai bahan masukan dalam menyusun dan mengembangkan rencana pencapaian SPM ke depan. Profil pelayanan dasar disusun melalui pengumpulan data dan informasi pencapaian SPM di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah tersedia dan/atau data dan informasi yang dihasilkan dari proses diskusi yang dilakukan selama proses penggalian data dan informasi di Kabupaten Maros.

Profil pelayanan dasar menggambarkan kondisi pencapaian SPM di Kabupaten Maros melalui data dan informasi yang dikumpulkan oleh setiap SKPD pemangku SPM dan pemangku kepentingan. Proses pengumpulan data dan informasi melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Penyusunan profil difokuskan kepada data dan informasi merujuk pada indikator-indikator SPM.

Di bawah ini akan diuraikan kompilasi masing-masing bidang SPM yang terdiri atas kriteria indikator yang belum, sudah memenuhi dan melampaui dari target nasional yang telah ditetapkan. Kriteria tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisa dalam pengumpulan data dan informasi sesuai dengan indikator bidang masing masing SPM. Hasil analisis untuk kriteria setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM dan setiap indikator sebagai berikut :

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

1. pendidikan anak usia dini;
2. pendidikan dasar; dan
3. pendidikan kesetaraan

Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalah sebagai berikut :



- a. Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini.
 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten/Kota.
 4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat
- b. Jenis pelayanan minimal Urusan Pendidikan Dasar tahun 2022 adalah sebagai berikut :
 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun.
 2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar
 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten.
 4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat
- c. Jenis pelayanan minimal urusan Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 adalah sebagai berikut:
 1. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun
 2. Kurikulum yaitu penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Non Formal
 3. Pendidikan dan tenaga kependidikan yaitu pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah Kabupaten
 4. Perizinan Pendidikan yaitu penerbitan Pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.



4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal :

Tabel. 2.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	15.272	15.272	100 %
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	66.206	66.206	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	420	420	100 %

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas dapat di deskripsikan bahwa rencana target capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan adalah 100 %, hal ini sesuai dengan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4.1.3. Anggaran

Alokasi Anggaran untuk pemenuhan SPM Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel.2.2
Alokasi Anggaran SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	10.896.268.600,-	10.629.143.000,-	97,55 %	APBD
2	Pendidikan Dasar	82.468.026.350,-	64.277.383.543,-	77,94 %	APBD
3	Pendidikan Kesetaraan	724.440.000,-	523.800.000,-	77,30 %	APBD
Total Anggaran SPM		94.088.734.950,-	75.430.326.543,-	80,17 %	
Total Anggaran SKPD		381.666.920.053,-	343.785.988.399,-	90,72 %	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		24,62 %	21,94 %		

4.1.4. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 2.3
Daftar Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	40	17	57
2	GOL. III	25	28	53
3	GOL. II	13	8	21
4	GOL. I	1	0	1
JUMLAH		79	53	132

Sumber data BPKSDM

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :



Tabel. 2.4
Daftar Guru PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Jenis PAUD

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK PAUD		TOTAL
		TK/KB	RA	
1	Bantimurung	71	7	78
2	Camba	48	0	48
3	Cenrana	55	0	55
4	Lau	58	10	68
5	Mallawa	51	0	51
6	Mandai	96	28	124
7	Maros Baru	72	3	75
8	Bontoa	88	5	93
9	Marusu	61	4	65
10	Moncongloe	79	6	85
11	Simbang	68	13	81
12	Tanralili	91	17	108
13	Tompobulu	39	4	43
14	Turikale	107	28	135
JUMLAH		984	125	1109

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

Sedangkan Penilik PAUD yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.5
Daftar Penilik PAUD Kabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah Kecamatan	Penilik PAUD		
		L	P	JUMLAH
1	Turikale	2	1	3
2	Maros Baru	-	2	2
3	Mandai	2	-	2



No.	Wilayah Kecamatan	Penilik PAUD		
		L	P	JUMLAH
4	Bontoa	3	-	3
5	Lau	1	-	1
6	Tanralili	2	1	3
7	Tompobulu	1	-	1
8	Moncongkoe	1	-	1
9	Bantimurung	1	-	1
10	Simbang	2	-	2
11	Cenrana	1	-	1
12	Camba	2	-	2
13	Mallawa	2	-	2
14	Marusu	1	-	1
	JUMLAH	21	4	25

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Than 2022

Secara umum jumlah Lembaga dan jumlah peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.6
Jumlah Lembaga PAUD Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH LEMBAGA		Total
		PAUD/KB	RA	
1	Bantimurung	16	2	18
2	Camba	15	0	15
3	Cenrana	17	0	17
4	Lau	12	3	15
5	Mallawa	14	0	14
6	Mandai	30	5	35
7	Maros Baru	19	1	20
8	Bontoa	22	1	23



9	Marusu	13	1	14
10	Moncongloe	21	1	22
11	Simbang	21	4	25
12	Tanralili	28	4	32
13	Tompobulu	12	1	13
14	Turikale	27	7	34
JUMLAH		267	30	297

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

Tabel.2.7
Jumlah Peserta Didik PAUD Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA DIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	443	511	954
2	Camba	178	193	371
3	Cenrana	251	268	519
4	Lau	477	385	862
5	Mallawa	172	175	347
6	Mandai	881	826	1707
7	Maros Baru	415	450	865
8	Bontoa	575	594	1169
9	Marusu	464	484	948
10	Moncongloe	484	430	914
11	Simbang	275	388	663
12	Tanralili	764	709	1473
13	Tompobulu	253	262	515
14	Turikale	914	794	1708
JUMLAH		6.546	6.469	13.015

Sumber data :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022



b. Pendidikan Dasar

Jumlah guru SD sebagai berikut :

Tabel 2.8
Daftar Guru SD Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	59	186	245
2	Camba	43	101	144
3	Cenrana	44	101	145
4	Lau	41	136	177
5	Mallawa	48	90	138
6	Mandai	53	219	272
7	Maros Baru	41	128	169
8	Bontoa	54	156	210
9	Marusu	58	122	180
10	Moncongloe	24	75	99
11	Simbang	45	118	163
12	Tanralili	41	148	189
13	Tompobulu	40	75	115
14	Turikale	56	254	310
JUMLAH		647	1.909	2.556

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Tabel 2.9
Daftar Guru SMP Kabupaten Maros

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Bantimurung	52	97	149
2	Camba	47	51	98
3	Cenrana	27	48	75



NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDIDIK		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
4	Lau	42	102	144
5	Mallawa	34	42	76
6	Mandai	49	141	190
7	Maros Baru	32	59	91
8	Bontoa	43	67	110
9	Marusu	45	57	102
10	Moncongloe	36	41	77
11	Simbang	38	64	102
12	Tanralili	32	50	82
13	Tompobulu	27	34	61
14	Turikale	44	120	164
JUMLAH		548	973	1521

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

Sedangkan Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :

Tabel. 2.10
Daftar Pengawas SD Sekabupaten Maros Berdasarkan Wilayah

No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
1	Mallawa	1	1	2
2	Camba	2	-	2
3	Cenrana	2	-	2
4	Simbang	1	1	2
5	Bantimurung	2	1	3
6	Turikale	1	1	2



No.	Wilayah Kecamatan	Pengawas SD		
		L	P	JUMLAH
7	Tompobulu	2	-	2
8	Maros Baru	2	-	2
9	Lau	1	1	2
10	Bontoa	2	1	3
11	Marusu	1	1	2
12	Mandai	1	-	1
13	Tanralili	2	-	2
14	Moncongloe	1	-	1
	JUMLAH	21	7	28

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Tabel. 2.11
Daftar Pengawas SMP Kabupaten Maros Berdasarkan Bidang Studi

No.	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
1	Matematika	1	-	1
2	IPA	2	-	2
3	IPS	-	-	-
4	Bahasa Inggris	2	-	2
5	Bahasa Indonesia	-	-	-
6	PKN	1	-	1
7	PAI	-	-	-
8	Seni Budaya	-	-	-
9	Prakarya	-	-	-
10	Muatan Lokal	-	-	-



No.	Bidang Studi	Pengawas SMP		
		L	P	Jumlah
11	Penjaskes	-	-	-
	JUMLAH	6	-	6

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

Secara umum kondisi Pendidikan di Kabupaten Maros dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Satuan Pendidikan Dasar

Tabel.2.12
Jumlah Sekolah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Sekolah	Keterangan
1	SD	243	
2	MI	28	
3	SMP	75	
4	MTs	44	
	TOTAL	390	

Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022

2. Peserta Didik

Tabel 2.13
Jumlah Peserta Didik Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
1	SD	42.386	
2	MI	3.455	
	Jumlah	45.841	
3	SMP	16.582	
4	MTs	5.037	



NO	Uraian	Jumlah Peserta Didik	Keterangan
	Jumlah	21.619	
	TOTAL	67.460	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

3. Ruang Kelas

Tabel 2.14
Jumlah Ruang Kelas Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Ruang Kelas	Keterangan
1	SD	1.724	
2	MI	-	
3	SMP	576	
4	MTs	-	
	TOTAL	2.300	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

4. Rombongan Belajar

Tabel 2.15
Jumlah Rombongan Belajar Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Uraian	Jumlah Rombongan Belajar	Keterangan
1	SD	1.724	
2	MI		
3	SMP	576	
4	MTs		
	TOTAL	2.300	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

c. Pendidikan Kesetaraan

Daftar Tutor Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros digambarkan pada tabel berikut :



Tabel. 2.16
Daftar Tutor Paket A Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket A		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	-	4	4
2	Camba	-	-	-
3	Cenrana	-	4	4
4	Lau	-	-	-
5	Mallawa	-	-	-
6	Mandai	5	4	9
7	Maros Baru	-	-	-
8	Bontoa	-	-	-
9	Marusu	-	-	-
10	Moncongloe	-	-	-
11	Simbang	-	-	-
12	Tanralili	1	3	4
13	Tompobulu	2	3	5
14	Turikale	-	-	-
	JUMLAH	8	18	26

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn 2022

Tabel. 2.17
Daftar Tutor Paket B Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket B		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	4	5	
2	Camba	-	-	
3	Cenrana	1	5	



No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket B		
		L	P	JUMLAH
4	Lau	1	5	
5	Mallawa	-	-	
6	Mandai	4	3	
7	Maros Baru	-	-	
8	Bontoa	-	-	
9	Marusu	-	-	
10	Moncongloe	-	-	
11	Simbang	-	-	
12	Tanralili	-	-	
13	Tompobulu	2	5	
14	Turikale	-	-	
	JUMLAH	12	23	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Tabel. 2.18
Daftar Tutor Paket C Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket C		
		L	P	JUMLAH
1	Bantimurung	5	6	
2	Camba	-	-	
3	Cenrana	2	5	
4	Lau	2	5	
5	Mallawa	-	-	
6	Mandai	6	5	
7	Maros Baru	-	-	
8	Bontoa	-	-	
9	Marusu	-	-	



No.	Wilayah Kecamatan	Tutor Paket C		
		L	P	JUMLAH
10	Moncongloe	-	-	
11	Simbang	-	-	
12	Tanralili	3	8	
13	Tompobulu	3	7	
14	Turikale	-	-	
	JUMLAH	21	36	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Gambaran Pendidikan Kesetaraan yang ada di Kabupaten Maros, dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Lembaga yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan

Tabel. 2.19
Lembaga Yang Menyenggarakan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Maros

NO	LEMBAGA	KECAMATAN	STATUS LEMBAGA	
			NEGERI	SWASTA
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	Bantimurung	√	-
2	PKBM MAWAR	Lau	-	√
3	PKBM MATTIRO SAWE	Mandai	-	√
4	PKBM TANRALILI	Tanralili	-	√
5	PKBM TOMPOBULU	Tompobulu	-	√
6	PKBM DELIA CENRANA	Cenrana	-	√

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

2. Warga belajar

Tabel 2.20
Jumlah Peserta Paket A Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	10



No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
2	Camba	0
3	Cenrana	15
4	Lau	10
5	Mallawa	0
6	Mandai	15
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	18
12	Tanralili	0
13	Tompobulu	10
14	Turikale	21
	JUMLAH	99

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Tabel 2.21
Jumlah Peserta Paket B Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	15
2	Camba	0
3	Cenrana	20
4	Lau	20
5	Mallawa	0
6	Mandai	21
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0



No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	27
12	Tanralili	0
13	Tompobulu	13
14	Turikale	25
	JUMLAH	141

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Tabel 2.22
Jumlah Peserta Paket C Kabupaten Maros Tahun 2022

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta Didik
1	Bantimurung	25
2	Camba	0
3	Cenrana	25
4	Lau	30
5	Mallawa	0
6	Mandai	24
7	Maros Baru	0
8	Bontoa	0
9	Marusu	0
10	Moncongloe	0
11	Simbang	25
12	Tanralili	0
13	Tompobulu	17
14	Turikale	34
	JUMLAH	180



Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

3. Ruang kelas

Tabel 2.23

Jumlah Ruang Kelas SPNF dan PKBM Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Ruang Belajar	Keterangan
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	
2	PKBM MAWAR	3	
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	
4	PKBM TANRALILI	3	
5	PKBM TOMPOBULU	6	
6	PKBM DELIA CENRANA	7	
	JUMLAH	33	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

4. Rombongan belajar

Tabel 2.24

Jumlah Rombongan Belajar Kesetaraan Kabupaten Maros

No.	Wilayah Kecamatan	Jumlah Rombel	Keterangan
1	SKB/SPNF BANTIMURUNG	7	
2	PKBM MAWAR	3	
3	PKBM MATTIRO SAWE	7	
4	PKBM TANRALILI	2	
5	PKBM TOMPOBULU	6	
6	PKBM DELIA CENRANA	7	
	JUMLAH	32	

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Th. 2022

4.1.5. Hasil Capaian

Realisasi target pencapaian SPM Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

:



Tabel. 2.25
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	15.272	13.015	85,22%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	66.206	66.160	93,93 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan	420	420	100 %

Sumber data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Thn. 2022

Berdasarkan Tabel 2.25 di atas dapat di deskripsikan bahwa target capaian SPM untuk Pendidikan Anak Usia Dini sebesar 85,22 %, Pendidikan Dasar 99,93 % dan Pendidikan Kesetaraan sebesar 100 %. Pada tahun 2022 ini capaian SPM Bidang Pendidikan yang mencapai target yang telah ditentukan terdapat pada Layanan Layanan Pendidikan Kesetaraan telah mencapai 100 %. Sementara untuk Layanan SPM Pendidikan PAUD dan Pendidikan Dasar capaiannya masih dibawah target yang telah ditentukan berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021.

Capaian SPM dan Capaian Mutu Layanan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini



Tabel 2.26

Capaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini				
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
		15.272	13.015	2.257	85,22
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Buku gambar	16,396	10,463	5,933	63,81
	Alat mewarnai	8,198	7,535	0,663	91,91
	Penyediaan biaya personil Peserta Didik	4,606	2,5	2,106	54,28
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	245	183	62	74,69
	Pendidikan Anak Usia Dini				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	638	332	306	52,04

Sumber Data : Aplikasi E SPM Bangda Kemendagri Tahun 2022



2. Pendidikan Dasar

Tabel 2.27
Capaian SPM Pendidikan Dasar

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Dasar				
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
		66.206	66.160	46	99,93
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Buku teks pelajaran	110.104	63.442	46.662	57,62
	Perlengkapan belajar	16.035	10.335	5.700	64,45
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi S1/D-IV	305	298	7	97,70
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	1.107	861	246	77,78
	Jumlah rombongan belajar di satuan pendidikan	2.833	2.300	533	81,19
	Penyediaan biaya personil peserta didik	47.140	17.838	29.302	37,84
	Pendidikan Dasar				
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Kualitas pendidik yang	4.315	3.766	549	87,28



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	berkualifikasi S1/D-IV				
	Satuan pendidikan yang berakreditasi minimal C	316	304	12	96,20

Sumber Data : Aplikasi E SPM Bangda Kemendagri Tahun 2022

3. Pendidikan Kesetaraan

Tabel 2.28

Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1.	Pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	%
		420	420	0	100,00
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Modul belajar	990	420	570	42,42
	Jumlah rombongan belajar di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	53	42	11	79,25
	Penyediaan biaya personil peserta didik	250	135	115	54,00
	Kualitas pendidik yang berkualifikasi S1/D-IV	126	72	54	57,14
	Kualitas tenaga kependidikan (Kepala Sekolah) yang berkualifikasi	7	6	1	85,71



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	S1/D-IV				
Pendidikan Kesetaraan					
		Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	Persentase capaian mutu %
	Kualitas tenaga kependidikan (Tenaga Admin/Tenaga Lab/Admin) yang berkualifikasi SMA/ sederajat	7	6	1	85,71
	Perlengkapan belajar	200	120	80	60,00
	PKBM Terakreditasi minimal C	7	6	1	85,71

5. Kendala yang dihadapi Daerah dalam penerapan SPM

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dilakukan identifikasi permasalahan terkait dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	a. Struktur Pendataan yang belum terstandarisasi b. Entri data/penginputan data yang tidak konsisten. c. ketidakakuratan data / informasi yang diperoleh dari pengelola data. d. Adanya Perbedaan data dari beberapa indicator. e. terdapatnya informasi ganda dalam pengumpulan dan	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan.



No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
		pengolahan data.	
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan <i>by name by adress</i> b. Perhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD c. Perhitungan jumlah tenaga pendidik pada sating wilayah. d. Perhitungan kebutuhan penanganan social bagi anak putus sekolah belum memadai. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Perhitungan Kebutuhan Anak tidak sekolah memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak ketiga yang secara khusus menangani/ mengumpulkan data anak tidak sekolah. b. Menyesuaikan jumlah siswa, sekolah dan tenaga pendidik yang terdapat dalam satu wilayah.
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. b. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah. 	<p>Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM.</p> <p>Mengalokasikan dana/ Anggaran</p>
4.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah/ lokasi pemenuhan. b. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dapat dipenuhi. c. Minimannya sumberdaya yang tersedia 	<p>Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.</p>
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-

4.1. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Kesehatan yang dilaksnakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 adalah sebagai berikut :



- a. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- h. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- i. Cakupan Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- k. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.32
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	6.434	6.434	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.434	6.434	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar			
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan	6.434	6.434	100 %



		peayanan kesehatan			
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	29.782	29.782	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	58.275	58.275	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah orang berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	157.077	157.077	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	27.918	27.918	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.401	2.401	100 %
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	871	871	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.708	5.708	100 %
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	8.123	8.123	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros



4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.36
Realisasi Capaian SPM urusan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Standar	6.434	6.535	101,57%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	jumlah ibu hamil yang mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes)	6.434	6.584	102,33%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	6.434	6.533	101,54%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang berumur 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan	29.782	29.341	98,52%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	58.275	59.644	102,35%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	157.077	140.280	89,31%
7	Pelayanan	Jumlah orang	27.918	23.381	83,75%



	Kesehatan Pada Usia Lanjut	berusia lebih dari 60 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar			
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	24.315	8.872	36,49%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah orang yang berusia 15 tahun keatas yang menderita Diabet Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	2.401	1.714	71,39%
10	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	871	823	94,49%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	5.708	5.433	95,18%
12	Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang orang terduga beresiko Terinfeksi virus HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar	8.123	8.487	104,48%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel. 2.37
Alokasi Anggaran SPM urusan kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.641.691.600	1.150.925.200	43,57	DAK NF (BOK)
2	Pelayanan kesehatan Ibu bersalin	382.275.200	227.447.200	59,50	DAK NF (BOK)
3	Pelayanan kesehatan Bayi baru lahir	144.020.000	99.560.000	69,13	DAK NF (BOK)
4	Pelayanan kesehatan Balita	1.906.867.000	1.701.532.000	89,23	DAK NF (BOK)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	608.835.000	461.870.000	75,86	DAK NF (BOK)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	954.894.600	542.389.000	56,80	DAK NF (BOK)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	51.037.200	45.577.200	89,30	DAK NF (BOK)
8	Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	215.460.000	128.660.000	59,71	DAK NF (BOK))
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus (DM)			0,0	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	489.200.000	322.820.000	65,99	DAK NF (BOK)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	356.240.000	247.250.000	69,41	DAK NF (BOK)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	457.633.000	308.350.000	67,38	DAK NF (BOK)
Total Anggaran SPM		4.210.118.000	8.208.153.600	5.236.380.600	63,79
Total Anggaran SKPD			215.460.000	128.660.000	59,71
Persentase Alokasi Anggaran SPM		200.783.636.889			

4.2.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros digambarkan sebagai berikut:



Tabel. 2.3
Daftar Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Maros Berdasarkan Golongan

NO	GOL	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	GOL. IV	18	48	66
2	GOL. III	155	906	1.061
3	GOL. II	41	136	177
4	GOL. I	0	0	1
	JUMLAH	214	1.090	1.304

Sumber data BPKSDM

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten Maros pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	<ol style="list-style-type: none">Struktur Pendataan yang belum terstandarisasiEntri data/penginputan data yang tidak konsisten.ketidakakuratan data / informasi yang diperoleh dari pengelola data.Adanya Perbedaan data dari beberapa indicator.terdapatnya informasi ganda dalam pengumpulan dan pengolahan data.	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Pendidikan.
2.	Penghitungan Kebutuhan	<ol style="list-style-type: none">Perhitungan Anak tidak Sekolah yang dilakukan by name by adressPerhitungan kebutuhan biaya Pendidikan yang harus disesuaikan	<ol style="list-style-type: none">Perhitungan Kebutuhan Anak tidak sekolah memungkinkan untuk dilakukan oleh pihak ketiga yang secara khusus



		dengan jumlah pagu anggaran yang dikelola OPD c. Perhitungan jumlah tenaga pendidik pada setiap wilayah. d. Perhitungan kebutuhan penanganan social bagi anak putus sekolah belum memadai.	menangani/ mengumpulkan data anak tidak sekolah. 2. Menyesuaikan jumlah siswa, sekolah dan tenaga pendidik yang terdapat dalam satu wilayah.
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	a. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. b. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam penanganan Anak Tidak sekolah.	Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. Mengalokasikan dana/ Anggaran
4.	Pelaksanaan	a. Aspek pelayanan pemenuhan SPM yang terkendala oleh wilayah/ lokasi pemenuhan. b. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh bebepa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dipenuhi. c. Minimannya sumberdaya yang tersedia	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-

Realisasi SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Maros tahun 2022 belum semuanya mencapai target 100%. Beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu :



1. Indikator pelayanan kesehatan Balita dengan capaian 98,52% karena belum semua orang tua yang memiliki Balita berkunjung ke Posyandu terutama bagi kedua orang tua yang bekerja sehingga masih terdapat 441 Balita yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8 (Delapan) kali dalam setahun berupa penimbangan berat badan; pengukuran panjang/tinggi badan; pemantauan perkembangan; pemberian kapsul vitamin A; pemberian imunisasi dasar lengkap (IDL) dan imunisasi lanjutan pada Balita meskipun Petugas Kesehatan telah melaksanakan sweeping namun masih belum ditemukan dirumah karena kesibukan orang tua yang bekerja di sawah, kebun maupun kantor.
2. Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif dengan capaian 89,31%, yang disebabkan karena :
 - a. Sasaran usia produktif banyak yang bekerja di luar wilayah Kabupaten Maros sehingga menyulitkan Tenaga Kesehatan untuk melakukan screening di hari kerja.
 - b. Belum semua sasaran usia produktif melakukan screening sesuai dengan standar akibat kurangnya ketersediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) pada awal tahun 2022.
3. Indikator pelayanan kesehatan pada usia lanjut usia dengan capaian 83,75% karena tidak tersedianya bahan medis habis pakai (BMHP) sejak awal tahun 2022.
4. Indikator pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dengan capaian 36,49%, yang disebabkan karena :
 - a. Penderita Hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin sehingga menyebabkan DO (setiap penderita Hipertensi wajib mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulan selama satu tahun).
 - b. Data hasil pelayanan penderita Hipertensi dari jejaring Puskesmas (Klinik, Dokter praktek mandiri, dll) masih kurang maksimal.
5. Indikator pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Mellitus dengan capaian 71,39%, yang disebabkan karena :
 - a. Ketersediaan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) masih kurang.



- b. Penderita Diabetes Mellitus tidak melakukan pengobatan secara rutin sehingga menyebabkan DO (setiap penderita Hipertensi wajib mendapatkan pelayanan kesehatan setiap bulan selama satu tahun).
 - c. Data hasil pelayanan penderita Diabetes Mellitus dari jejaring Puskesmas (Klinik, Dokter praktek mandiri, dll) masih kurang maksimal.
6. Indikator pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat dengan capaian 94,49%, yang disebabkan karena :
- a. Ketersediaan obat penyakit ODGJ berat masih kurang.
 - b. Belum semua penderita ODGJ berat terdaftar sebagai peserta BPJS
 - c. Beberapa penderita ODGJ berat yang telah meninggal dunia dan pindah wilayah dari Kabupaten Maros
 - d. Masih kurangnya *supporting* dari keluarga penderita ODGJ berat untuk melakukan pengobatan secara rutin.
7. Indikator pelayanan kesehatan orang terduga TB dengan capaian 95,18% yang disebabkan oleh :
- a. Target untuk pelayanan kesehatan orang terduga TB merupakan data proyeksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan data riil yang berada di wilayah kerja Kabupaten Maros.
 - b. Keluhan pada saat batuk masih dianggap hal yang biasa karena sebagian masyarakat yang menganggap batuk bukan masalah kesehatan yang serius dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain sehingga bagi penderita batuk tersebut malas memeriksakan diri ke fasyankes meskipun telah diberikan edukasi dari kader/petugas kesehatan.
 - c. Belum semuanya suspek penderita TB mematuhi aturan dalam memeriksakan diri seperti, masih ada beberapa yang belum mengembalikan hasil dahak mereka yang di *Pot Sputum* (wadah lender untuk penderita Batuk)
 - d. Kepatuhan meminum obat bagi penderita TB yang belum semuanya pasien memiliki pendamping minum obat (PMO).



4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 terdiri dari :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.

b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.38
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5) : (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.445	2.445	100
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh pelayanan pengolahan air limbah domestik	3.000	3.000	100



4.3.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.39

**Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2.445	2.295	93,87
2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	3.000	2.900	96,67%

Sumber data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.40

**Alokasi Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum
Dinas PUPR Kabupaten Maros Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	14.630.603.000	14.075.655.623,51	96.2	APBD



2	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	5.499.224.550	5.385.806.550	97.94 %	(DAK dan DAU)
Total Anggaran SPM		20.129.827.550	19.461.462.173,51	96.67	APBD
Total Anggaran SKPD		275.525.120.556	225.038.456.694,74	81.68	(DAK dan DAU)
Persentase Alokasi Anggaran SPM		8,96%	8,64		

Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Maros

4.3.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan pekerjaan umum digambarkan sebagai berikut :

Tabel III.4
Daftar Pegawai Dinas PUPR Kab. Maros

NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	2	3	5
2	III	35	28	63
3	II	22	9	31
4	I		1	1
Total				100

Sumber data : BKPSDM Kab.Maros Tahun 2022

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

Sasaran Jangka Menengah RENSTRA K/L	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Meningkatnya pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum, sanitasi, drainase dan	Jumlah fasilitas MCK, persampahan, IPAL, dan air bersih tingkat rumah tangga	Kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan terhadap penting air minum layak,	Sudah dilakukan upaya pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan serta pengelolaan



persampahan dengan sistem terpusat berbasis masyarakat	masih kurang	sanitasi dan pengelolaan sampah yang aman	air limbah dan sampah yang terpadu (TPS3R)
Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur wilayah	Universal akses air minum yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada air minum curah regional	Belum semua kabupaten memiliki kegiatan prioritas penyediaan air minum	Urusan penyediaan air minum merupakan pelayanan dasar yang bersifat wajib (SPM)
Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Universal akses air limbah domestik yang belum tercapai, layanan provinsi hanya pada pengolahan limbah regional	Pengolahan limbah domestik belum menjadi prioritas beberapa kabupaten	Sosialisasi terhadap kab/kota bahwa pengolahan limbah domestik merupakan bagian dari SPM kab/kota

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Urusan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros terdiri dari :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.41
Target SPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	245	245	100 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0 %	Tidak Ada Program Pemerintah Daerah Kab. Maros Tahun 2022 yang mengakibatkan adanya warga negara yang terkena relokasi

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.42
Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	245	245	100 %	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.	0	0	0 %	Tidak Ada Program Pemerintah Daerah Kab. Maros Tahun 2022 yang mengakibatkan adanya warga negara yang terkena relokasi

Sumber data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

4.4.4. Alokasi Anggaran

Adapun Alokasi Anggaran urusan perumahan rakyat oleh Pemerintah Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Maros Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :



Tabel 2.44
Alokasi Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Pemukiman
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	160.000.000	140.000.000	87,5%	APBD
		884.800.000	884.800.000	100%	Provinsi
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten	0	0	0%	
Total Anggaran SPM		1.044.800.000	1.024.800.000	98%	
Total Anggaran SKPD		4.836.040.000	4.031.639.000	83,37%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		21,60%	25,41%		

Sumber data : Dinas Peumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup

4.4.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan perumahan rakyat digambarkan sebagai berikut :

NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	2	3	5
2	III	35	28	63
3	II	22	9	31
4	I		1	1
Total				100



4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	f. Lokasi Jauh g. Sulitnya berkoordinasi dengan Aparat Desa h. Pengumpulan Data ditingkat Desa Masih Kurang	Menyiapkan Standarisasi permintaan kebutuhan data pada Organisasi yang terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat
2.	Penghitungan Kebutuhan	e. Data yang Masuk Lebih Banyak dari pada rencana Realisasinya f. Perencanaan Pendataan lebih banyak dari pada usulan kegiatan	c. Perhitungan Kebutuhan Rumah Korban Bencana Harus Disesuaikan berdasarkan tingkat kerusakan Rumah Masyarakat d. Menyesuaikan jumlah kebutuhan pemenuhan rumah korban bencana
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	c. Belum terakomodirnya beberapa program dan kegiatan dalam pemenuhan standar pelayanan minimal. d. Ketersediaan anggaran yang belum maksimal dalam Penanganan Korban Bencana	Memaksimalkan Program dan kegiatan dalam pemenuhan SPM. Mengalokasikan dana/ Anggaran
4.	Pelaksanaan	d. Pendistribusian Material yang susah dijangkau kendaraan 4 roda e. Pengurangan Anggaran yang disebabkan oleh beberapa factor sehingga beberapa layanan tidak dapat dapat dipenuhi. f. Minimannya sumberdaya yang tersedia	Pengalokasian Anggaran dalam pemenuhan layanan SPM perlu dimaksimalkan.
5.	Pelaporan	-	-



No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
6.	Lain-lain	-	-

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 pada 2 (dua) Organisasi Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari :

- a) Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

Adapun mutu pelayanan terkait ketentraman dan ketertiban Umum meliputi

- standar operasional prosedur Satpol PP
- standar sarana prasarana Satpol PP;
- standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

- b) Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran meliputi:

- layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran;



- layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi;
- layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran; dan
- layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian SPM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.45
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	118	118	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	50	36	72 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.



4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.46

**Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	118	118	100 %
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	50	36	72 %

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab.

Maros

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.47

**Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros
Tahun 2022**

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	3.808.830.000	3.755.740.000	98,61 %	APBD
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	2.165.578.700	2.148.048.700	99,19%	APBD
3	penegakan kebijakan dan peraturan perundangan daerah	Rp. 25.160.000	Rp. 25.160.000	100%	APBD
Total Anggaran SPM		Rp. 5.999.568.700	Rp.5.928.948.700	98,82%	
Total Anggaran SKPD		Rp. 14.438.427.225	Rp. 14.051.811.737	97,32%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		41,55%	42,19%		

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Maros

4.5.5. Dukungan Personil

Sumber daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Maros dalam rangka mendukung pemenuhan SPM bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat digambarkan sebagai berikut :



NO	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	9	2	11
2	III	27	10	37
3	II	47	5	52
4	I	3	0	3
Total				103

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Tidak tersedianya data (tidak terdokumen secara baik) sejumlah kegiatan dilaksanakan tetapi tidak tercatat karena Kurangnya sumber daya aparatur yang mampu mengoperasikan komputer dengan baik dan mahir;	Memberikan kesempatan kepada perencana dan pelaksana teknis untuk mengikuti pelatihan mengenai Standar Pelayanan Minimal
2.	Penghitungan Kebutuhan	a. Belum adanya pemetaan daerah-daerah yang rawan bencana kebakaran; b. Banyaknya jumlah tenaga honor satpol PP dan Damkar, sehingga anggaran yang ada di peruntukan untuk	a. Perlu adanya pemetaan daerah rawan bencana kebakaran dan penambahan beberapa Wilayah Manajemen Kebakaran; b. Mengajukan untuk melakukan



		<p>memenuhi jasa tenaga honor;</p> <p>c. c Kondisi sarana prasarana masih perlu di tambah utamanya mobil operasional Satdalmas, Patroli dan Armada Pemadam Kebakaran masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum memiliki Armada dan Penempatan personil Sektor di Kecamatan (Tompobulu, Mallawa, Cenrana, Simbang, Lau, MarosBaru dan Mandai).</p>	<p>pengangkatan khusus kepada tenaga honor Satpol PP dan Damkar serta melakukan seleksi kembali untuk mengurangi jumlah tenaga honor yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya;</p> <p>c. Penambahan jumlah sarana prasaran berupa armada pengangkut petugas</p>
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	<p>a. Kurangnya Anggaran dalam mendukung program dan kegiatan</p> <p>b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;</p>	Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional;
4.	Pelaksanaan	<p>a. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergitas antara dinas/instansi terkait;</p> <p>b. Masih banyaknya Aparatur yang belum memenuhi standar kompetensi sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah Peraturan Pemerintah 16 tahun 2018</p>	<p>a. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;</p> <p>b. Mengirim Aparatur untuk mengikuti Diklat pengembangan SDA Aparatur Satpol PP dan Damkar</p>



		tentang Satpol PP	
5.	Pelaporan	Pelaporan Belum Berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Sebaiknya Pelaporan Berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Segera di Terapkan Agar Lebih Efisien dan Cepat
6.	Lain-lain	a. Tidak adanya Hydran sumber air untuk pemadam kebakaran; b. Masih adanya kondisi jalan yang rusak dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran; c. Kurangnya wilayah manajemen kebakaran yang mengakibatkan sulitnya pengendalian kebakaran di lokasi luar WMK;	a. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menambah pos pemadam kebakaran; b. Perbaiki jalan yang tidak bisa dijangkau oleh mobil damkar; c. Perlu adanya pembuatan sumur penampungan air di beberapa titik yang tersebar di WMK sebagai sumber air bagi pemadam kebakaran

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :

a. Pelayanan Informasi rawan bencana

Pelayanan Informasi rawan bencana meliputi :

- penyusunan kajian risiko bencana;
- Komunikasi Informasi dan Edukasi rawan bencana.

b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana



Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana meliputi

- penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- pembuatan rencana kontinjensi;
- pelatihan pencegahan dan mitigasi;
- gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
- pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana meliputi

- respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas;
- respon cepat darurat bencana;
- aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
- pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
- pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.48
Target Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi	Jumlah warga negara yang	387.984	387.984	100 %



	rawan bencana	memproleh layanan informasi rawan bencana			
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100 %
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21.842	15	0,07%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros

4.5.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memproleh layanan informasi rawan bencana	387.984	387.984	100 %
2	Pelayanan pencegahan	Jumlah warga yang	100	100	100 %



	dan kesiapsiagaan terhadap bencana	memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	21.842	15	0,07%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran SPM bidang Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
Alokasi Anggaran SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Pelayanan Informasi rawan bencana	17.400.000	17.400.000	100	DAU
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	511.883.250	142.383.250	27,82	DAU
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	241.755.000	192.490.000	79,62	DAU
Total Anggaran SPM		771.038.250	352.273.250	45,69	
Total Anggaran SKPD		5.512.037.945	4.741.541.028	86,02	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		13,99	7,42		



Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Maros

4.5.5. Dukungan Personil

Sumber Daya Aparatur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maros Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Daftar Sumber Daya Manusia

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV	5	-	5
2	III	12	11	23
3	II	8	1	9
4	I	-	-	-
5	SATGAS	35	13	48
Total		60	25	85

Sumber data : BPBD Kab.Maros Tahun 2022

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Sulitnya menghimpun data yang lengkap dan akuntabel dari Bidang yang mengampu	Dibutuhkan data base yang dapat diakses bersama
2.	Penghitungan Kebutuhan	Belum ada kesamaan standar proses penghitungan	Melakukan bimbingan teknis untuk menyamakan persepsi
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	Program pelayanan SPM belum masuk skala prioritas dalam perencanaan.	Pemangku kepentingan harus memanfaatkan anggaran skala proiritas terkait pemenuhan SPM
4.	Pelaksanaan	Terbatasnya realisasi Anggaran 2022	Menambah realisasi anggaran



5.	Pelaporan	Tidak tersedianya data, perbedaan penghitungan, perbedaan skala prioritas, dan terbatasnya anggaran pelaksanaan berdampak pada penyusunan pelaporan yang lambat dan tidak akurat.	Dibutuhkan dukungan sumber daya yang profesional untuk menyusun laporan SPM
----	-----------	---	---

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti Sosial.
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan telah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.50
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Akan Mendapatkan Layanan	Capaian = (5): (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	105	105	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	118	118	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	21	21	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	61	61	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	1.015	1.015	100%

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros



4.6.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel 2.51
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Orang Yang Berhak Mendapatkan Layanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Layanan	Capaian = (5) : (4) x 100%
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	105	105	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi social diluar panti	118	118	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sosial.	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	21	21	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna social diluar panti	61	61	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh	1.015	1.015	100%



	tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	perlindungan dan jaminan sosial			
--	--	---------------------------------	--	--	--

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran SPM bidang Urusan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas sosial Kabupaten Maros tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.52
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Maros Tahun 2022

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Sumber Dana
1	2	4	5	6	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	37.900.000	37.350.000	99%	APBD
2	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	7.200.000	0	0%	APBD
3	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial.	12.350.000	12.350.000	100 %	APBD
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	70.270.000	70.270.000	100 %	APBD
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	174.000.000	173.000.000	99%	APBD
Total Anggaran SPM		366.270.000	292.920.000	80%	
Total Anggaran SKPD		1.994.905.560	1.923.416.755	96%	
Persentase Alokasi Anggaran SPM		18,38%	15,23%		

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Maros



4.6.5. Dukungan Personil

Capaian SPM Dinas Sosial Kabupaten Maros tergantung juga dari dukungan personil sebagai pelaksana program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial. Untuk tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Maros didukung oleh personil sebanyak 75 orang PNS, 96 orang TAGANA aktif, 54 Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 14 orang, pendamping SLRT sebanyak 8 orang, pendamping Peksos 4 orang.

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan dan Langkah Penyelesaian terhadap proses penerapan pelayanan dasar bidang sosial yang dilakukan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

No	Tahapan	Permasalahan	Langkah Penyelesaian
1.	Pengumpulan Data	Belum sempurnanya data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	Melakukan pendataan minimal 1 kali dalam 3 tahun dan updating data setiap Bulan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) .
2.	Penghitungan Kebutuhan	-	-
3.	Perencanaan Dan Penganggaran	a. Terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah yang diperuntukkan penanganan kesejahteraan sosial. b. Terbatasnya pemahaman pelaksana tentang standar operasional pelayanan kesejahteraan sosial.	a. Mengusulkan/maksimal anggaran untuk ditambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) b. Peningkatan SDM yang memiliki kompetensi melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai SOP.
4.	Pelaksanaan	Saran prasarana pendukung pelayanan kurang memadai.	Peningkatan sarana prasarana yang memudahkan akses



			pelayanan kesejahteraan sosial.
5.	Pelaporan	-	-
6.	Lain-lain	-	-



BAB V

PENUTUP

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beberapa tahun yang lalu yang telah direvisi melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Semua bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik yang pada akhirnya mendorong meningkatnya partisipasi publik. Hal ini sangat diperlukan dan merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 yang telah disusun ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Maros kepada publik yang menyajikan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros yang mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Pembahasan mengenai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diuraikan secara lengkap pada BAB I menggambarkan tentang informasi tentang profil daerah Kabupaten Maros secara umum, perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan umum penerapan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari : capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. diuraikan secara lengkap pada BAB II. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dijelaskan pada BAB III menguraikan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Adapun penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dijelaskan pada BAB IV menguraikan tentang pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yaitu : Urusan Pendidikan,



Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial yang telah dilaksanakan di Kabupaten Maros.

Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros tahun 2022 diwujudkan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memperoleh alokasi dana baik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun yang berasal dari sumber pendanaan lainnya. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah mampu mendorong perkembangan pembangunan di Kabupaten Maros. Banyaknya program dan kegiatan yang sifatnya strategis dan mendesak sementara sumber pendanaan masih terbatas sehingga, menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan harus didasarkan pada skala prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 Kabupaten Maros telah melalui tahapan review dan Evaluasi Mandiri terhadap seluruh capaian indikator kinerja kunci urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Maros yang tertuang dalam Surat Perintah Inspektur Nomor 130.4/30/A.4/ITDA tanggal 15 Februari 2023 untuk melakukan Review dan Evaluasi terhadap Seluruh Dokumen Pendukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD Kabupaten Maros Tahun 2021 yang berlangsung dari tanggal 15 Februari s/d 21 Maret 2023 di Ruang Bagian Pemerintahan.

Kami juga menyadari sepenuhnya bahwa, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini belum dapat memuaskan semua pihak dan menyelesaikan semua masalah yang ada, namun dengan berbagai usaha dan upaya sungguh-sungguh yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros saat ini telah membawa perubahan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022 ini kami buat untuk menjadi bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Maros untuk Tahun Anggaran 2023, dengan harapan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini benar-benar menjadi bahan evaluasi Pemerintah dalam mengambil kebijakan secara adil dan bijaksana dalam melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Maros.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat memberikan manfaat untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang, dan Pemerintah Kabupaten Maros akan terus melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki untuk lebih mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penerapan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



H. G. S. GHAI DIR SYAM, S.I.P., M. H